



PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023





PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



PETA KALIMANTAN TIMUR



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Buku Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah tersusun. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini untuk memenuhi kebutuhan data di Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan tugas pokok instansi di lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.

Data yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data-data statistik sektorial dari 36 Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022. Buku ini menyajikan data statistik sektorial dengan pembagian tematik berupa data umum, data sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan, data sumber pertanian dan ketahanan pangan, data perhubungan dan infrastruktur, data perdagangan, industry, koperasi dan modal, data ekonomi dan keuangan, data penanggulangan bencana dan satpol pp, dan data telekomunikasi dan pariwisata. Memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat, sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunaanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data-data statistik sektorial. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Data Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan buku data statistik sektorial ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan agar ke depannya buku statistik sektorial ini dapat disajikan lebih baik. Sekian dan terima kasih.

Samarinda, Agustus 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

PETA KALIMANTAN TIMUR.....	III
KATA SAMBUTAN.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GRAFIK.....	XIII
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Provinsi Kalimantan Timur.....	2
1.2 Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur.....	5
1.3 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur.....	6
BAB II SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN.....	9
2.1 DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.....	10
2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.....	21
2.3 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.....	31
2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	34
2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	44
2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim.....	54
2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim.....	57
2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.....	60
BAB III PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	67
3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim.....	68
3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	71
3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.....	81
3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	89
3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.....	102
3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.....	116

BAB IV SOSIAL MASYARAKAN DAN KESEJAHTERAAN	127
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	128
4.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur	135
4.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur	142
4.4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur	151
4.5 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.....	158
4.6 Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur....	163
4.7 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur	166
 BAB V PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN MODAL.....	 171
5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ...	172
5.2 Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur	184
5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	194
 BAB VI EKONOMI DAN KEUANGAN	 203
6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	204
6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	206
6.3 Badan Pendapatan Daerah	211
6.4 Biro Perekonomian Setda	216
6.5 Inspektorat	218
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220
 BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP	 233
7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	234
7.2 Satuan Polisi Pamong Praja.....	241
7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	248
 BAB VIII TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA	 257
8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.....	258
8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	263

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2022	14
Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk perKabupaten/Kota, 2022	15
Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk perKabupaten/Kota tahun, 2022	16
Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022	17
Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2022	18
Tabel 2.1.6 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022	19
Tabel 2.1.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022	20
Tabel 2.2.1 Jumlah Panti Werdha dan Penghuninya Menurut Status di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2022	26
Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022	27
Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022	28
Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022	29
Tabel 2.2.5 Jumlah Organisasi Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022	30
Tabel 2.3.1 Jumlah tenaga Widyaiswara berdasarkan gender, jabatan dan pendidikan, 2022..	32
Tabel 2.3.2 Jumlah pengembangan kompetensi jabatan fungsional, 2019-2022.....	33
Tabel 2.3.3 Jumlah pengembangan kompetensi structural dan pelatihan pra jabatan, 2019-2022	33
Tabel 2.3.4 Jumlah pengembangan kompetensi inti jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, 2019-2021.....	33
Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022.....	36
Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022.....	37
Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022.....	38
Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022.....	39
Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022	40
Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022	42
Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur,	

2022	46
Tabel 2.5.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	47
Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	47
Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	48
Tabel 2.5.5 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	49
Tabel 2.5.6 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022	50
Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	51
Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	52
Tabel 2.5.8 Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	53
Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	56
Tabel 2.6.2 Rekapitulasi Salur DD Kaltim Desember 2022	56
Tabel 2.7.1 Data Cabang Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2022	58
Tabel 2.7.2 Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga, kegiatan Olahraga, kegiatan Kepemudaan dan Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	59
Tabel 2.8.1 Indikator RPJMD Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	62
Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	63
Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022	64
Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022.....	69
Tabel 3.1.2 Data Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup, 2019-2022.....	70
Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	74
Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	75
Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	76
Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022.....	77

Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022	78
Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022.....	79
Tabel 3.2.7 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022.....	80
Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021.....	85
Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	86
Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	86
Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	87
Tabel 3.3.5 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	88
Tabel 3.4.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022	91
Tabel 3.4.2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022.....	92
Tabel 3.4.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022.....	93
Tabel 3.4.4 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022.....	94
Tabel 3.4.5 Produksi Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022	95
Tabel 3.4.6 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022	96
Tabel 3.4.7 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022	97
Tabel 3.4.8 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022.....	98
Tabel 3.4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022.....	99
Tabel 3.4.10 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha), 2018-2022.....	100
Tabel 3.4.11 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ton), 2018-2022.....	101

Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	106
Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	107
Tabel 3.5.3 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	108
Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	109
Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	110
Tabel 3.5.6 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	111
Tabel 3.5.7 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	112
Tabel 3.5.8 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Buah- Buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022.....	113
Tabel 3.5.9 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	114
Tabel 3.5.10 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	115
Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	120
Tabel 3.6.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	121
Tabel 3.6.2 Lanjutan.....	122
Tabel 3.6.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	123
Tabel 3.6.4 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	124
Tabel 4.1.1 Jumlah Kendaraan Dan Rasio Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022.....	131
Tabel 4.1.2 Daftar Terminal Bus di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	131
Tabel 4.1.3 Jumlah Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2023.....	132
Tabel 4.1.4 Jumlah Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2023	133
Tabel 4.1.5 Daftar Bandara di Provinsi Kalimantan Timur dengan Status Sudah Beroperasi, 2023	134
Tabel 4.2.1 Data Sumber Air Potensial, 2022.....	138
Tabel 4.2.2 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	139

Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2019-2022.....	140
Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2019-2022.....	141
Grafik 4.3.2 Suhu Rata-rata dalam Satu Tahun di Tiga Wilayah di provinsi Kalimantan Timur (derajat selsius), 2019-2022*	145
Tabel 4.3.1 Suhu Terendah, Suhu Tertinggi, dan Suhu Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (derajat celsius), 2019-2022*	146
Tabel 4.3.2 Kelembaban Udara Terendah, Kelembaban Udara Tertinggi, dan Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*	147
Tabel 4.3.3 Curah Hujan Terendah, Curah Hujan Tertinggi, dan Curah Hujan Total dalam Satu Tahun di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mm), 2019-2022*	148
Tabel 4.3.4 Kecepatan Angin Terendah, Kecepatan Angin Tertinggi, dan Kecepatan Angin Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (m/detik), 2019-2022*	149
Tabel 4.3.5 Penyinaran Matahari Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*	150
Tabel 4.3.6 Tekanan Udara Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mb), 2019-2022*	150
Tabel 4.4.1 Data Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2022.....	154
Tabel 4.4.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2016-2022.....	155
Tabel 4.4.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2016-20222022*	155
Tabel 4.4.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2016-2022.....	156
Tabel 4.4.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	157
Tabel 4.4.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/ Kota, 2022	157
Tabel 4.5.1 Indikator sdgs Biro Organisasi, 2019-2022.....	161
Tabel 4.5.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2019-2022	161
Tabel 4.5.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2019-2022	162
Tabel 4.6.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2020-2022	165
Tabel 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain Yang Masih Berlaku, 2016-2022	165
Tabel 4.7.1 Daftar Data Prioritas Tahun 2022	168
Tabel 4.7.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur,	

2016-2021	168
Tabel 5.1.1 Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2016-2022	175
Tabel 5.1.2 Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2022	176
Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2022	177
Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	178
Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2022	179
Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 ...	180
Tabel 5.1.7 Data Realisasi Pelaksanaan Pelatihan pada UPTD BLKI Balikpapan Provinsi Kaltim Tahun 2018-2020	181
Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2016-2022	182
Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2016-2022	183
Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2021-2022	186
Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2022	187
Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022	188
Tabel 5.2.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, 2016-2020	188
Tabel 5.2.5 Cakupan bina kelompok pengrajin, 2016-2020	189
Tabel 5.2.6 Data IKM Berorientasi Ekspor, 2016-2021	189
Tabel 5.2.7 data indikator rpjmd, 2016-2021	190
Tabel 5.2.8 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2016-2022	190
Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2016-2022	191
Tabel 5.2.10 Data Koperasi, 2016-2022	191
Tabel 5.2.11 Data Potensi Industri, 2016-2021	192
Tabel 5.2.12 Data UMKM, 2021-2022	192
Tabel 5.2.13 Jumlah koperasi menurut prinsip keuangan, 2016-2022	193
Tabel 5.2.14 Data Jumlah Pasar, 2018-2022	193
Tabel 5.2.15 Data Jumlah UMKM Potensi Ekspor, 2021-2022	193
Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	198
Tabel 5.3.2 Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2021.	199
Tabel 5.3.3 Produksi Minyak Bumi (MBBL) dan Gas Bumi (MMBTU) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	199
Tabel 5.3.4 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2022	200
Tabel 5.3.5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2016-2022	201
Tabel 6.1. 1 Data Topografi Provinsi Kalimantan Timur , 2016-2020	204
Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	205
Tabel 6.1.3 Luas Pengelolaan Laut dan jarak Provinsi Kalimantan Timur 2017-2022	205

Tabel 6. 2. 1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	207
Tabel 6.2.2 Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan TA 2021 – 2022	208
Tabel 6.2.3 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2022	208
Tabel 6.2.4 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2022	209
Tabel 6.2.5 Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan Milik Sendiri Sewa Pinjam Gabung Tahun 2019-2022	210
Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2022	212
Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	212
Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022.....	213
Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022	213
Table 6.3.4 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021-2022	214
Tabel 6.3.5 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022.....	214
Lanjutn Tabel 6.3.5	215
Tabel 6.3.6 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021-2022	215
Tabel 6. 4.1 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022	216
Tabel 6.4.2 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019-2021 Provinsi Kalimantan Timur	217
Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022.....	219
Tabel 6.5.2 Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2019-2021.....	219
Tabel 6.6.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	222
Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	223
Lanjutan Tabel 6.6.2.....	224
Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	225
Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2022	226
Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	227
Table 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	228
Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	229
Tabel 6.6.8 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	230
Tabel 6.6.9 Jumlah Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2022.....	231
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2022	235

Tabel 7.1.2 Jumlah LSM Tahun 2019-2022.....	236
Tabel 7.1.3 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022	236
Tabel 7.1.4 Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022	237
Tabel 7.1.5 Jumlah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	237
Lanjutan Tabel 7.1.5.....	238
Tabel 7.1.6 Data Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	239
Tabel 7.1.7 Data Pembentukan Forum pembauran kebangsaan (FKP) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	240
Tabel 7.2.1 Data Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022.....	244
Tabel 7.2.2 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2016-2022	245
Tabel 7.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022	246
Tabel 7.2.4 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	246
Tabel 7.2.5 Jumlah Aparat Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	247
Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Januari-Oktober 2022.....	249
Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	250
Lanjutan Tabel 7.3.2	251
Lanjutan Tabel 7.3.2.....	252
Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	253
Tabel 7.3.4 Kerusakan Kasawan Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	254
Tabel 7.3.5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021.....	255
Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022.....	260
Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2019-2022.....	261
Tabel 8.1.3 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2019-2022.....	262
Tabel 8.1.4 RPJM Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	262
Tabel 8.2.1 Daftar Data Prioritas Tahun 2022	265
Tabel 8.2.2 Data Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	266
Tabel 8.2.3 Data jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2022	267
Tabel 8.2.4 Data jumlah tenaga kerja di hotel berbintang di kaltim 2022	267
Tabel 8.2.5 Data pramuwisata dan toko cinderamata provinsi kaltim 2016-2022.....	268
Tabel 8.2.6 Data jumlah usaha restoran dan rumah makan di kaltim 2022	268

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2022	11
Grafik 2.1.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2022	12
Grafik 2.2.1 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2022	25
Grafik 2.3.1 Jumlah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) , Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan pelatihan pra jabatan (LATSAR CPNS), 2020-2022	31
Grafik 2.4.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022	35
Grafik 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022	44
Grafik 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	54
Grafik 2.8.1 Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	60
Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	68
Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2022.....	71
Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2018-2022.....	73
Grafik 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021	83
Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	84
Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022	89
Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022.....	90
Grafik 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	105
Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	119
Grafik. 4.1.1 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022.....	129
Grafik. 4.1.2 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Bandara di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022.....	130
Grafik. 4.2.1 Panjang Jalan Nasional menurut Kondisinya (km), 2019-2023.....	135
Grafik. 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi menurut Kondisinya (km), 2019-2022	136
Grafik. 4.3.1 Curah Hujan dalam Satu tahun di Tiga Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (mm), 2019-2022.....	143
Grafik 4.4.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi	

Pengunjung, 2019-2022	152
Grafik 4.4.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim , 2022.....	153
Grafik 4.5.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2019-2022.....	159
Grafik 4.5.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2019-2022.....	160
Grafik 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku, 2019-2022.....	164
Grafik 4.7.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022.....	167
Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja dan Jumlah Tenaga kerja, 2016-2022.....	174
Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	184
Grafik 5.3.1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022.....	195
Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022	211
Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PDMN Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022.....	221
Grafik 7.1.1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur.....	235
Grafik 7.2.1 Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	244
Grafik 7.3.1 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	248
Grafik 8.1.1 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	258
Grafik 8.2.1 Total Wisatawan dan Target Kunjungan Wisatawan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022.....	263

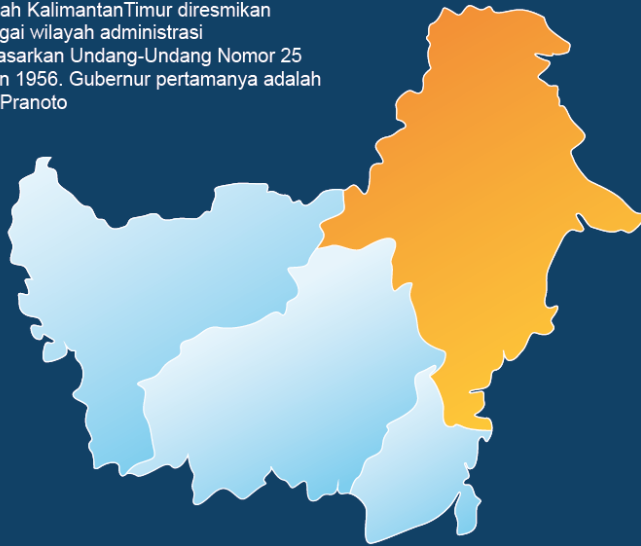


PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X X X X X
X X X X X X

Pada tahun 1956, wilayah Kalimantan Timur diresmikan sebagai wilayah administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Gubernur pertamanya adalah APT Pranoto



POTENSI DAERAH

(Kayu Olahan)

(Kelapa Sawit)

(batubara)



Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 1956, wilayah Kalimantan Timur diresmikan sebagai wilayah administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Gubernur pertamanya adalah APT Pranoto. Sebelumnya, Kalimantan Timur merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan. Menanggapi aspirasi masyarakat, pada tahun 1956 wilayah tersebut dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.9). Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:

1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan Kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.

Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong.
2. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
3. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar
2. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta
3. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau
4. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan
5. Kota Bontang (peningkatan kota administrative Bontang menjadi kotamadya)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (UU No.20 Tahun 2012). Lima Kota/ Kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah kota/kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota/kabupaten menjadi 9 kota/kabupaten.

Tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabupaten termuda dikaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenaikan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 Kota/Kabupaten.



1.2 Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif Provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dimana sungai menjadi salah satu sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Adapun sungai terpanjang di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam. Sungai ini berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

1.3 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur

Visi Kaltim Berdaulat Tahun 2023
Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat.

Misi

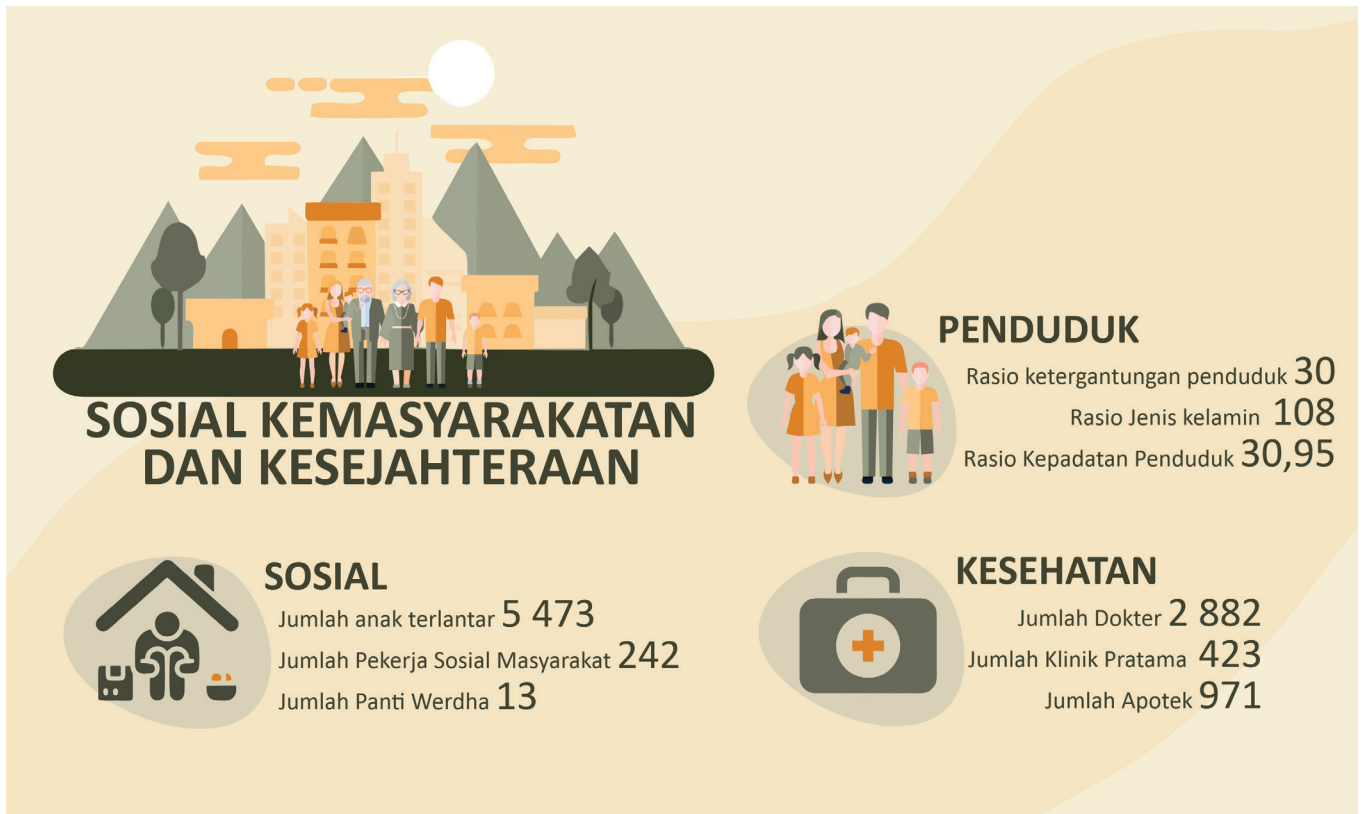
- 1) Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



x x x x x
x x x x x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



BAB II

SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

2.1 DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Data hasil registrasi penduduk adalah data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut dicatat secara administrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data non registrasi merupakan data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan perkawinan (muslim) serta perceraian (muslim). Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung terkait dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Pada elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

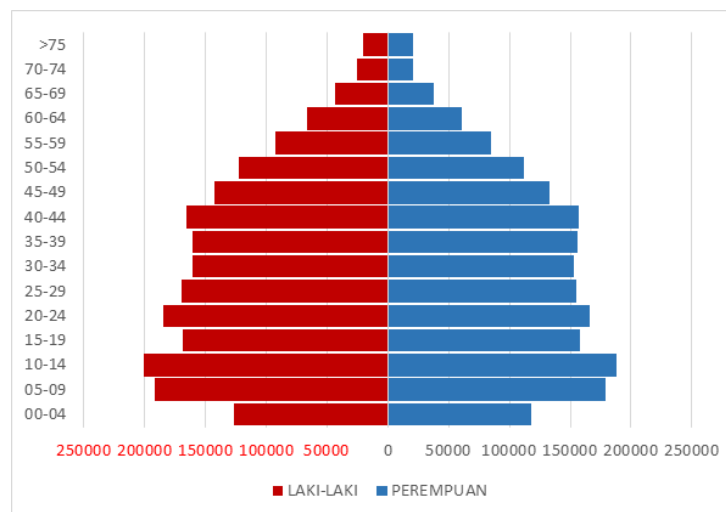


Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/

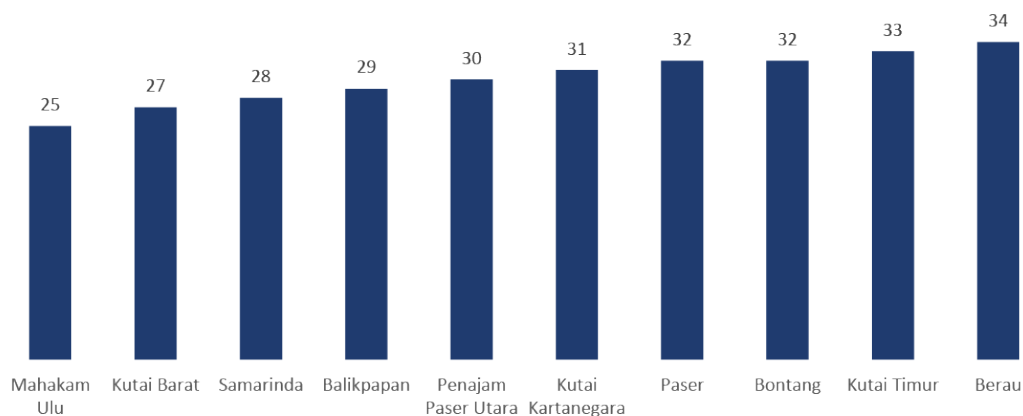
kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut berarti untuk data Perkembangan Kependudukan didasarkan pada DAK 2 (Data Agregat Kependudukan Semester 2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan 2 kali dalam setahun. Bila ada perbedaan antara DAK 2 dengan data di daerah, maka data DAK 2 yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Grafik 2.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2022



Pada gambar piramida ini, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk dalam kelompok umur 0-4 tahun yang terletak di bagian paling dasar piramida mencapai 7%. Sama halnya, jumlah penduduk dalam kelompok umur 5-9 tahun juga masih memiliki lebar yang signifikan, mengindikasikan bahwa dalam lima tahun mendatang, fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang memadai akan diperlukan untuk menampung anggota kelompok ini. Begitu pula, jumlah penduduk dalam kelompok umur 20-24 tahun menunjukkan angka yang besar. Terdapat dugaan bahwa kelompok umur ini mencakup individu yang lahir antara tahun 1998 hingga 2001, yang kini memasuki rentang usia ini, juga mungkin termasuk migran yang pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini menarik banyak perhatian karena memiliki sumber daya alam yang melimpah serta beragam kawasan industri yang tersebar di wilayahnya. Sementara itu, proporsi penduduk lansia (65 tahun ke atas) masih relatif kecil, yakni sekitar 3%. Namun, perlu diperhatikan bahwa proporsi ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan karena perubahan dalam struktur umur penduduk serta peningkatan harapan hidup. Pertumbuhan jumlah populasi lansia ini harus segera diantisipasi sekarang, mengingat kelompok ini akan semakin besar di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia, dan kebutuhan sosial dasar lainnya.

Grafik 2.1.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2022

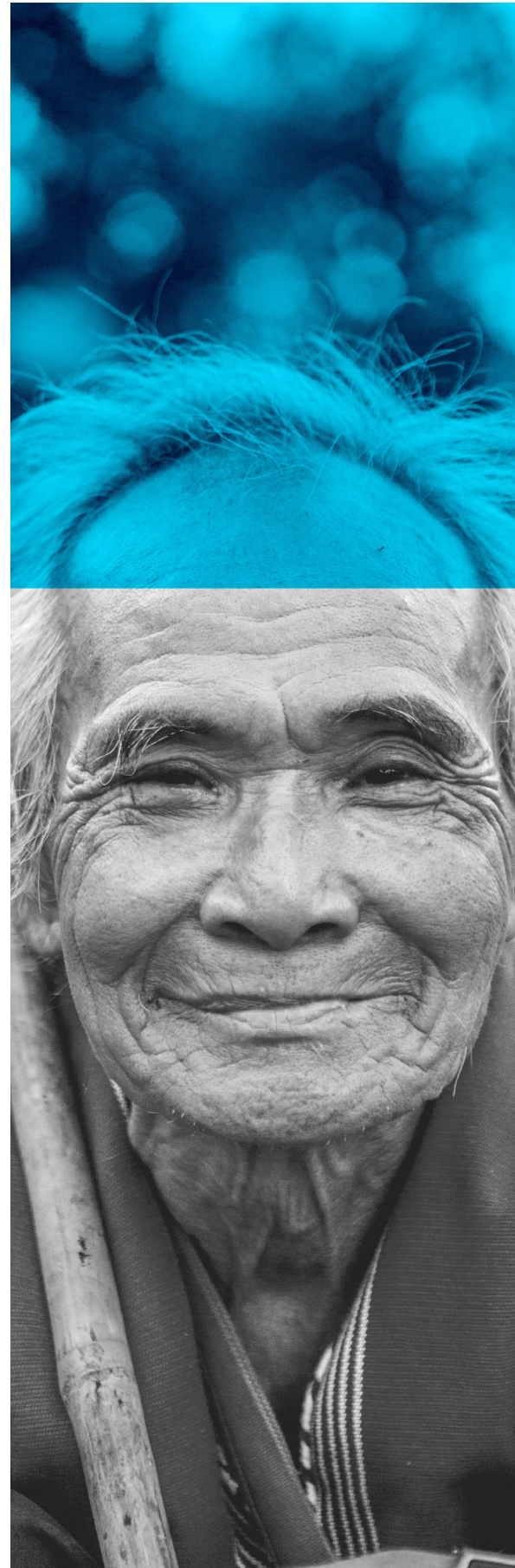


Rasio Ketergantungan, juga dikenal sebagai dependency ratio, dapat berfungsi sebagai indikator kasar untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara, baik sebagai negara maju atau yang sedang berkembang. Dependency ratio adalah indikator demografi yang signifikan, di mana semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh populasi produktif (usia 15-64 tahun) dalam membiayai baik populasi yang belum produktif (usia

0-14 tahun) maupun populasi yang tidak lagi produktif (usia 65 tahun ke atas). Di sisi lain, rasio ketergantungan yang lebih rendah mengindikasikan beban yang lebih ringan yang harus ditanggung oleh populasi produktif untuk membiayai kelompok penduduk yang masih tergolong non-produktif.

Konsep ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang bergantung pada populasi usia kerja. Rasio ketergantungan dihitung dengan membagi total populasi yang tidak produktif dengan total populasi yang produktif. Secara umum, rasio ketergantungan di Kalimantan Timur sekitar 30. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Kalimantan Timur harus menanggung beban dari sekitar 30 penduduk yang belum atau tidak lagi produktif, seperti anak-anak atau lansia. Angka ini masih berada di bawah angka 50 yang dianggap cukup rendah. Meskipun persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) terhadap total populasi di Kalimantan Timur kecil (3,6%), jumlah absolutnya cukup besar, mencapai 167.843 jiwa. Karena jumlah penduduk usia lanjut yang tinggi ini, diperlukan upaya pembangunan infrastruktur seperti panti jompo, rumah sakit, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Apabila melihat data dalam tabel penduduk yang tidak produktif, Kota Samarinda menonjol dengan populasi usia muda (0-14 tahun) yang berjumlah 207.586 jiwa. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rasio ketergantungan terendah, yaitu 25, yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya perkebunan di wilayah tersebut yang menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat. Di sisi lain, Kabupaten Berau memiliki rasio ketergantungan tertinggi, mencapai 34.



Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2022

WILAYAH	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	153 455	51,74	143 127	48,26	296 582	7,52
Kutai Kartanegara	405 154	52,07	372 942	47,93	778 096	19,74
Berau	144 720	53,03	128 167	46,97	272 887	6,92
Kutai Barat	92 207	52,51	83 403	47,49	175 610	4,46
Kutai Timur	227 438	53,42	198 349	46,58	425 787	10,80
Penajam Paser Utara	99 423	51,79	92 544	48,21	191 967	4,87
Mahakam Ulu	19 920	53,38	17 398	46,62	37 318	0,95
Kota Balikpapan	371 777	51,09	355 888	48,91	727 665	18,46
Kota Samarinda	432 306	50,88	417 411	49,12	849 717	21,56
Kota Bontang	96 433	51,81	89 704	48,19	186 137	4,72
TOTAL	2 042 833	51,83	1 898 933	48,17	3 941 766	100

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk perKabupaten/Kota, 2022

NO	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LUAS KM2	KEPADATAN PENDUDUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	153 455	143 127	296 582	11 906,96	24,91
2	Kutai Kartanegara	405 154	372 942	778 096	25 988,92	29,94
3	Berau	144 720	128 167	272 887	21 735,19	12,56
4	Kutai Barat	92 207	83 403	175 610	13 709,92	12,81
5	Kutai Timur	227 438	198 349	425 787	31 051,71	13,71
6	Penajam Paser Utara	99 423	92 544	191 967	2 923,73	65,66
7	Mahakam Ulu	19 920	17 398	37 318	19 449,41	1,92
8	Kota Balikpapan	371 777	355 888	727 665	512,25	1 420,53
9	Kota Samarinda	432 306	417 411	849 717	716,25	1 186,34
10	Kota Bontang	96 433	89 704	186 137	163,14	1140,96
	JUMLAH		1 898 933	3 941 766	127 346,92	30,95

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk perKabupaten/Kota tahun, 2022

KABUPATEN / KOTA	PENDUDUK KALTIM TAHUN 2021			PENDUDUK KALTIM TAHUN 2022			PERTAM- BAHAN PENDUDUK 2021 - 2022	PERTUMBU- HAN PEN- DUDUK 2021-2022
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	149 277	138 948	288 225	153 455	143 127	296 582	8 357	.
Kutai Kartanegara	392 404	361 458	753 862	405 154	372 942	778 096	24 234	3,11
Berau	139 540	123 610	263 150	144 720	128 167	272 887	9 737	3,57
Kutai Barat	89 534	81 337	170 871	92 207	83 403	175 610	4 739	2,7
Kutai Timur	227 388	197 355	424 743	227 438	198 349	425 787	1 044	0,25
Penajam Paser Utara	96 701	90 100	186 801	99 423	92 544	191 967	5 166	2,69
Mahakam Ulu	18 830	16 444	35 274	19 920	17 398	37 318	2 044	5,48
Kota Balikpapan	362 754	347 539	710 293	371 777	355 888	727 665	17 372	2,39
Kota Samarinda	422 783	408 437	831 220	432 306	417 411	849 717	18 497	2,18
Kota Bontang	96 113	89 280	185 393	96 433	89 704	186 137	744	0,4
TOTAL	1 995 327	1 854 512	3 849 837	2 042 839	1 898 940	3 941 774	91 937	2,33

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	126 671	3,21	117 938	2,99	244 609	6,21
05-09	191 292	4,85	178 749	4,53	370 041	9,39
10-14	201 049	5,1	188 228	4,78	389 277	9,88
15-19	169 056	4,29	158 038	4,01	327 094	8,3
20-24	184 484	4,68	165 913	4,21	350 397	8,89
25-29	169 471	4,3	154 698	3,92	324 169	8,22
30-34	160 347	4,07	152 708	3,87	313 055	7,94
35-39	161 018	4,08	155 978	3,96	316 996	8,04
40-44	166 087	4,21	157 055	3,98	323 142	8,2
45-49	142 588	3,62	132 668	3,37	275 256	6,98
50-54	122 737	3,11	112 023	2,84	234 760	5,96
55-59	92 908	2,36	85 310	2,16	178 218	4,52
60-64	66 467	1,69	60 442	1,53	126 909	3,22
65-69	43 252	1,1	37 555	0,95	80 807	2,05
70-74	25 319	0,64	20 703	0,53	46 022	1,17
>75	20 087	0,51	20 927	0,53	41 014	1,04
JUMLAH	2 042 833	51,83	1 898 933	48,17	3 941 766	100

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2022

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	SEX RATIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
00-04	126 671	6	117 938	6	107
05-09	191 292	9	178 749	9	107
10-14	201 049	10	188 228	10	107
15-19	169 056	8	158 038	8	107
20-24	184 484	9	165 913	9	111
25-29	169 471	8	154 698	8	110
30-34	160 347	8	152 708	8	105
35-39	161 018	8	155 978	8	103
40-44	166 087	8	157 055	8	106
45-49	142 588	7	132 668	7	107
50-54	122 737	6	112 023	6	110
55-59	92 908	5	85 310	4	109
60-64	66 467	3	60 442	3	110
65-69	43 252	2	37 555	2	115
70-74	25 319	1	20 703	1	122
>75	20 087	1	20 927	1	96
JUMLAH	2 042 833	100	1 898 933	100	108

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.6 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022

KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				SEX RATIO
	L	%	P	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	153 455	8	143 127	8	107
Kutai Kartanegara	405 154	20	372 942	20	109
Berau	144 720	7	128 167	7	113
Kutai Barat	92 207	5	83 403	4	111
Kutai Timur	227 438	11	198 349	10	115
Penajam Paser Utara	99 423	5	92 544	5	107
Mahakam Ulu	19 920	1	17 398	1	114
Kota Balikpapan	371 777	18	355 888	19	104
Kota Samarinda	432 306	21	417 411	22	104
Kota Bontang	96 433	5	89 704	5	108
TOTAL	2 042 833	100	1 898 933	100	108

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022

KABUPATEN/KOTA	USIA ANAK	USIA PRODUKTIF	USIA LANJUT	DEPENDENCY RATIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	77 588	206 666	12 328	32
Kutai Kartanegara	202 076	541 283	34 737	31
Berau	73 201	190 483	9 203	34
Kutai Barat	42 714	124 378	8 518	27
Kutai Timur	112 727	300 684	12 376	33
Penajam Paser Utara	49 612	132 909	9 446	30
Mahakam Ulu	8 678	26 504	2 136	25
Kota Balikpapan	182 013	509 824	35 828	29
Kota Samarinda	207 586	604 614	37 517	28
Kota Bontang	47 732	132 651	5 754	32
TOTAL	1 003 927	2 769 996	167 843	30

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 75 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL". Dan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas /sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.



Sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Prov. Kaltim maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upayaupaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dandunia usaha
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

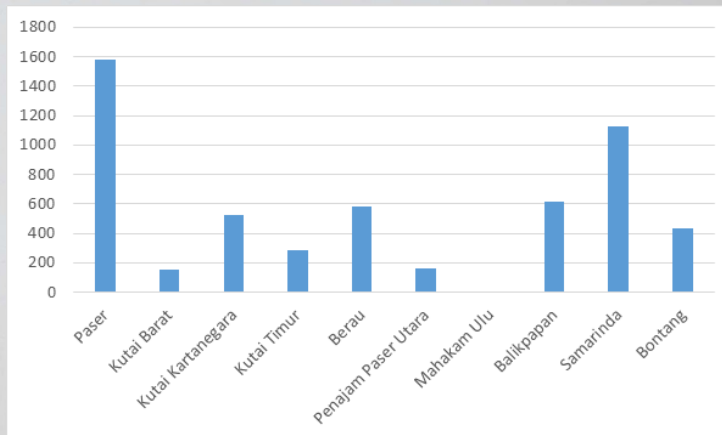
Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Prov. Kalimantan Timur maka disusunla suatu kebijakan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya
2. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. Mengembangkan dan menyasikan kebijakan untuk penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam penanggulangan bencana
6. Perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan mengembangkan komitmen dan aksi masyarakat sebagai pelaku usaha kesejahteraan sosial.
7. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala, monitoring dan evaluasi serta reviu.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah merilis sejumlah data yang memberikan gambaran tentang kondisi sosial di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan kepada lansia, anak terlantar, pekerja sosial masyarakat (PSM), serta organisasi dan karang taruna di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui data-data yang terkumpul, kita dapat mengidentifikasi tren dan perubahan yang terjadi dalam bidang sosial selama beberapa periode hingga tahun 2022.



Grafik 2.2.1 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2022



Grafik Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 menggambarkan situasi jumlah anak terlantar dalam rentang usia 0-21 tahun di berbagai wilayah. Kabupaten Paser memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 1.583, sementara Kabupaten Kutai Barat memiliki 153 anak terlantar. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 523, sedangkan di Kabupaten Kutai Timur terdapat 287 anak terlantar. Kabupaten Berau memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 584, dan Penajam Paser Utara memiliki 164 anak terlantar. Kabupaten Mahakam Ulu tidak memiliki data yang tersedia.

Di kota-kota, Balikpapan memiliki 614 anak terlantar, sementara Samarinda memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 1.129. Bontang memiliki 436 anak terlantar. Jumlah total anak terlantar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah 5.473. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi jumlah anak terlantar di berbagai wilayah Kalimantan Timur dalam tahun tersebut.

Tabel 2.2.1 Jumlah Panti Werdha dan Penghuninya Menurut Status di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2022

Tahun Years	Panti Werdha			Penghuni		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	1	4	5	110	1 226	1 336
2019	1	5	6	110	1 336	1 509
2020	1	11	12	110	1 399	3 889
2021	1	12	13	110	1 509	4 039
2022	1	12	13	110	3 779	4 039

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	1 630	1 501	1 583
2. Kutai Barat	205	184	153
3. Kutai Kartanegara	718	649	523
4. Kutai Timur	346	337	287
5. Berau	416	264	584
6. Penajam Paser Utara	75	203	164
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota			
1. Balikpapan	944	1 460	614
2. Samarinda	1 530	1 448	1 129
3. Bontang	462	526	436
Kalimantan Timur	6 326	6 572	5 473

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	20	25	25
2. Kutai Barat	4	5	5
3. Kutai Kartanegara	18	20	20
4. Kutai Timur	9	9	9
5. Berau	12	28	28
6. Penajam Paser Utara	8	5	5
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota			
1. Balikpapan	32	38	38
2. Samarinda	109	100	100
3. Bontang	13	12	12
Kalimantan Timur	225	242	242

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	15	27	62
2. Kutai Barat	171	179	179
3. Kutai Kartanegara	63	63	63
4. Kutai Timur	109	81	81
5. Berau	76	76	76
6. Penajam Paser Utara	54	54	54
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota			
1. Balikpapan	10	34	34
2. Samarinda	45	59	20
3. Bontang	15	16	16
Kalimantan Timur	558	589	585

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.5 Jumlah Organisasi Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022

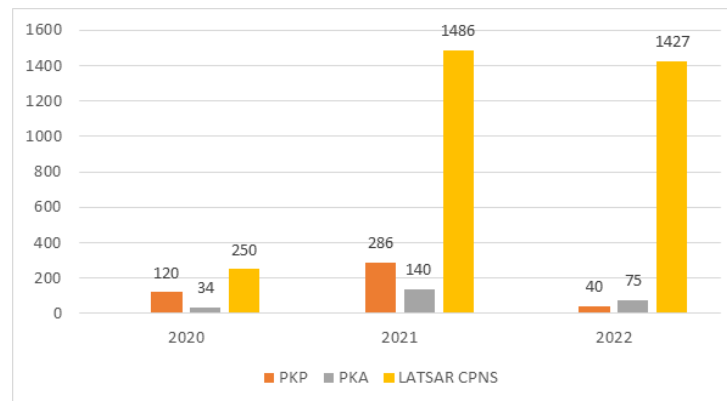
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	20	25	25
2. Kutai Barat	4	5	5
3. Kutai Kartanegara	18	20	20
4. Kutai Timur	9	9	9
5. Berau	12	28	28
6. Penajam Paser Utara	8	5	5
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota			
1. Balikpapan	32	38	38
2. Samarinda	109	100	100
3. Bontang	13	12	12
Kalimantan Timur	225	242	242

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.3 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Di era saat ini, peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur sangat penting. BPSDM memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tenaga kerja yang unggul, terampil dalam teknologi dan inovasi, serta peka terhadap isu lingkungan. Dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai, BPSDM dapat mempersiapkan masyarakat Kaltim menghadapi tantangan global, memajukan sektor ekonomi, serta memastikan kesinambungan lingkungan dalam menjaga keberlanjutan wilayah ini di masa depan.

Grafik 2.3.1 Jumlah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan pelatihan pra jabatan (LATSAR CPNS), 2020-2022



Dalam periode 2020 hingga 2022, data dalam grafik diatas menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah peserta pelatihan di berbagai kategori. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mengalami fluktuasi yang tajam, turun drastis dari 120 peserta pada tahun 2020 menjadi hanya 40 peserta pada tahun 2022. Sementara itu, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dengan 140 peserta, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan 75 peserta. Di sisi lain, Pelatihan Pra Jabatan (LATSAR CPNS) menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan, tetapi tetap memiliki jumlah peserta yang tinggi, dengan 1427 peserta pada tahun 2022. Selama periode tiga tahun tersebut, penting bagi pihak yang terlibat dalam perencanaan pelatihan untuk memahami tren ini dan meresponsnya dengan tepat. Hal ini akan membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan memastikan bahwa pelatihan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan aktual serta prioritas organisasi. Selain itu, evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi dalam jumlah peserta pelatihan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk perbaikan lebih lanjut dalam program pelatihan.



Tabel 2.3.1 Jumlah tenaga Widyaiswara berdasarkan gender, jabatan dan pendidikan, 2022

	Kategori	Tahun
	(1)	(2)
Jabatan	Pertama	-
	Muda	4
	Madya	7
	Utama	4
Jenis Kelamin	Laki-laki	11
	Perempuan	4
Pendidikan	S2	12
	S3	3

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel di atas memberikan informasi mengenai tenaga Widyaiswara berdasarkan jabatan, jenis kelamin, dan pendidikan pada tahun 2022. Dalam hal jabatan, terdapat 4 orang di tingkat Muda, 7 orang di tingkat Madya, dan 4 orang di tingkat Utama. Terlihat bahwa laki-laki mendominasi kehadiran dengan 11 orang, sedangkan wanita berjumlah 4 orang. Sementara dalam hal pendidikan, mayoritas Widyaiswara memiliki gelar S2, yang terdiri dari 12 individu, dan 3 orang memiliki pendidikan pada tingkat S3. Meskipun distribusi gender masih tidak seimbang, tren pendidikan yang tinggi menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menyampaikan pelatihan berkualitas.

Tabel 2.3.2 Jumlah pengembangan kompetensi jabatan fungsional, 2019-2022

TAHUN	PELATIHAN	BIMTEK	WORKSHOP	SEMINAR DARING	SOSIALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	19	0	0	0	0
2020	42	0	68	1 090	0
2021	97	156	0	0	39
2022	416	305	0	0	531

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.3 Jumlah pengembangan kompetensi structural dan pelatihan pra jabatan, 2019-2022

TAHUN	PIM IV	PKP	PKA	LATSAR CPNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	1 120	0	0	0
2020	0	120	34	250
2021	0	286	140	1 486
2022	0	40	75	1 427

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.4 Jumlah pengembangan kompetensi inti jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, 2019-2021

TAHUN	SHARING SESSION	COMMUNITY OF PRACTICES	SEMINAR DARING
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	131	0	0
2020	0	0	842
2021	173	493	0

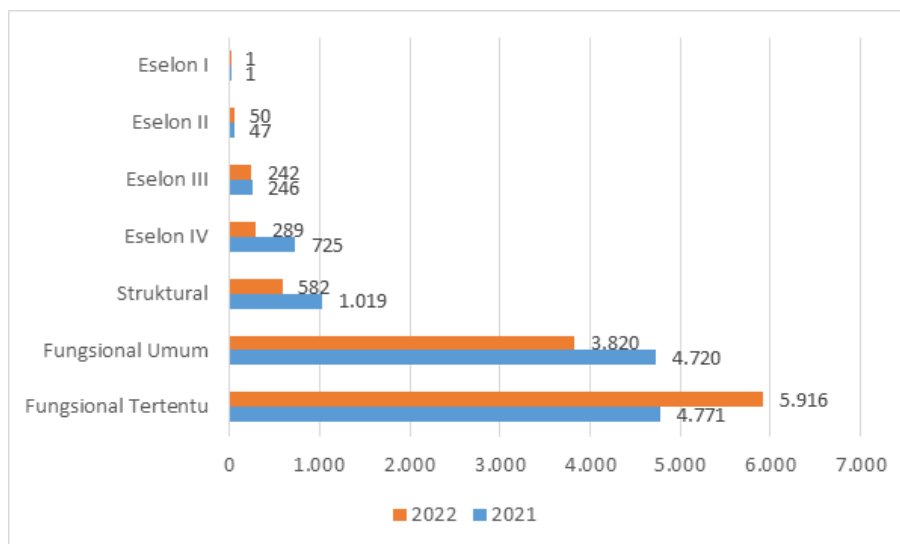
Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Kepegawaian Daerah adalah entitas pendukung dalam urusan pemerintahan terkait kepegawaian, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu peran utamanya adalah melaksanakan tugas dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi. Tugas ini mengharuskan Badan Kepegawaian Daerah untuk menyajikan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, penyajian data dan informasi kepegawaian akan dilakukan dengan baik dan berkualitas, memudahkan akses dan pemanfaatan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang kepegawaian.



Grafik 2.4.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022



Pada akhir tahun 2021, total PNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10,510 orang. Dalam kategori jabatan, mayoritas PNS berada dalam jabatan Fungsional Tertentu, sebanyak 4,771 orang, diikuti oleh jabatan Fungsional Umum dengan 4,720 orang. Jabatan struktural memiliki 1,019 pegawai, sementara Eselon IV, Eselon III, Eselon II, dan Eselon I memiliki masing-masing 725, 246, 47, dan 1 pegawai.

Namun, pada akhir tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam komposisi PNS. Total jumlah PNS berkurang menjadi 10,318 orang. Peningkatan signifikan terjadi pada jabatan Fungsional Tertentu, dengan 5,916 orang, sementara jabatan Fungsional Umum mengalami penurunan drastis menjadi 3,820 orang. Jabatan struktural juga mengalami penurunan yang cukup besar, menjadi 582 pegawai. Begitu juga dengan jabatan Eselon IV dan Eselon III yang masing-masing mengalami penurunan menjadi 289 dan 242 pegawai. Sedangkan jabatan Eselon II dan Eselon I mengalami peningkatan sedikit, dengan masing-masing 50 dan 1 pegawai. Perubahan dalam komposisi PNS ini mencerminkan restrukturisasi organisasi atau perubahan kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022.

Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022

Kabupaten/Kota	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	2 275	2 071	4 346	2 166	2 084	4 250
2. Kutai Barat	1 853	1 763	3 616	1 750	1 832	3 582
3. Kutai Kartanegara	6 576	6 313	12 889	6 266	6 246	12 512
4. Kutai Timur	2 858	3 119	5 977	3 007	3 723	6 730
5. Berau	2 596	2 231	4 827	2 540	2 361	4 901
6. Penajam Paser Utara	1 567	1 865	3 432	1 583	1 979	3 562
7. Mahakam Ulu	588	519	1 107	594	546	1 140
Kota						
1. Balikpapan	1 873	2 762	4 635	1 800	2 744	4 544
2. Samarinda	1 267	2 933	4 200	2 895	3 952	6 847
3. Bontang	1 215	1 564	2 779	1 221	1 626	2 847
Provinsi						
Kalimantan Timur	5 514	4 996	10 510	5 341	4 977	10 318
Jumlah	28 182	30 136	58 318	29 163	32 070	61 233

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022

Jabatan	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu	2 069	2 702	4 771	2 607	3 309	5 916
Fungsional Umum	2 795	1 925	4 720	2 355	1 465	3 820
Struktural	650	369	1 019	378	204	582
Eselon V	-	-	-	-	-	-
Eselon IV	446	279	725	186	103	289
Eselon III	165	81	246	154	88	242
Eselon II	38	9	47	38	12	50
Eselon I	1	-	1	-	1	1
Jumlah	5 514	4 996	10 510	5 340	4 978	10 318

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022

Tingkat Pendidikan	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sampai dengan SD	82	18	100	67	13	80
SMP/Sederajat	135	30	165	114	24	138
SMA/Sederajat	1 276	562	1 838	1 193	522	1 715
Diploma I, II/ Akta I	27	25	52	28	22	50
Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	398	609	1 007	487	666	1 153
Tingkat Sarjana/Doktor	3 596	3 752	7 348	3 453	3 729	7 182
Jumlah/Total	5 514	4 996	10 51	5 342	4 976	10 318

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022

Pangkat/Golongan/ Ruang	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-	1	-	1
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	18	-	18	9	-	9
3. I/C (Juru)	27	1	28	14	-	14
4. I/D (Juru Tingkat I)	80	15	95	84	14	98
Golongan I	125	16	141	108	14	122
5. II/A (Pengatur Muda)	71	32	103	51	16	67
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	231	61	292	202	58	260
7. II/C (Pengatur)	274	139	413	275	207	482
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	562	298	860	675	334	1009
Golongan II	1 138	530	1 668	1 203	615	1 818
9. III/A (Penata Muda)	560	588	1 148	503	546	1 049
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	968	1 026	1 994	885	935	1 820
11. III/C (Penata)	516	756	1 272	522	743	1 265
12. III/D (Penata Tingkat I)	912	933	1 845	887	994	1 881
Golongan III	2 956	3 303	6 259	2 797	3 218	6 015
13. IV/A (Pembina)	845	744	1 589	777	704	1 481
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	378	364	742	376	369	745
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	45	33	78	59	51	110
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	24	4	28	18	4	22
17. IV/E (Pembina Utama)	3	2	5	3	2	5
Golongan IV	1 295	1 147	2 442	1 233	1 113	2 346
Jumlah/Total	5 514	4 996	10 510	5 341	4 977	10 318

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2021 dan Desember 2022

Dinas/Instansi Pemerintahan	2021			2022		
	Laki-laki	Perem- puan	Jumlah	Laki-laki	Perem- puan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kantor Gubernur	1	-	1	2	-	2
Sekretariat Daerah	4	1	5	2	2	4
Biro Administrasi Pembangunan	36	15	51	14	9	23
Biro Administrasi Pimpinan	27	12	39	23	11	34
Biro Hukum	10	9	19	11	8	19
Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	2	-	2	-	-	-
Biro Kesejahteraan Rakyat	15	7	22	14	5	19
Biro Organisasi	15	9	24	16	9	25
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	10	30	18	12	30
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	16	6	22	37	10	47
Biro Perekonomian	18	8	26	18	8	26
Biro Umum	83	27	110	77	27	104
Inspektorat	51	28	79	55	28	83
Badan Kepegawaian Daerah	32	36	68	30	38	68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	12	40	26	14	40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	6	40	32	5	37
Badan Pendapatan Daerah	124	77	201	187	122	309
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35	10	45	32	10	42
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54	27	81	66	43	109
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37	22	59	35	22	57
Badan Penghubung Jakarta	13	11	24	12	10	22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	58	30	88	57	29	86
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59	17	76	58	15	73
Dinas Kehutanan	480	125	605	436	117	553
Dinas Kelautan dan Perikanan	81	42	123	79	39	118
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	21	37	20	24	44
Dinas Kesehatan	102	89	191	96	83	179

Dinas Komunikasi dan Informatika	35	17	52	36	16	52
Dinas Lingkungan Hidup	36	23	59	34	22	56
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	143	90	233	132	89	221
Dinas Pariwisata	29	15	44	26	14	40
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perum Rakyat	257	85	342	236	82	318
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	19	20	39	16	21	37
Dinas Pemuda dan Olahraga	62	27	89	62	27	89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	16	37	19	17	36
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 281	2 737	5 018	2 162	2 658	4 82
Dinas Perhubungan	69	16	85	61	20	81
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47	30	77	42	27	69
Dinas Perkebunan	42	34	76	45	32	77
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44	39	83	42	34	76
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	45	43	88	42	42	84
Dinas Sosial	116	54	170	112	49	161
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106	52	158	95	50	145
RSJD Atma Husada Mahakam	65	102	167	65	98	163
RSUD Abdul Wahab Sjahrane	300	557	857	315	590	905
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	221	364	585	220	374	594
Satuan Polisi Pamong Praja	68	2	70	69	2	71
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	57	16	73	56	14	70
Jumlah/Total	5 514	4 996	10 51	5 34	4 978	10 318

Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022

Kabupaten/Kota	2022				Jumlah
	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Paser	30	749	2 401	107	4 25
2. Kutai Barat	35	946	2 081	520	3 582
3. Kutai Kartanegara	97	3 805	6 165	2 445	12 512
4. Kutai Timur	53	1 129	4 855	693	6 73
5. Berau	67	1 064	3 191	579	4 901
6. Penajam Paser Utara	13	660	2 279	610	3 562
7. Mahakam Ulu	1	294	739	106	1 14
Kota					
1. Balikpapan	54	887	2 68	923	4 544
2. Samarinda	48	1 356	3 779	1 662	6 845
3. Bontang	25	548	1 872	402	2 847
Provinsi					
Kalimantan Timur	122	1 818	6 015	2 363	10 318
Jumlah	545	13 256	36 057	11 373	61 231

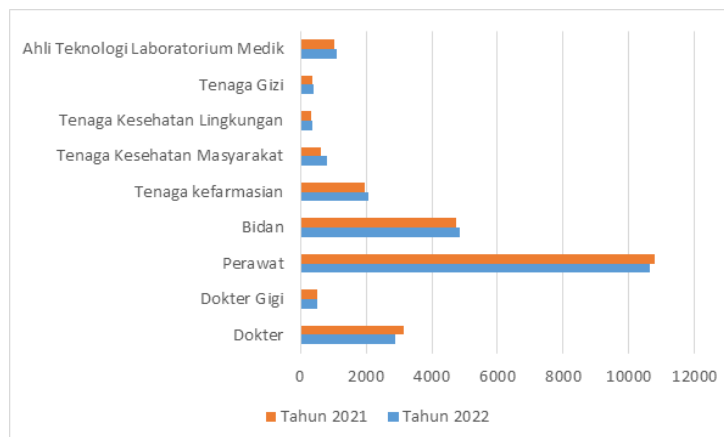
Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel ini menggambarkan distribusi jumlah pegawai dalam berbagai golongan di Kabupaten/Kota dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022. Dari data tersebut, terlihat variasi yang menarik antara daerah-daerah. Jumlah pegawai tertinggi terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total 12,512 pegawai, sementara Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah pegawai terendah dengan 1,140 pegawai. Secara umum, golongan III memiliki jumlah pegawai paling besar di hampir semua daerah, menunjukkan peran penting pegawai di kisaran tengah golongan. Golongan IV juga memiliki jumlah pegawai yang signifikan, menandakan peran kunci mereka dalam posisi dengan tanggung jawab lebih tinggi. Pada tingkat kota, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki jumlah pegawai yang lebih tinggi daripada kebanyakan Kabupaten lainnya, mencerminkan peran kota-kota tersebut dalam pelayanan dan administrasi yang lebih besar. Dalam skala provinsi, terdapat total 10,318 pegawai, memberikan gambaran tentang kontribusi administrasi pemerintahan provinsi dalam mendukung pelayanan dan fungsi administratif di seluruh wilayah. Terlihat pula tren peningkatan jumlah pegawai seiring naiknya golongan, yang mungkin mencerminkan peningkatan kualifikasi pendidikan dan pengalaman dalam menduduki posisi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, total pegawai di semua daerah dan kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun tersebut mencapai 61,231 pegawai, memberikan pemahaman tentang ukuran dan kompleksitas birokrasi di provinsi ini.

2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Data dari Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat dan upaya pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan di wilayah ini. Data ini menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk mengukur capaian indikator kesehatan, seperti angka kesakitan, angka kematian, cakupan imunisasi, akses terhadap layanan kesehatan, serta upaya penanggulangan penyakit endemik. Melalui data ini, dapat kita ketahui bagaimana berbagai program kesehatan telah diimplementasikan dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dengan menggali lebih dalam dalam buku statistik sektoral ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan sektor kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022



Pada tahun 2021 hingga tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut mencakup sejumlah kategori tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di provinsi ini.

Pada tahun 2021, terdapat 3133 dokter yang melayani warga Kalimantan Timur, sementara pada tahun 2022, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 2882 dokter. Begitu pula dengan dokter gigi, di mana pada tahun 2021 ada 508 dokter gigi yang bertugas, dan pada tahun 2022 angkanya menurun menjadi 497 dokter gigi. Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah dokter dan dokter gigi, peran perawat sangat vital dalam sistem perawatan kesehatan. Pada tahun 2021, terdapat 10789 perawat yang berdedikasi dalam memberikan perawatan kepada masyarakat, dan angka ini meningkat menjadi 10650 perawat pada tahun 2022.



Begitu pula dengan bidan, jumlah mereka juga mengalami peningkatan dari 4737 bidan pada tahun 2021 menjadi 4861 bidan pada tahun 2022. Selain itu, tenaga kefarmasian juga menjadi bagian integral dari sistem kesehatan. Pada tahun 2021, terdapat 1976 tenaga kefarmasian, yang kemudian meningkat menjadi 2052 pada tahun 2022.

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam pendekatan preventif dalam kesehatan. Pada tahun 2021, terdapat 631 tenaga kesehatan masyarakat, dan pada tahun 2022, angka ini turun menjadi 796. Sementara itu, tenaga kesehatan lingkungan yang berfokus pada aspek lingkungan dalam kesehatan masyarakat, mengalami peningkatan dari 343 pada tahun 2021 menjadi 346 pada tahun 2022.

Selanjutnya, tenaga gizi yang berperan dalam pemantauan gizi masyarakat, mengalami peningkatan dari 379 pada tahun 2021 menjadi 413 pada tahun 2022. Terakhir, ahli teknologi laboratorium medik juga memiliki peran kunci dalam diagnosis penyakit, dan pada tahun 2021 terdapat 1040 ahli teknologi laboratorium medik, yang meningkat menjadi 1088 pada tahun 2022.

Perubahan dalam jumlah tenaga kesehatan ini mencerminkan dinamika sistem kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selama dua tahun terakhir, dengan peningkatan dan penurunan yang mencerminkan berbagai faktor termasuk perkembangan masyarakat dan sistem perawatan kesehatan yang terus berubah.

Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Paser	126	34	602	517	117	41	31	45	72
2. Kutai Barat	106	14	726	417	120	74	21	32	75
3. Kutai Kartanegara	266	40	1 321	747	241	163	45	52	124
4. Kutai Timur	238	39	1 160	755	163	71	28	36	76
5. Berau	151	34	771	399	157	113	41	42	95
6. Penajam Paser Utara	79	19	381	305	122	10	20	21	35
7. Mahakam Ulu	19	4	215	123	27	33	12	14	20
Kota									
1. Balikpapan	838	153	2 244	695	507	70	54	71	287
2. Samarinda	831	116	2 567	677	413	179	76	77	213
3. Bontang	228	44	663	226	185	42	18	23	91
Kalimantan Timur	2 882	497	10 650	4 861	2 052	796	346	413	1 088
Tahun 2021	3 133	508	10 789	4 737	1 976	631	343	379	1 040

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Sarana Pelayanan Kesehatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)
Puskesmas	-	537	215
Rumah Sakit	1214	987	186
Faskes Lainnya	74	894	191
Kalimantan Timur	1288	2418	592

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Angka Penemuan TBC	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Jumlah Kasus Baru AIDS	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	51,70%	81,90%	15	1,04	2,21	45,10
2. Kutai Barat	66,40%	88,10%	9	1,33	0,49	268,90
3. Kutai Kartanegara	32,14%	89,70%	161	-	0,12	111,80
4. Kutai Timur	43,5%	80,4%	31	0,25	1,29	74,60
5. Berau	32,92%	90,8%	0	-	1,13	231,10
6. Penajam Paser Utara	31,04%	86,1%	13	3,75	6,44	47,20
7. Mahakam Ulu	66,56%	90%	0	-	0,52	387,20
Kota						
1. Balikpapan	52,81%	82,50%	73	0,93	0,15	174,50
2. Samarinda	46,88%	74,4%	113	0,58	0,14	203,10
3. Bontang	72,15%	80,3%	38	3,24	1,16	316,00
Kalimantan Timur	46%	81,7%	453	0,45	0,92	158,20

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota (1)	Demam Berdarah		Diphtheria		Diare	
	Penderita (2)	Kematian (3)	Penderita (4)	Kematian (5)	Penderita (6)	Kematian (7)
Kabupaten/Regency						
1. Paser	129	0			5 244	6
2. Kutai Barat	398	6			1 289	2
3. Kutai Kartanegara	843	5			5 74	3
4. Kutai Timur	313	2	1		4 657	11
5. Berau	587	2			1 473	0
6. Penajam Paser Utara	76	2			334	2
7. Mahakam Ulu	140	3			122	0
Kota/Municipality						
1. Balikpapan	1 127	7	5		8 498	0
2. Samarinda	1 688	9	1		4 82	0
3. Bontang	286	3	5		2 377	0
Kalimantan Timur	5 587	39	12	0	34 554	24

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.5 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota (1)	Rumah Sakit Umum (2)	Rumah Sakit Khusus (3)	Puskesmas Rawat Inap (4)	Puskesmas Non Rawat Inap (5)	Klinik Pratama (6)	Posyandu (7)
Kabupaten/Regency						
1. Paser	2	0	9	10	20	371
2. Kutai Barat	3	0	14	5	13	239
3. Kutai Kartanegara	3	0	23	9	48	792
4. Kutai Timur	6	2	18	3	63	338
5. Berau	2	0	10	11	28	269
6. Penajam Paser Utara	2	0	9	2	15	276
7. Mahakam Ulu	2	0	6	0	0	55
Kota/Municipality						
1. Balikpapan	11	4	7	20	110	1 589
2. Samarinda	11	6	6	20	112	677
3. Bontang	5	0	0	6	14	120
Kalimantan Timur	47	12	102	86	423	4 726

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.6 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi Kalimantan Timur, 2017–2022

Tahun	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi (Fe)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	79 803	70 351	6 801	68 929
2019	79 458	69 746	6 766	63 038
2020	73 112	63 89	6 29	63 399
2021	67 255	59 881	5 996	54 073
2022	101 72	90 818	5 062	52 093

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil	Jumlah Persalinan	Persalinan di Fasilitas Kesehatan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	5 234	5 052	95,78
2. Kutai Barat	2 517	2 402	95,15
3. Kutai Kartanegara	13 723	13 101	96,27
4. Kutai Timur	8 255	7 879	96,33
5. Berau	4 689	4 475	97,77
6. Penajam Paser Utara	2 841	2 712	98,27
7. Mahakam Ulu	604	577	95,19
Kota			
1. Balikpapan	10 974	10 475	99,87
2. Samarinda	14 209	13 565	99,9
3. Bontang	3 522	3 362	99,94
Kalimantan Timur	66 568	63 6	97,93

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Gizi Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Paser	5 013	368	1 266
2. Kutai Barat	2 133	229	445
3. Kutai Kartanegara	13 076	1 109	1 482
4. Kutai Timur	4 747	364	779
5. Berau	4 607	254	1 098
6. Penajam Paser Utara	3 591	307	508
7. Mahakam Ulu	505	34	29
Kota/Municipality			
1. Balikpapan	9 594	425	1 757
2. Samarinda	12 429	498	1 584
3. Bontang	3 406	289	418
Kalimantan Timur	59 101	3 877	9 366

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.8 Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/Regency		
1. Paser	0	55
2. Kutai Barat	0	39
3. Kutai Kartanegara	0	136
4. Kutai Timur	1	66
5. Berau	0	78
6. Penajam Paser Utara	0	57
7. Mahakam Ulu	0	9
Kota/Municipality		
1. Balikpapan	18	146
2. Samarinda	33	360
3. Bontang	0	25
Kalimantan Timur	52	971

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

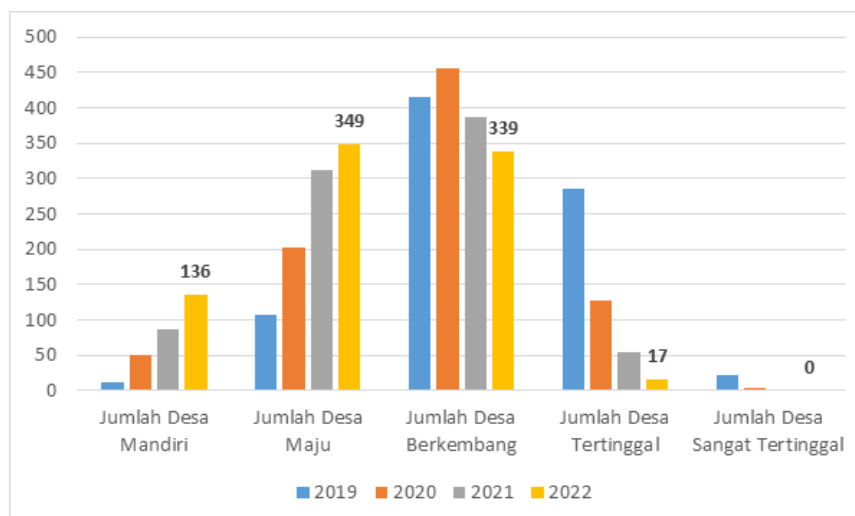
2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Grafik 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022



Grafik diatas mencerminkan perkembangan status desa di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019 hingga 2022. Terdapat lima kategori status desa yang diamati, yaitu Jumlah Desa Mandiri, Jumlah Desa Maju, Jumlah Desa Berkembang, Jumlah Desa Tertinggal, dan Jumlah Desa Sangat Tertinggal. Selama empat tahun tersebut, terlihat tren positif dengan peningkatan jumlah desa yang masuk dalam kategori Mandiri dan Maju. Sementara itu, desa-desa yang tergolong Tertinggal dan Sangat Tertinggal mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan

pembangunan di berbagai wilayah provinsi ini.

Data ini mencerminkan progres pembangunan desa dan memberikan informasi penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan program dan alokasi sumber daya untuk memperbaiki kondisi desa yang masih tertinggal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang status desa ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat terus berlanjut, dan kesenjangan antar desa dapat terus berkurang seiring berjalannya waktu.



Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Desa	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Desa Mandiri	11	51	87	136
Jumlah Desa Maju	107	202	312	349
Jumlah Desa Berkembang	415	456	387	339
Jumlah Desa Tertinggal	285	128	54	17
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	23	4	1	0

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.6.2 Rekapitulasi Salur DD Kaltim Desember 2022

KABUPATEN	JML KEC.	JML DESA	PAGU DD	PENYALURAN DD	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KAB. KUTAI KARTANEGARA	16	193	176 903 354 000	176 844 267 000	99,97%
KAB. PENAJAM PASER UTARA	4	30	27 029 362 000	25 089 828 120	92,82%
KABUPATEN BERAU	12	100	87 834 603 000	87 182 101 040	99,26%
KABUPATEN KUTAI BARAT	16	190	157 191 564 000	155 041 387 600	98,63%
KABUPATEN KUTAI TIMUR	18	139	144 755 925 000	137 484 051 467	94,98%
KABUPATEN MAHAKAM ULU	5	50	51 323 109 000	45 691 697 077	89,03%
KABUPATEN PASER	10	139	115 261 108 000	112 336 643 032	97,46%

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan olahraga. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat.



Tabel 2.7.1 Data Cabang Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Lembaga Cabor Bela Diri	11	11	11	15	15
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Bela Diri	9	9	9	9	9
Jumlah Atlet Cabor Bela Diri	260	280	289	310	489
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Bela Diri	15	15	15	15	56
Jumlah Lembaga Cabor Terukur	19	19	19	14	20
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Terukur	13	13	13	13	13
Jumlah Atlet Cabor Terukur	397	397	401	437	536
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Terukur	24	24	24	24	63
Jumlah Lembaga Cabor Permainan	14	14	14	17	17
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Permainan	3	3	3	3	15
Jumlah Atlet Cabor Permainan	156	156	215	312	724
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Permainan	5	5	5	5	136
Jumlah Lembaga Cabor Beregu	11	11	11	11	11
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Beregu	6	6	6	7	7
Jumlah Atlet Cabor Beregu	260	260	315	330	1080
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Beregu	6	6	6	6	146

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.7.2 Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga, kegiatan Olahraga, kegiatan Kepemudaan dan Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022

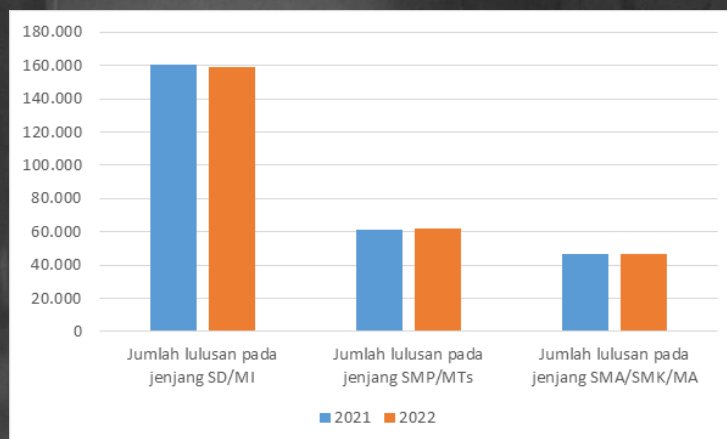
Tahun	Jumlah Lapangan/ Gedung Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	97	152	42	7
2017	101	152	42	7
2018	102	152	42	7
2019	102	152	42	7
2020	102	62	54	7
2021	102	67	57	7
2022	205	61	23	7

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Penyelenggaraan pendidikan menjadi penting dan strategis dalam menentukan arah masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu sejalandengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan disegala bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan, dan terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Grafik 2.8.1 Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022



Grafik diatas menggambarkan jumlah lulusan pada berbagai jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 160,769 siswa yang lulus dari jenjang SD/MI di Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2022, jumlah ini sedikit berkurang menjadi 159,088 siswa. Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah lulusan pada tahun 2021 mencapai 61,086 siswa, dan tahun berikutnya, pada tahun 2022, terdapat peningkatan kecil menjadi 61,704 siswa. Kemudian, untuk jenjang SMA/SMK/MA, pada tahun 2021 terdapat 46,605 siswa yang lulus, dan pada tahun 2022, jumlah lulusan sedikit menurun menjadi 46,428 siswa.

Grafik ini memberikan gambaran tentang tren jumlah lulusan pada berbagai jenjang pendidikan di Kalimantan Timur selama dua tahun terakhir. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam jumlah lulusan, data ini penting dalam perencanaan pendidikan dan tenaga kerja di provinsi tersebut.



Tabel 2.8.1 Indikator RPJMD Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

Indikator RPJMD	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Persentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	88	81
2. Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi	96	93
3. Persentase Sekolah Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Menengah dan Khusus	86	87
4. Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS Yang Berprestasi	48 504	83 708
5. Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin Penerima Beasiswa Yang Tidak Putus Sekolah	3 369	3 711
6. Jumlah Sekolah Yang Mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama (SMA/SMK/SLB)	150	215
7. Jumlah SMK Yang Bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	70	75
8. Persentase Sekolah Yang Telah Menggunakan Sistem Pendidikan Jarak Jauh	85	93

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100	100
1) Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	160 769	159 088
2) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	160 769	159 088
3) Jumlah Siswa SD/MI Yang Mengikuti Ujian	160 769	159 088
2. Persentase Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100
1) Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	61 086	61 704
2) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	61 086	61 704
3) Jumlah Siswa SMP/MTs Yang Mengikuti Ujian	61 086	61 704
3. Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100
1) Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	46 605	46 428
2) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	46 605	46 428
3) Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Yang Mengikuti Ujian	46 605	46 428

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

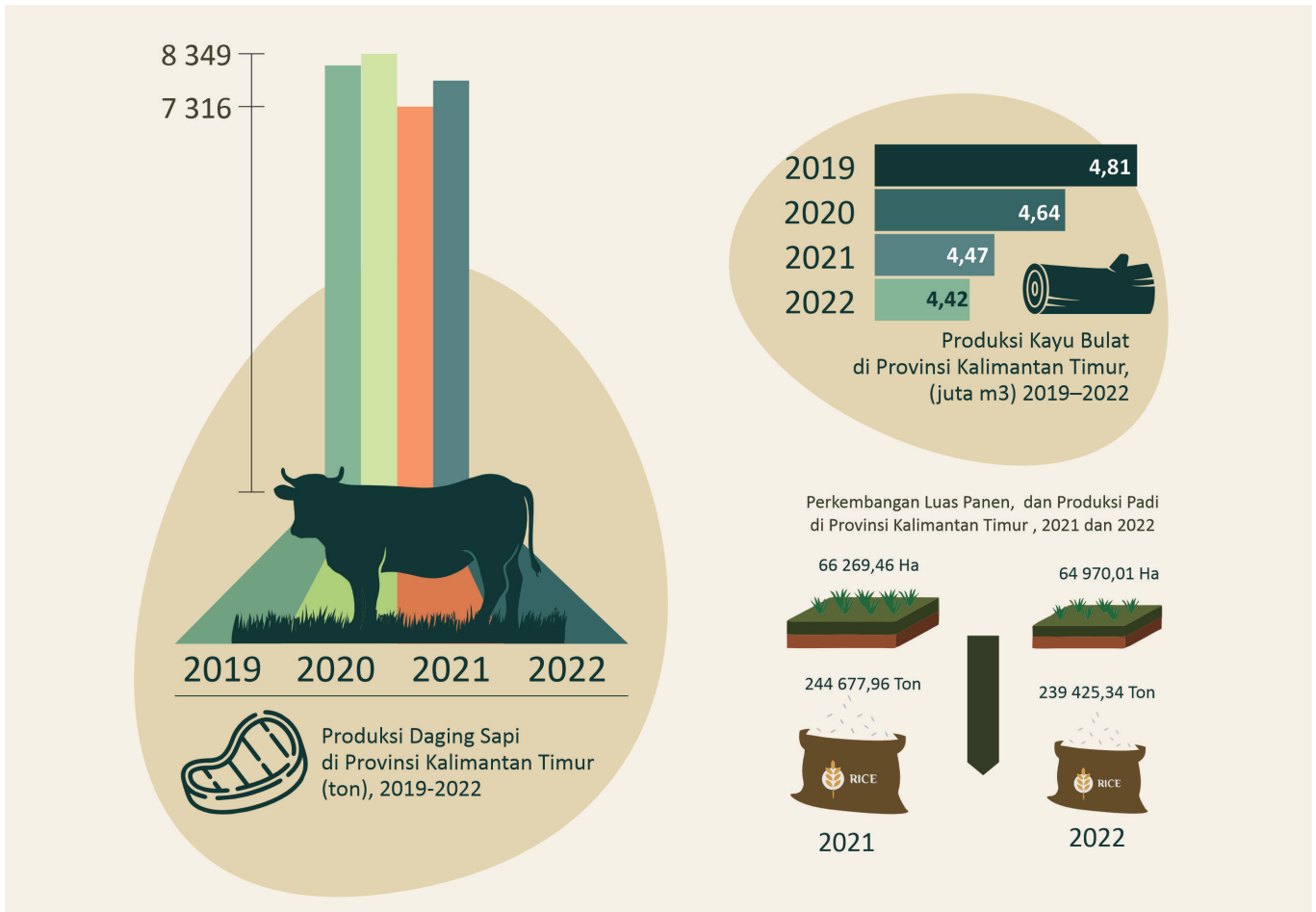
Kebudayaan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Jumlah Group kesenian	861	865
- Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	2.31	2.35
2. Jumlah Gedung kesenian	17	17
- Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0,05	0,09
3. Museum dan Pusat Kebudayaan	14	14
4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	60	60
5. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	5	5
6. Benda cagar budaya yang dilestarikan	30	30
7. Situs cagar budaya yang dilestarikan	242	242
8. Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	22	22
9. Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	63	63
10. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	467	467
11. Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal		
12. Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	239	313
Jumlah Monumen Sejarah	5	5
Upacara Adat	251	254
Upacara Tradisi	349	353
Jenis Busana Tradisional	6	6
Lembaga Budaya	518	552

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

x x x x x x
x x x x x x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



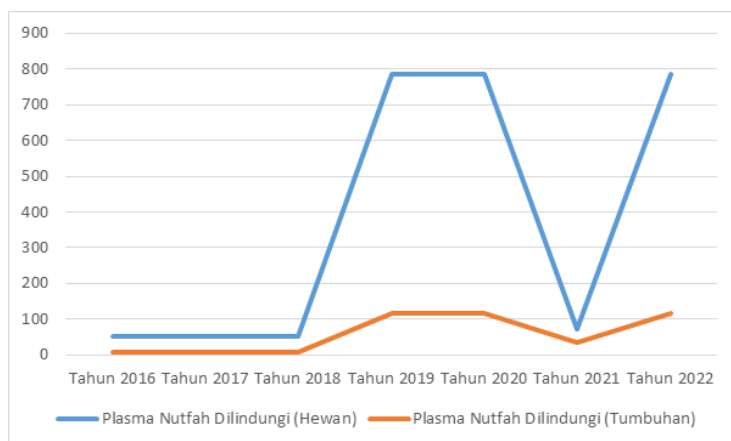
BAB III

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Grafik diatas memperlihatkan perkembangan jumlah plasma nutfah yang dilindungi, baik untuk hewan maupun tumbuhan, selama periode tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2016, terdapat 51 plasma nutfah hewan dan 8 plasma nutfah tumbuhan yang dilindungi di Kalimantan Timur. Jumlah ini tetap konstan pada tahun 2017 dan 2018.

Namun, pada tahun 2019, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah plasma nutfah yang dilindungi. Jumlah plasma nutfah hewan melonjak menjadi 787, sementara jumlah plasma nutfah tumbuhan juga meningkat menjadi 116. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2020, dengan jumlah plasma nutfah yang tetap tinggi, yaitu 787 plasma nutfah hewan dan 116 plasma nutfah tumbuhan.

Pada tahun 2021, terdapat sedikit penurunan jumlah plasma nutfah hewan menjadi 71, tetapi jumlah plasma nutfah tumbuhan meningkat menjadi 36. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah plasma nutfah kembali mencapai tingkat yang tinggi, dengan 787 plasma nutfah hewan dan 116 plasma nutfah tumbuhan yang dilindungi.

Grafik ini mencerminkan upaya pelestarian dan perlindungan plasma nutfah di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan pada tahun 2021 untuk plasma nutfah hewan mungkin mencerminkan perubahan dalam fokus perlindungan plasma nutfah tersebut.

Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022

Tahun	Plasma Nutfah Dilindungi (Hewan)	Plasma Nutfah Dilindungi (Tumbuhan)
(1)	(2)	(3)
Tahun 2016	51	8
Tahun 2017	51	8
Tahun 2018	51	8
Tahun 2019	787	116
Tahun 2020	787	116
Tahun 2021	71	36
Tahun 2022	787	116

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.1.2 Data Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup, 2019-2022

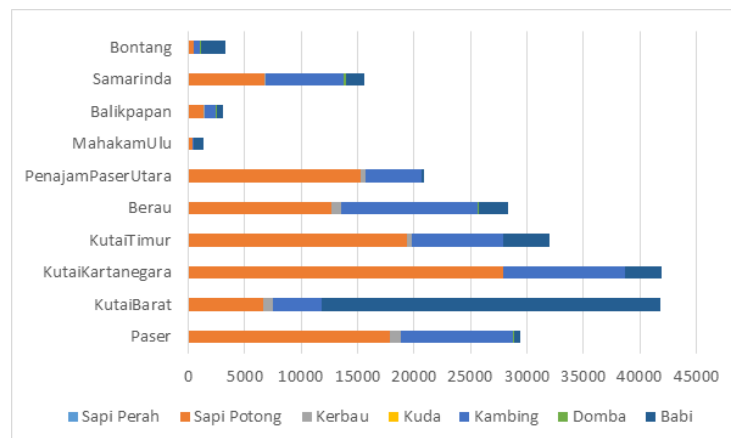
Uraian	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Presentase Sampah Yang Dikelola	58,5	77,65	74	87,02
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Yang Disusun	5	9	2	3
Persentase Pelayanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH	100	100	180	77,27
Persentase Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100	100	100	100
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	50	35	66,67	97,56
Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	4	2	121	105
Luas Kawasan lindung yang dilindungi didalam kawasan perijinan	-	233 485,723	245 314,793	1 844,969
Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	100	66,67	97,56
Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	592	679	825	755
Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	15	12,21	7,55	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, secara teknis, dinas ini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal pembangunan peternakan. Pendirian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengikuti Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, tugas pokok Dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian, khususnya sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalankan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2022



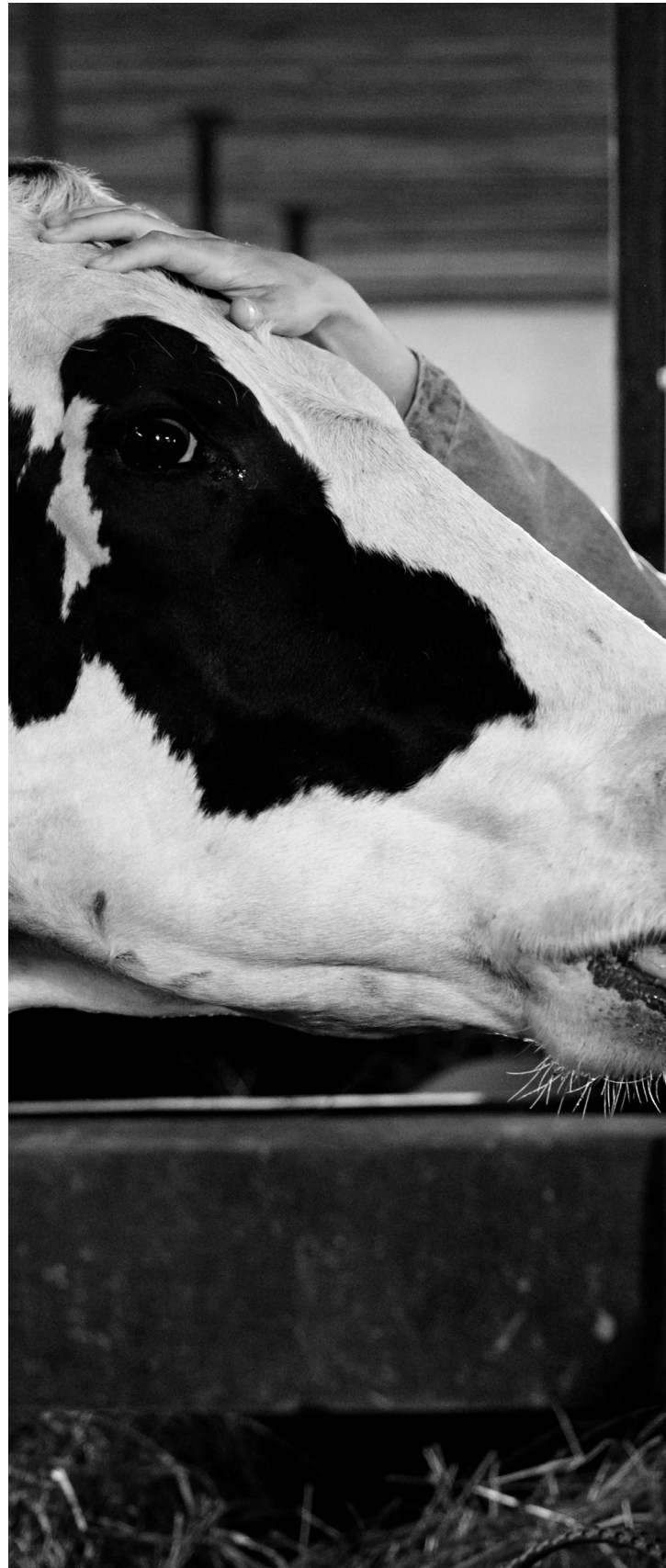
Dari grafik diatas memberikan gambaran tentang populasi ternak potong di berbagai wilayah di provinsi ini. Data ini sangat penting dalam mengukur ketersediaan sumber daya ternak dan potensi sektor peternakan di setiap wilayah.

Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah ternak potong sebanyak 108.613 ekor sapi potong, 6.490 ekor kerbau, 95 ekor kuda, 58.552 ekor kambing, 642 ekor domba, dan 45.839 ekor babi. Dalam kategori sapi perah, tercatat 78 ekor yang dimiliki oleh provinsi ini.

Di tingkat kabupaten/kota, terdapat variasi signifikan dalam jumlah ternak potong. Kabupaten Kutai Timur memiliki populasi sapi perah sebanyak 50 ekor, sapi potong 19.286 ekor, kerbau 479 ekor, kuda 6 ekor, kambing 8.096 ekor, dan babi 4.089 ekor. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sapi potong sebanyak 27.868 ekor, kerbau 2.755 ekor, kambing 10.807 ekor, dan babi 3.261 ekor.

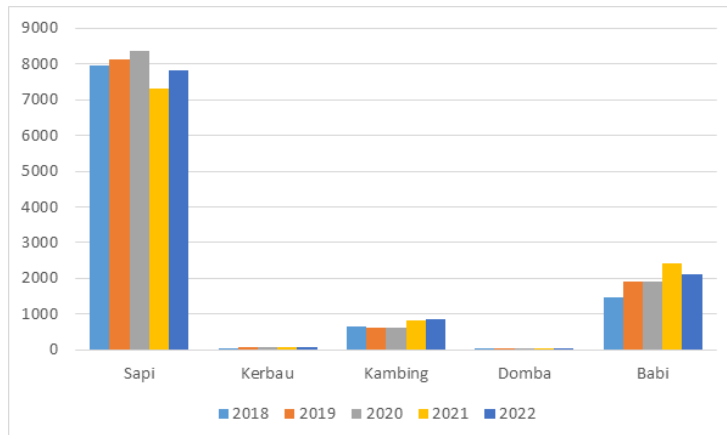
Kabupaten Paser memiliki populasi sapi potong sebanyak 17.884 ekor, kerbau 896 ekor, kambing 9.942 ekor, domba 153 ekor, dan babi 564 ekor. Kabupaten Berau memiliki sapi potong sebanyak 12.681 ekor, kerbau 854 ekor, kuda 7 ekor, kambing 12.091 ekor, domba 80 ekor, dan babi 2.569 ekor.

Kota Samarinda memiliki populasi sapi perah sebanyak 16 ekor, sapi potong 6.722 ekor, kerbau 116 ekor, kuda 10 ekor, kambing 6.850 ekor, domba 261 ekor, dan babi 1.653 ekor. Sedangkan Kota Balikpapan memiliki sapi potong sebanyak 1.343 ekor, kerbau 70 ekor, kuda 70 ekor, kambing 907 ekor, domba 102 ekor, dan babi 534 ekor.





Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2018-2022



Secara keseluruhan, produksi daging sapi di Kalimantan Timur mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, produksi mencapai 7.943,99 ton, dan meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 7.316,54 ton, sebelum meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 7.836,42 ton.

Produksi daging kerbau juga mengalami variasi selama periode ini. Pada tahun 2018, produksi hanya sebesar 46,99 ton, kemudian meningkat pada tahun 2019 dan 2020, namun kembali turun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, produksi daging kerbau meningkat signifikan menjadi 83,7 ton.

Produksi daging kambing cenderung stabil, dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2018, produksi mencapai 665,06 ton, sedangkan pada tahun 2022, produksi meningkat menjadi 862,33 ton.

Produksi daging domba juga mengalami fluktuasi, dengan tingkat produksi yang rendah pada tahun 2018 dan 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan 2021, sebelum kembali turun pada tahun 2022.

Produksi daging babi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, produksi mencapai 1.473,75 ton, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan produksi sebesar 2.423,35 ton, sebelum sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 2.099,67 ton.



Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Sapi Perah		Sapi Potong	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	-	-	23 317	17 884
2. Kutai Barat	-	-	7 106	6 660
3. Kutai Kartanegara	-	-	30 495	27 868
4. Kutai Timur	58	50	19 486	19 286
5. Berau	-	-	14 293	12 681
6. Penajam Paser Utara	2	2	16 626	15 303
7. Mahakam Ulu	-	-	409	394
Kota				
1. Balikpapan	-	-	1 419	1 343
2. Samarinda	16	16	6 659	6 722
3. Bontang	-	-	1 480	472
Kalimantan Timur	76	78	121 290	108 613

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kerbau		Kuda	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	949	896	-	-
2. Kutai Barat	939	879	-	-
3. Kutai Kartanegara	2 738	2 755	-	-
4. Kutai Timur	541	479	49	6
5. Berau	768	854	6	7
6. Penajam Paser Utara	442	402	-	-
7. Mahakam Ulu	-	-	-	-
Kota				
1. Balikpapan	46	70	70	70
2. Samarinda	94	116	12	10
3. Bontang	22	39	6	2
Kalimantan Timur	6 539	6 734	143	146

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kambing		Domba		Babi	
	2021	2022x	2021	2022x	2021	2022x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	13 787	9 942	190	153	3 391	564
2. Kutai Barat	4 552	4 281	4	-	32 888	29 990
3. Kutai Kartanegara	12 439	10 807	-	-	4 539	3 261
4. Kutai Timur	8 625	8 096	-	-	11 640	4 089
5. Berau	14 304	12 091	140	80	2 742	2 569
6. Penajam Paser Utara	5 028	4 945	-	-	285	217
7. Mahakam Ulu	93	75	-	-	1 036	844
Kota						
1. Balikpapan	911	907	109	102	790	534
2. Samarinda	7 066	6 850	214	261	12 802	1 653
3. Bontang	2 192	558	37	46	6 179	2 118
Kalimantan Timur	68 997	58 552	694	642	76 292	45 839

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung		Itik dan Itik Manila	
	2021	2022x	2021	2022x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	1 906 183	1 963 368	43 164	44 459
2. Kutai Barat	226 147	232 931	21 782	22 435
3. Kutai Kartanegara	377 840	389 175	65 710	67 681
4. Kutai Timur	453 662	467 272	82 883	85 370
5. Berau	251 113	258 646	32 038	32 999
6. Penajam Paser Utara	442 376	455 647	22 358	23 029
7. Mahakam Ulu	62 561	64 438	1 629	1 678
Kota				
1. Balikpapan	100 034	103 035	9 530	9 815
2. Samarinda	869 913	896 010	39 000	40 170
3. Bontang	126 147	129 931	7 347	7 567
Kalimantan Timur	4 815 976	4 960 453	325 441	335 203

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Paser	1 020,96	11,79	36,33	0,56	87,07
2. Kutai Barat	298,88	27,06	38,99	-	556,38
3. Kutai Kartanegara	870,1	4,25	89,38	-	38,33
4. Kutai Timur	766,15	11,98	54,18	-	383,78
5. Berau	705,49	10,63	93,7	0,72	263,77
6. Penajam Paser Utara	599,5	2,71	23,98	-	7,96
7. Mahakam Ulu	17,38	-	0,95	-	49,06
Kota					
1. Balikpapan	1 149,55	-	217,94	0,65	68,45
2. Samarinda	1 700,55	15,08	209,57	0,78	199,56
3. Bontang	707,86	0,19	97,31	-	445,3
Kalimantan Timur	7 836,42	83,7	862,33	2,7	2 099,67

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik dan Itik Manila
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	2 170 503,32	5 960,42	18 339,75
2. Kutai Barat	257 505,59	9 286,99	9 254,85
3. Kutai Kartanegara	430 233,33	184 744,03	27 918,83
4. Kutai Timur	516 569,20	29 265,39	48 723,95
5. Berau	285 933,15	122 614,27	13 612,50
6. Penajam Paser Utara	503 718,13	21 859,07	10 061,70
7. Mahakam Ulu	71 236,21	-	692,18
Kota			
1. Balikpapan	113 905,56	49 240,18	4 282,03
2. Samarinda	990 539,06	145 495,31	17 747,95
3. Bontang	143 639,09	-	4 000,43
Kalimantan Timur	5 483 782,64	568 465,66	154 634,17

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.7 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Itik dan Itik Manila	Sapi Perah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	1 257 537,20	356 253,17	-
2. Kutai Barat	149 192,31	179 773,27	-
3. Kutai Kartanegara	249 266,59	542 332,73	-
4. Kutai Timur	299 287,72	546 361,64	66 219,65
5. Berau	165 662,76	264 423,36	-
6. Penajam Paser Utara	291 841,90	178 805,66	2 207,32
7. Mahakam Ulu	41 272,54	13 445,93	-
Kota			
1. Balikpapan	65 993,92	76 271,57	-
2. Samarinda	573 894,41	309 877,80	17 658,57
3. Bontang	83 220,81	51 678,01	-
Kalimantan Timur	3 177 170,16	2 519 223,14	86 085,54

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

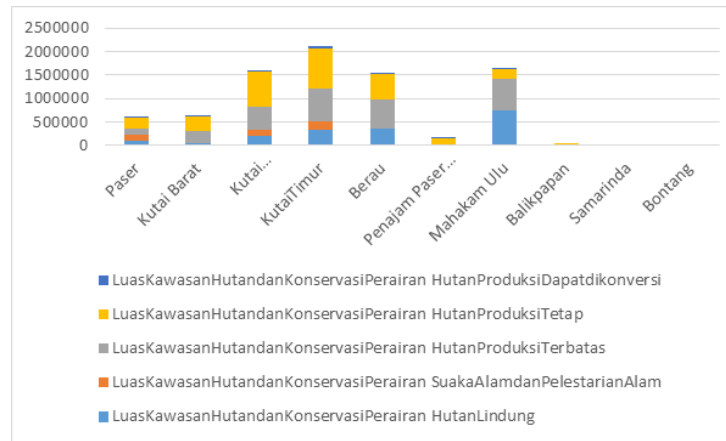
3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



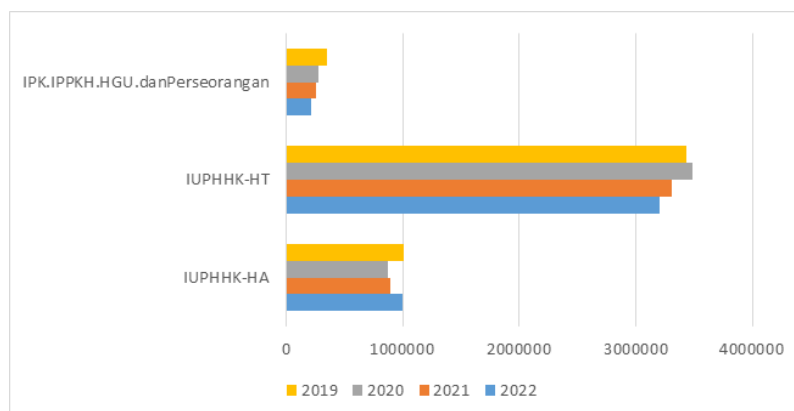
Grafik 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021



Pada tahun 2021, luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kalimantan Timur mencapai 12,77 juta hektar, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah dengan luas hutan dan perairan terbesar. Dari total ini, wilayah dengan penggunaan lahan lain memiliki luas terluas, mencapai 4,30 juta hektar, diikuti oleh hutan produksi tetap seluas 3,02 juta hektar dan hutan produksi terbatas yang mencakup 2,91 juta hektar. Dalam konteks wilayah, Kabupaten Kutai Timur juga memegang peranan sebagai kabupaten dengan luas hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas terbesar di Kalimantan Timur.

Dalam hal izin perusahaan kehutanan, terdapat dua kategori izin yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada tahun 2022, tercatat terdapat 58 perusahaan dengan izin IUPHHK-HA dan 48 perusahaan dengan izin IUPHHK-HT, dengan total luas lahan mencapai 5,89 juta hektar. Kabupaten Berau memiliki jumlah perusahaan dengan izin HA terbanyak, yaitu sebanyak 16 perusahaan, sementara Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah dengan jumlah perusahaan berizin HT terbanyak, mencapai 17 perusahaan. Dilihat dari segi luas, Kabupaten Kutai Timur kembali mendominasi sebagai wilayah dengan luas perusahaan kehutanan terluas pada tahun 2022, mencapai total 1,58 juta hektar.

Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2022



Grafik di atas menggambarkan produksi kayu bulat menurut jenis produksi di Provinsi Kalimantan Timur selama empat tahun dari 2019 hingga 2022. Produksi kayu bulat diukur dalam meter kubik (m³) dan dibagi menjadi tiga jenis produksi utama: IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Hutan), IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Hutan Tropis), dan IPK, IPPKH, HGU, dan Perseorangan (Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Guna Usaha, dan Produksi oleh Perseorangan).

Pada tahun 2019, total produksi kayu bulat di Kalimantan Timur mencapai 4.801.206 meter kubik. Jenis produksi yang paling signifikan adalah IUPHHK-HA dengan produksi sebesar 1.013.628 m³, diikuti oleh IUPHHK-HT dengan produksi sebesar 3.435.602 m³, dan jenis produksi lainnya mencapai 356.976 m³.

Selama empat tahun berikutnya, terjadi fluktuasi dalam produksi kayu bulat. Pada tahun 2020, produksi total mengalami penurunan menjadi 4.642.316 m³, dengan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT mengalami penurunan sedangkan jenis produksi lainnya mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021, produksi kembali meningkat menjadi 4.542.816 m³, terutama karena kenaikan produksi IUPHHK-HT.

Pada tahun 2022, produksi kayu bulat mencapai 7.438.076 m³, yang merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT. Jadi, dari tabel ini kita dapat melihat fluktuasi produksi kayu bulat di Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peraturan, permintaan pasar, dan kebijakan hutan.

Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan				
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Paser	115 036,80	107 318,81	145 725,82	239 248,06	9 777,45
2. Kutai Barat	56 673,65	4 785,23	247 252,30	308 081,64	11 836,76
3. Kutai Kartanegara	201 646,91	134 284,49	486 116,71	760 537,44	22 737,99
4. Kutai Timur	329 919,46	183 834,47	705 095,40	851 927,04	39 270,49
5. Berau	362 806,48	-	624 643,39	537 112,53	33 927,08
6. Penajam Paser Utara	0,59	6 965,60	28 209,77	111 006,75	90,66
7. Mahakam Ulu	757 724,90	-	668 721,25	214 686,34	2 806,05
Kota					
1. Balikpapan	15 971,40	-	-	1 617,68	-
2. Samarinda	-	-	-	544,45	-
3. Bontang	4 535,49	694,11	-	-	87,4
Kalimantan Timur	1 844 315,68	437 882,71	2 905 764,64	3 024 761,93	120 533,88

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2022

Tahun	Kayu Bulat			Jumlah Total (m3)
	IUPHHK-HA	IUPHHK-HT	IPK,IPPKH, HGU, dan Perseorangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	1 013 628	3 435 602	356 976	4 806 206
2020	877 307	3 484 923	277 086	4 639 316
2021	899 962	3 314 494	260 360	4 474 816
2022	996 736	3 206 086	216 254	4 419 076

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2022

Tahun	Kayu Olahan			
	Kayu Lapis	Veneer	Kayu Gergajian	Moulding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	371 668	10 328	84 363	6 376
2020	300 922	13 954	75 005	6 876
2021	231 841	40 641	78 127	4 074
2022	211 361	37 767	60 370	2 207

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT	
	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	4	293 920,00	6	147 336,00
2. Kutai Barat	7	299 330,00	8	166 920,00
3. Kutai Kartanegara	6	432 115,00	8	493 970,00
4. Kutai Timur	12	990 030,00	17	585 005,00
5. Berau	16	847 852,68	6	280 216,00
6. Penajam Paser Utara	-	-	3	218 514,00
7. Mahakam Ulu	12	962 999,45	-	-
Kota				
1. Balikpapan	-	-	-	-
2. Samarinda	-	-	-	-
3. Bontang	-	-	-	-
Lintas Kabupaten				
1. Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser	1	173 395,00	-	-
Kalimantan Timur	58	3 999 642,13	48	1 891 961,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.5 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT	
	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	4	293 920,00	6	147 336,00
2. Kutai Barat	7	299 330,00	8	166 920,00
3. Kutai Kartanegara	6	432 115,00	8	493 970,00
4. Kutai Timur	12	990 030,00	17	585 005,00
5. Berau	16	847 852,68	6	280 216,00
6. Penajam Paser Utara	-	-	3	218 514,00
7. Mahakam Ulu	12	962 999,45	-	-
Kota				
1. Balikpapan	-	-	-	-
2. Samarinda	-	-	-	-
3. Bontang	-	-	-	-
Lintas Kabupaten				
1. Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser	1	173 395,00	-	-
Kalimantan Timur	58	3 999 642,13	48	1 891 961,00

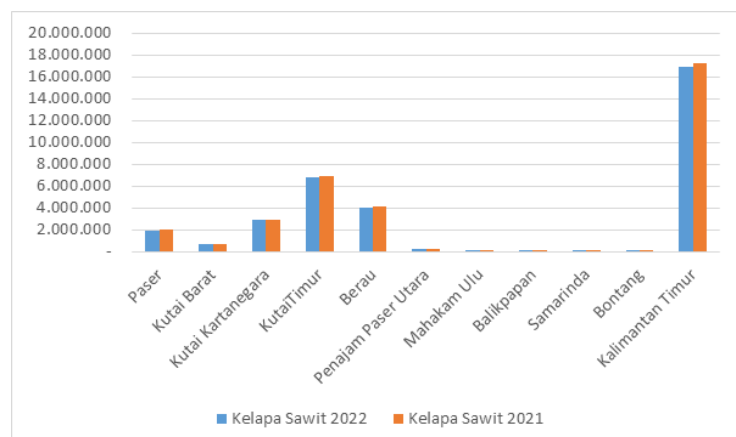
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



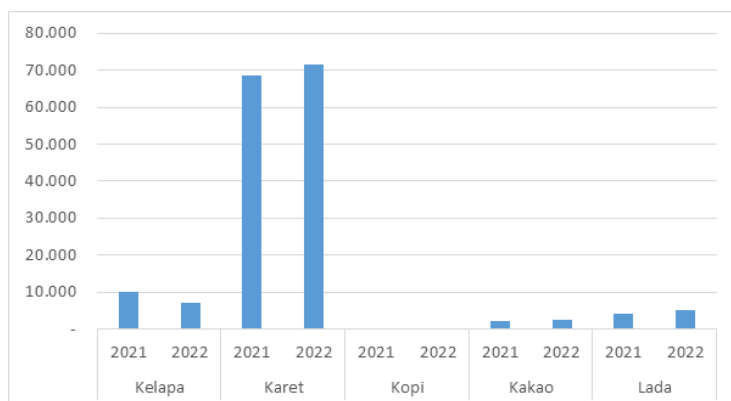
3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004.

Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022



Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022



Pada tahun 2022, kelapa sawit, sebagai komoditas unggulan dalam sektor perkebunan Kalimantan Timur, terus mendominasi produksi. Dalam catatan Dinas Perkebunan Provinsi, produksi kelapa sawit mencapai 16,94 juta ton dengan luas areal tanaman mencapai 1,41 juta hektar. Dari total produksi tersebut, sebanyak 79,26 persen berasal dari perkebunan besar swasta, 19,61 persen dari perkebunan rakyat, dan 1,13 persen dari perkebunan besar pemerintah. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 17,28 juta ton pada 2021, produksi kelapa sawit masih tetap mengambil peran utama dalam sektor ini. Kabupaten Kutai Timur memimpin dalam hal produksi kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur pada tahun 2022.

Meskipun produksi kelapa sawit mengalami penurunan, komoditas unggulan lainnya di Kalimantan Timur, yaitu karet dan lada, justru mencatatkan kenaikan produksi. Produksi karet meningkat dari 68,46 ribu ton pada 2021 menjadi 71,48 ribu ton pada 2022. Produksi lada juga mengalami peningkatan dari 4,17 ribu ton pada 2021 menjadi 5,08 ribu ton pada tahun 2022. Dalam hal produksi karet, Kabupaten Kutai Barat menempati peringkat teratas pada tahun 2022, sementara untuk produksi lada, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan produksi terbesar pada tahun yang sama.



Tabel 3.4.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	191 624	194 223	2 301	2 301
2. Kutai Barat	166 767	169 029	1 060	1 080
3. Kutai Kartanegara	220 354	223 363	7 306	7 336
4. Kutai Timur	459 541	465 775	1 286	1 286
5. Berau	266 838	270 458	2 390	2 390
6. Penajam Paser Utara	45 424	46 040	4 304	4 304
7. Mahakam Ulu	41 095	41 651	30	30
Kota				
1. Balikpapan	41	41	992	992
2. Samarinda	1 209	1 209	317	317
3. Bontang	72	72	32	32
Kalimantan Timur	1 392 965	1 411 861	20 018	20 068

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Karet		Kopi	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	11 667	12 191	408	408
2. Kutai Barat	45 249	47 055	808	808
3. Kutai Kartanegara	23 994	24 759	90	97
4. Kutai Timur	19 307	20 743	99	99
5. Berau	4 665	4 965	60	60
6. Penajam Paser Utara	6 671	6 819	14	14
7. Mahakam Ulu	1 763	1 837	-	-
Kota				
1. Balikpapan	4 480	4 534	9	9
2. Samarinda	795	836	-	-
3. Bontang	35	37	-	-
Kalimantan Timur	118 626	123 776	1 488	1 495

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kakao			
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	49	49	86	86
2. Kutai Barat	505	530	219	319
3. Kutai Kartanegara	74	104	3 394	3 394
4. Kutai Timur	3 441	3 491	419	419
5. Berau	1 179	1 219	2 569	2 569
6. Penajam Paser Utara	11	11	1 355	1 355
7. Mahakam Ulu	2 329	2 329	2	2
Kota				
1. Balikpapan	7	7	122	122
2. Samarinda	22	37	54	54
3. Bontang	-	-	1	1
Kalimantan Timur	7 617	7 777	8 221	8 321

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.4 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	2 014 529	1 974 991	3 283	2 325
2. Kutai Barat	743 193	728 607	208	147
3. Kutai Kartanegara	2 959 954	2 901 860	2 355	1 667
4. Kutai Timur	6 972 556	6 835 708	1 060	751
5. Berau	4 144 842	4 063 493	1 569	1 110
6. Penajam Paser Utara	305 680	299 681	1 021	723
7. Mahakam Ulu	127 323	124 824	5	4
Kota				
1. Balikpapan	487	477	480	340
2. Samarinda	8 719	8 548	178	126
3. Bontang	121	118	11	8
Kalimantan Timur	17 277 404	16 938 307	10 170	7 201

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.5 Produksi Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kakao		Lada	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	3	4	15	18
2. Kutai Barat	20	24	5	6
3. Kutai Kartanegara	39	44	2 432	2 961
4. Kutai Timur	1 414	1 664	128	156
5. Berau	411	484	457	556
6. Penajam Paser Utara	2	2	1 019	1 240
7. Mahakam Ulu	288	339	-	-
Kota				
1. Balikpapan	1	1	104	127
2. Samarinda	3	4	13	16
3. Bontang	-	-	-	-
Kalimantan Timur	2 181	2 566	4 173	5 080

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.6 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	399	14 402	14 801
2. Kutai Barat	-	-	-
3. Kutai Kartanegara	3 231	-	3 231
4. Kutai Timur	-	-	-
5. Berau	-	-	-
6. Penajam Paser Utara	-	-	-
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota			
1. Balikpapan	-	-	-
2. Samarinda	-	-	-
3. Bontang	-	-	-
Kalimantan Timur	3 630	14 402	18 032

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.7 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten	98	191 986	192 084
1. Paser	-	-	-
2. Kutai Barat	-	-	-
3. Kutai Kartanegara	-	-	-
4. Kutai Timur	-	-	-
5. Berau	-	-	-
6. Penajam Paser Utara	-	-	-
7. Mahakam Ulu	-	-	-
Kota	-	-	-
1. Balikpapan	-	-	-
2. Samarinda	-	-	-
3. Bontang	98	191 986	192 084
Kalimantan Timur	3 630	14 402	18 032

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.8 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	60	97 326	97 386
2. Kutai Barat	9 766	142 979	152 745
3. Kutai Kartanegara	2 842	214 225	217 067
4. Kutai Timur	9 484	400 754	410 238
5. Berau	3 398	113 237	116 635
6. Penajam Paser Utara	-	31 417	31 417
7. Mahakam Ulu	-	24 289	24 289
Kota			
1. Balikpapan	-	-	-
2. Samarinda	-	-	-
3. Bontang	-	20	20
Kalimantan Timur	25 550	1 024 247	1 049 797

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	49	1 418 174	1 418 223
2. Kutai Barat	258	660 963	661 221
3. Kutai Kartanegara	1 481	2 705 033	2 706 514
4. Kutai Timur	151	5 602 509	5 602 660
5. Berau	-	2 692 498	2 692 498
6. Penajam Paser Utara	-	221 238	221 238
7. Mahakam Ulu	-	124 824	124 824
Kota			
1. Balikpapan	-	-	-
2. Samarinda	-	7	7
3. Bontang	1 939	1 3425 246	1 3427 185
Kalimantan Timur	25 550	1 024 247	1 049 797

Sumber :

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.10 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha), 2018-2022

Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Tahunan					
Karet	92 354	92 639	92 982	92 403	94 596
Kelapa	21 786	21 152	20 698	20 018	20 068
Kelapa Sawit	286 058	255 919	286 058	252	373 212
Kopi	2 725	2 529	1 957	1 488	1 495
Kakao	7 298	7 328	6 883	7 617	7 777
Teh	-	-	-	-	-
Jambu Mete	8	8	4	1	-
Pala	151	305	257	322	422
Lada	9 021	8 921	8 247	8 221	8 321
Tebu	1	1	1	1	-
Tembakau	-	-	-	-	-
Nilam	33	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.11 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ton), 2018-2022

Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Tahunan					
Karet	55 271	50 880	52 801	66 872	69 446
Kelapa	12 746	11 013	7 662	10 170	7 201
Kelapa Sawit	495 102	506 370	550 473	561 146	519 497
Kopi	-	-	-	-	-
Kakao	325	223	262	167	165
Teh	2 393	2 513	2 537	2 181	2 566
Jambu Mete	-	-	-	-	-
Pala	1	1	-	-	-
Lada	-	0.10	0.15	11.00	12.00
Tebu	6 484	5 799	3 760	4 173	5 080
Tembakau	-	-	-	-	1.00
Nilam	0.10	0.15	0.15	0.15	-

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi yang sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Misi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada 5 Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok masing-masing. Dalam konteks ini, Misi dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura berkaitan dengan Misi II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.


Tujuan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Peningkatan produksi dicapai dengan menerapkan metode pertanian berkelanjutan, dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan seperti teknik irigasi yang mengurangi emisi gas metan, penggunaan pupuk kompos organik, bio-pestisida, pengendalian hama biologis, dan lainnya.

Sementara itu, tujuan jangka menengah Dinas ini meliputi:

1. Mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
3. Meningkatkan mutu dan daya saing produk.
4. Meningkatkan fasilitas pasca panen dan pemasaran.
5. Meningkatkan kapasitas petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mendukung pengurangan emisi di sektor pertanian.



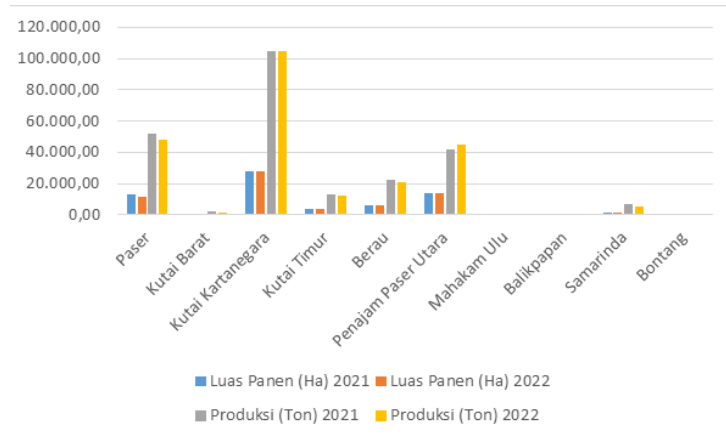




Dalam kerangka ini, sasaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai hasil yang konkret dari setiap tujuan, dengan indikator spesifik dan terukur serta target yang jelas. Sasaran ini harus lebih fokus, spesifik, terinci, dan dapat diukur. Sasaran-sasaran ini, yang diperincikan untuk periode tahun 2013-2018, meliputi peningkatan produksi padi dan ubi kayu pada lahan fungsional dan lahan kritis, pengembangan sentra padi, peningkatan produksi buah durian, lai, jeruk, pisang, dan pepaya terutama pada lahan kritis, pengembangan kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT), peningkatan sertifikasi kebun, peningkatan jumlah sub terminal agribisnis (STA), dan peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan untuk mengurangi emisi sektor pertanian.



Grafik 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022



Pada tahun 2021, luas panen padi tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 27.635,02 hektar, diikuti oleh Kabupaten Paser dengan 13.137,77 hektar. Sementara itu, produksi padi tertinggi juga terjadi di Kutai Kartanegara sebesar 104.441,83 ton, disusul oleh Paser dengan 51.972,06 ton.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan secara umum dalam luas panen dan produksi padi di sebagian besar kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Kartanegara masih memimpin dengan luas panen sebesar 27.981,31 hektar dan produksi sebanyak 105.025,70 ton. Diikuti oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas panen 13.531,22 hektar dan produksi sebanyak 45.160,69 ton.

Secara keseluruhan, Kalimantan Timur mencatat luas panen sekitar 64.970,01 hektar pada tahun 2022, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi juga mengalami penurunan menjadi sekitar 239.425,34 ton.

Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	LuasPanen(Ha)		Produktivitas(Ton/ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	13 137,77	11 663,91	3,96	4,13	51 972,06	48 202,66
2.Kutai Barat	527,89	477,55	3,83	2,69	2 021,46	1 284,77
3.Kutai Kartanegara	27 635,02	27 981,31	3,78	3,75	104 441,83	105 025,70
4.Kutai Timur	3 660,48	3 415,90	3,58	3,54	13 119,61	12 076,25
5.Berau	5 756,54	6 229,84	3,89	3,39	22 364,87	21 135,98
6.Penajam Paser Utara	13 501,60	13 531,22	3,12	3,34	42 130,12	45 160,69
7.Mahakam Ulu	232,22	201,45	4,01	2,43	932,09	489,42
Kota						
1.Balikpapan	102,67	86,93	3,45	3,48	354,13	302,10
2.Samarinda	1 632,33	1 312,78	4,28	4,18	6 988,91	5 492,34
3.Bontang	82,94	69,12	4,25	3,70	352,88	255,43
Kalimantan Timur	66 269,46	64 970,01	3,692	3,685	244 677,96	239 425,34

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	944,00	959,50	3,96	4,13	5 615,62	5 358,83
2.Kutai Barat	521,60	423,00	3,83	2,69	2 832,38	1 981,75
3.Kutai Kartanegara	1 051,20	1 627,10	3,78	3,75	5 717,84	6 982,08
4.Kutai Timur	1 228,60	1 601,80	3,58	3,54	6 774,56	7 283,61
5.Berau	10 558,50	10 570,20	3,89	3,39	63 023,55	51 072,78
6.Penajam Paser Utara	320,00	100,40	3,12	3,34	2 535,01	503,28
7.Mahakam Ulu	1,40	2,50	4,01	2,43	7,94	12,74
Kota						
1.Balikpapan	36,50	73,20	3,45	3,48	206,88	356,14
2.Samarinda	48,30	73,50	4,28	4,18	267,21	343,86
3.Bontang	11,00	11,00	4,25	3,70	38,00	40,62
Kalimantan Timur	14 721,10	15 442,20	5,91	4,79	87 018,99	73 935,69

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.3 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	LuasPanen(Ha)		Produktivitas(Ton/ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	13,00	6,00	1,56	1,47	20,31	8,79
2.Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
3.Kutai Kartanegara	30,80	15,30	1,69	1,52	52,01	23,32
4.Kutai Timur	5,70	14,00	1,61	1,58	9,17	22,07
5.Berau	19,50	3,00	1,69	1,62	33,03	4,85
6.Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-
7.Mahakam Ulu	-	2,20	-	1,36	-	3,00
Kota						
1.Balikpapan	-	-	-	-	-	-
2.Samarinda	-	-	-	-	-	-
3.Bontang	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	69,00	40,50	1,66	1,53	114,52	62,03

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	LuasPanen(Ha)		Produktivitas(Ton/ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	58,00	36,50	1,22	1,28	70,50	46,59
2.Kutai Barat	31,20	22,50	1,22	1,22	37,96	27,34
3.Kutai Kartanegara	312,70	169,90	1,21	1,09	377,91	184,94
4.Kutai Timur	86,20	98,70	1,10	1,26	95,24	124,52
5.Berau	121,30	62,90	1,26	1,39	153,16	87,19
6.Penajam Paser Utara	12,90	2,20	1,06	1,18	13,69	2,60
7.Mahakam Ulu	6,30	5,10	0,51	1,06	3,22	5,41
Kota						
1.Balikpapan	10,50	12,50	1,22	1,31	12,82	16,34
2.Samarinda	20,20	18,40	1,76	1,85	35,62	33,95
3.Bontang	9,00	12,00	1,32	1,25	11,89	14,94
Kalimantan Timur	668,30	440,70	1,22	1,23	812,01	543,82

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	LuasPanen(Ha)		Produktivitas(Ton/ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	96,00	72,00	33,98	28,85	3 261,84	2 077,52
2.Kutai Barat	321,50	188,00	27,57	24,25	8 862,31	4 559,78
3.Kutai Kartanegara	801,50	612,20	23,32	27,65	18 687,07	16 928,01
4.Kutai Timur	347,60	371,10	34,57	33,84	12 014,84	12 559,29
5.Berau	130,30	82,50	30,65	29,60	3 993,18	2 442,32
6.Penajam Paser Utara	74,70	80,60	38,76	34,63	2 895,31	2 791,18
7.Mahakam Ulu	8,30	9,00	33,24	25,60	275,89	230,43
Kota						
1.Balikpapan	256,50	263,60	31,33	29,69	8036,31	7824,99
2.Samarinda	113,00	98,90	34,81	33,00	3 933,64	3 263,37
3.Bontang	12,00	14,00	41,15	36,58	493,83	512,16
Kalimantan Timur	2 161,40	1 791,90	28,90	29,68	62 454,22	53 189,05

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.6 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	LuasPanen(Ha)		Produktivitas(Ton/ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1.Paser	26,00	35,00	16,99	17,29	441,74	605,24
2.Kutai Barat	94,30	59,00	10,78	10,50	1 016,52	619,72
3.Kutai Kartanegara	449,70	295,10	17,91	18,32	8 055,84	5 404,90
4.Kutai Timur	111,00	123,10	15,28	17,29	1 696,09	2 128,53
5.Berau	71,20	13,70	16,25	16,87	1 157,16	231,13
6.Penajam Paser Utara	81,30	72,10	28,54	29,37	2 320,69	2 117,64
7.Mahakam Ulu	5,90	2,80	16,34	16,94	96,43	47,42
Kota						
1.Balikpapan	13,50	26,50	16,32	17,18	220,36	455,14
2.Samarinda	22,50	20,50	16,36	17,29	368,05	354,50
3.Bontang	12,00	10,00	9,97	16,80	119,64	168,02
Kalimantan Timur	887,40	657,80	17,46	18,44	15 492,52	12 132,24

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.7 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Jenis Tanaman Sayuran	Luas Panen (Ha)		Produktivitas(Ton/Ha)		Produksi(Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bawang Daun	327	200	1,8	2,39	436	479
Bawang Merah	32	25	2,25	4,62	72	114
Bayam	1 236	1 097	4,32	4,5	5 334	4 930
Buncis	583	492	8,98	11,27	5 239	5 546
Cabai Besar/TW/Teropong	502	309	6,29	6,74	3 156	2 083
Cabai Kering	333	480	8,29	7,6	2 760	3 650
Cabai Rawit	1 456	1 216	5,75	6,4	8 367	7 778
Jamur Lainnya	1	-	1	-	1	-
Jamur Tiram	6 752	6 848	0,08	0,24	54 809	1 670
Kancang Panjang	1 205	951	8,04	9,97	9 691	9 476
Kangkung	1 488	1 230	8,29	8,97	12 331	11 026
Kembang Kol	44	35	2,75	3,6	120	125
Kubis	3	3	1,6	0,75	4	2
Labu Siam	48	54	2,49	5,97	119	324
Melon	66	77	7,07	6,07	468	470
Mentimun	1 013	848	12,09	14,05	12 248	11 911
Paprika	3	-	14	-	42	-
Petsai/Sawi	1 142	1 070	6,05	7,94	6 915	8 493
Semangka	475	514	8,52	7,13	4 047	3 665
Terung	1 086	915	9,96	13,41	10 810	12 270
Tomat	861	726	10,57	12,17	9 101	8 841

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.8 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Buah-Buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Jenis Tanaman Buah-Buahan	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)		Produktivitas (Kg/Phn)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alpukat	12 689	14 493	53	44	674	638
Belimbing	12 123	12 279	78	103	948	1 267
Buah Naga	145 042	143 811	83	88	12 035	12 719
Duku/Langsat/ Kokosan	32 447	28 458	111	141	3 605	3 998
Durian	210 413	99 015	64	89	13 440	8 773
Jambu Biji	23 513	30 197	58	49	1 360	1 466
Jambu Air	29 391	22 681	73	54	2 140	1 229
Jengkol	14 768	11 945	49	79	716	949
Jeruk Lemon	6 476	8 433	24	33	156	276
Jeruk Pamelon	2 436	5 674	120	36	292	205
Jeruk Siam/ Keprok	192 302	177 807	59	44	11 301	7 755
Lengkeng	10 200	14 035	59	113	606	1 590
Mangga	51 260	41 645	100	72	5 133	3 010
Manggis	5 001	2 815	26	121	131	342
Melinjo	13 066	12 914	116	118	1 521	546
Nangka/ Cempedak	211 108	108 715	155	77	32 819	8 364
Nenas	11 085 798	10 545 668	5	3	55 171	36 641
Pepaya	205 870	189 237	117	72	24 068	13 674
Petai	12 865	12 611	73	74	936	936
Pisang	1 452 566	1 635 226	90	78	130 656	127 562
Rambutan	182 372	204 380	62	52	11 329	10 703
Salak	685 330	774 957	11	9	7 508	6 841
Sawo	21 304	18 267	85	74	1 809	1 352
Sirsak	20 497	22 325	51	37	1 046	829
Sukun	20 652	20 128	92	51	1 897	1 028

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.9 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Tanaman	Luas Panen (M2)		Produktivitas (Kg/M2)		Produksi (Kg)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jahe	905 833	1 106 046	2.7	1.03	2 441 371	1 140 389
Jeruk Nipis	102 537	116 685	14.84	16.7	1 521 441	1 948 323
Kapulaga	1 541	2 446	4.07	3.41	6 269	8 332
Kencur	50 628	33 197	2.69	3.9	136 080	129 305
Kunyit	127 426	89 479	4.12	2.45	525 390	219 214
Laos/Lengkuas	96 261	93 741	2.85	3.14	274 326	294 401
Lempuyang	1 850	1 394	3.71	4.45	6 864	6 205
Lidah Buaya	8 657	4 239	7.28	12.43	63 066	52 684
Mahkota Dewa	2 800	4 272	93.56	109.27	261 966	466 807
Mengkudu/Pace	6 279	5 238	51.15	67.87	321 142	355 501
Sambikoto	1 068	1 369	3.52	2.05	3 756	2 800
Serai Hijau	148 982	247 981	5.41	3.91	806 270	969 635
Temuireng	8 936	10 308	9.05	6.32	80 839	65 162
Temukunci	10 879	7 211	6.23	8.7	67 811	62 746
Temulawak	12 780	14 897	5.94	3.37	75 920	50 173

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.10 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Tanaman	Total Luas Panen (m2)		Produktivitas (Tgk/m2)		Produksi (Tangkai)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aglaonema	5 245	1 758	1.93	3.34	10	5 864
Anggrek Pot	2 494	4 650	4.66	1.78	11 634	8 276
Anggrek Potong	6 793	1 932	2.03	6.92	13 815	13 363
Anthurium Bunga	496	2 217	3.55	3.5	1 760	7 767
Bromelia	65	40	5.38	2.75	350	110
Bugenvil	2 095	2 133	2.16	1.69	2 360	3 605
Cordyline	134	8	5.82	21.25	780	170
Dracaena	88	40	2.4	2.5	211	100
Gerbera (Herbras)	8	8	19.38	20	155	160
Heliconia (Pisang-Pisangan)	135	662	4.01	2.73	541	1 806
Ixora (Soka)	805	1 455	8.31	2.82	6 690	4 110
Krisan	5 294	4 401	1.64	1.04	8 665	4 585
Mawar	29 290	23 979	24.77	20.93	725 630	501 990
Melati	55 188	50 211	0.7	0.46	38 496	22 935
Pakis	5 072	5 112	2.45	1.85	12 409	9 461
Palem	944	995	2.43	1.77	1 193	1 764
Phylodendron	382	165	2.31	9.53	884	1 573
Puring	515	1 080	1.55	2.44	800	2 640
Sansevieria (Pedang-Pedangan)	297	683	9.47	4.51	2 812	3 083
Sedap Malam	2 424	2 575	2.97	1.68	7 200	4 333

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2001 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 03 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pembangunan kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 10 UU No. 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan





pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut pasal 11 ayat (3) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

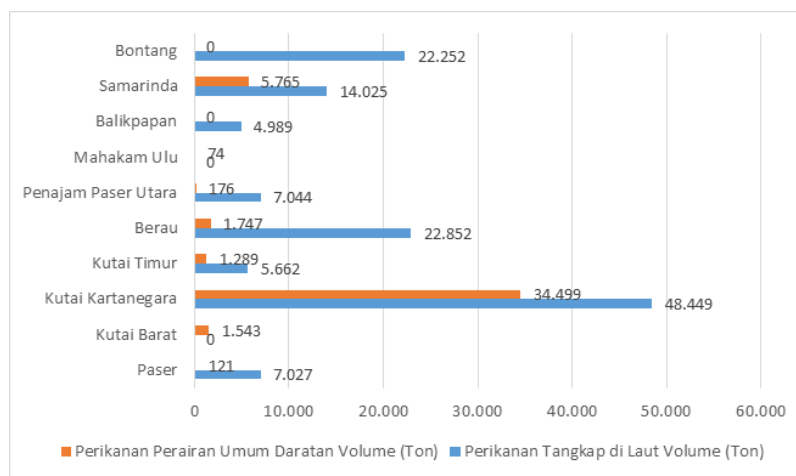
Urusan pilihan menurut pasal 14 ayat (2) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keunggulan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan salinan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan type A yang terdiri dari 4 Bidang ditambah Sekretariat, yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No.1 Samarinda.



Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Grafik ini memberikan gambaran tentang produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, yang dibagi berdasarkan kabupaten/kota dan jenis penangkapan. Dalam kategori “Perikanan Tangkap di Laut”, Kutai Kartanegara adalah kontributor terbesar dengan produksi mencapai 48.449 ton, diikuti oleh Berau dengan 22.852 ton, dan Bontang dengan 22.252 ton. Kabupaten Paser juga berkontribusi secara signifikan dengan produksi sebanyak 7.027 ton. Di sisi lain, Mahakam Ulu adalah kabupaten dengan produksi terendah di kategori ini, hanya mencapai 74 ton.

Sementara itu, dalam kategori “Perikanan Perairan Umum Daratan”, Kutai Kartanegara juga menjadi pemimpin dengan produksi mencapai 34.499 ton, diikuti oleh Samarinda

dengan 5.765 ton, dan Berau dengan 1.747 ton. Kutai Timur juga mencatatkan kontribusi yang signifikan dengan produksi sebanyak 1.289 ton. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki produksi terendah di kategori ini, hanya mencapai 176 ton.

Secara total, Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan 132.300 ton perikanan tangkap di laut dan 45.214 ton perikanan perairan umum daratan pada tahun 2022. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa perikanan tangkap di laut jauh lebih dominan dibandingkan dengan perairan umum daratan di Kalimantan Timur pada tahun tersebut.

Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Paser	7 027	202 730 299	121	5 864 546
2. Kutai Barat	-	-	1 543	34 629 596
3. Kutai Kartanegara	48 449	1 623 065 157	34 499	1 101 551 825
4. Kutai Timur	5 662	180 737 742	1 289	30 620 519
5. Berau	22 852	725 260 158	1 747	78 982 398
6. Penajam Paser Utara	7 044	188 942 678	176	6 513 465
7. Mahakam Ulu	-	-	74	7 640 498
Kota/Municipality				
1. Balikpapan	4 989	97 615 747	-	-
2. Samarinda	14 025	528 765 802	5 765	222 851 000
3. Bontang	22 252	1 062 840 060	-	-
Kalimantan Timur	132 300	4 609 957 643	45 214	1 488 653 847

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/ Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	Cakalang		Tongkol		Tuna	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	-	-	168	3 354 700	-	-
2. Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
3. Kutai Kartanegara	-	-	414	9 395 535	-	-
4. Kutai Timur	47	947 720	494	9 644 700	371	9 277 375
5. Berau	629	12 914 265	2 242	44 003 466	202	5 807 376
6. Penajam Paser Utara	161	3 223 120	491	14 365 618	238	5 957 850
7. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Kota						
1. Balikpapan	107	2 251 460	655	10 417 750	163	4 477 825
2. Samarinda	623	13 083 000	2 242	57 778 000	-	-
3. Bontang	1 872	65 511 880	3 779	132 272 000	922	50 695 260
Kalimantan Timur	3 439	97 931 445	10 485	281 231 769	1 896	76 215 686

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 3.6.2

Kabupaten/Kota	Udang		Lainnya		Tangkap di Laut	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	2 835	136 466 020	7 527	115 044 092	10 530	254 864 812
2. Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
3. Kutai Kartanegara	21 117	944 037 580	25 065	507 912 786	46 596	1 461 345 901
4. Kutai Timur	1 435	79 078 480	3 310	73 042 390	5 657	171 990 665
5. Berau	2 518	158 449 075	16 692	432 331 754	22 283	653 505 936
6. Penajam Paser Utara	807	46 668 180	5 039	136 276 718	6 736	206 491 486
7. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Kota						
1. Balikpapan	229	9 363 990	4 679	108 608 905	5 833	135 119 930
2. Samarinda	740	62 900 000	9 630	296 777 000	13 235	430 538 000
3. Bontang	279	13 109 560	14 454	760 706 818	21 306	1 022 295 518
Kalimantan Timur	29 960	1 450 072 885	86 396	2 430 700 463	132 176	4 336 152 248

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	Udang		Lainnya		Tangkap di Laut	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Paser	29	2 364 360	41	1 182 203	70	3 546 563
2. Kutai Barat	-	-	1 560	36 318 936	1 560	36 318 936
3. Kutai Kartanegara	922	115 198 125	33 224	854 927 135	34 146	970 125 260
4. Kutai Timur	6	506 250	1 173	28 154 810	1 179	28 661 060
5. Berau	604	52 343 689	1 019	24 551 705	1 623	76 895 394
6. Penajam Paser Utara	12	671 880	148	4 761 885	160	5 433 765
7. Mahakam Ulu	-	-	62	8 414 250	62	8 414 250
Kota						
1. Balikpapan	-	-	-	-	-	-
2. Samarinda	1 027	91 560 000	4 738	131 291 000	5 765	222 851 000
3. Bontang	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	2 600	262 644 304	41 965	1 089 601 924	44 565	1 352 246 228

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.4 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

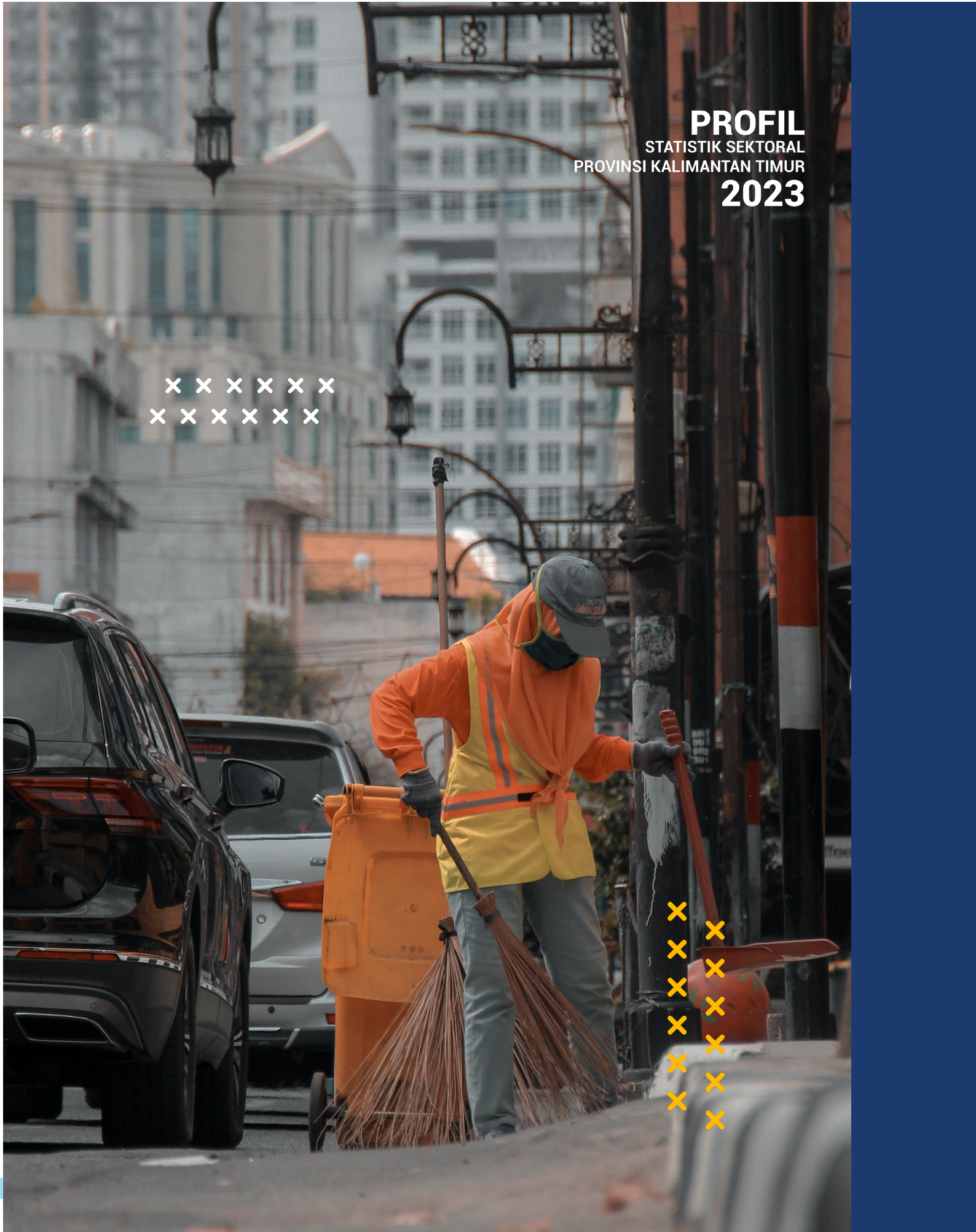
Kabupaten/ Kota	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1.000 Ekor)	Ikan Hias (1.000 Ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Paser	14 012	2 390	-
2. Kutai Barat	2 178	193	5
3. Kutai Kartanegara	126 139	832 252	1 846
4. Kutai Timur	917	-	-
5. Berau	2 380	5 105	-
6. Penajam Paser Utara	8 977	17 160	-
7. Mahakam Ulu	4	-	-
Kota			
1. Balikpapan	487	337 833	26
2. Samarinda	737	36 301	96
3. Bontang	4 414	66	88
Kalimantan Timur	160 245	1 231 300	2 061

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023

x x x x x x
x x x x x x

x
x
x
x
x
x
x
x



Pada Tahun 2023,
di Kalimantan Timur terdapat
6 bandara sudah beroperasi



361 pelabuhan
di Kalimantan Timur



96 Kutai Kartanegara
Pelabuhan terbanyak



3 Mahakam Ulu
Pelabuhan paling sedikit



Sumber: Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

BAB IV

SOSIAL MASYARAKAN DAN KESEJAHTERAAN

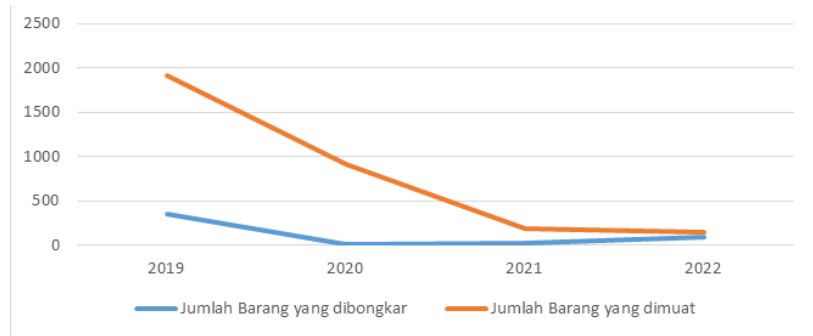
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah di sektor perhubungan, dengan berlandaskan prinsip otonomi dan peran pembantuannya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016, tugas Dinas Perhubungan mencakup beberapa aspek penting. Ini meliputi penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis di sektor perhubungan. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian kebijakan teknis terkait lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan dan perkeretaapian. Tugas lainnya meliputi pengelolaan urusan administratif, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan arahan atasan yang sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



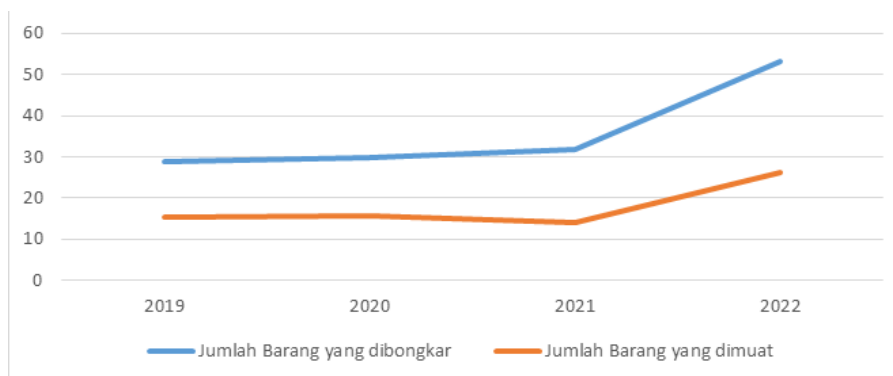


Grafik. 4.1.1 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022



Grafik tersebut menunjukkan adanya tren yang berfluktuasi dalam aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022. Jumlah barang yang dibongkar mengalami penurunan drastis dari 352 ribu ton pada tahun 2019 menjadi hanya 8 ribu ton pada tahun 2020, tetapi mengalami lonjakan tajam menjadi 25 ribu ton pada tahun 2021, dan terus meningkat signifikan menjadi 88 ribu ton pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah barang yang dimuat juga mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat 1910 ribu ton barang yang dimuat, namun angka tersebut menurun drastis menjadi 918 ribu ton pada tahun 2020. Pada tahun 2021, kembali terjadi penurunan menjadi hanya 183 ribu ton, dan masih turun menjadi 140 ribu ton pada tahun 2022.

Grafik. 4.1.2 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Bandara di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022



Grafik tersebut menggambarkan pergerakan dalam aktivitas bongkar muat barang di bandara di Provinsi Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir. Pada 2019, tercatat 29 ribu ton barang yang dibongkar, dan angka tersebut naik menjadi 30 ribu ton pada tahun 2020. Angka ini kembali naik pada tahun 2021 menjadi 32 ribu ton. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, dimana angka ini bergerak naik signifikan menjadi 53 ribu ton. Di sisi lain, jumlah barang yang dimuat juga mencerminkan pola yang serupa. Pada 2019, 15 ribu ton barang dimuat dari bandara di Provinsi Kalimantan Timur, dan angka tersebut naik sedikit menjadi 16 ribu ton pada tahun berikutnya. Namun di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 14 ribu ton. Sementara angka tahun 2022 mencatatkan kenaikan signifikan dengan 26 ribu ton barang dimuat.

Tabel 4.1.1 Jumlah Kendaraan Dan Rasio Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022

Nama Variabel	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Unit Kendaraan	2 992 255	3 178 580	3 264 435	2 873 505
Rasio Panjang Jalan	0,0054	0,0051	0,0049	0,0056

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.2 Daftar Terminal Bus di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

No	Nama	Kota/Kab	Tipe	Manajemen	Kategori Terminal Bus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terminal Batu Ampar	Balikpapan	Terminal Tipe A	Kementerian Perhubungan	Antar Provinsi
2	Terminal Samarinda Seberang	Samarinda	Terminal Tipe A	Kementerian Perhubungan	Antar Provinsi
3	Terminal Rinding	Berau	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
4	Terminal Sei Kunjang	Samarinda	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
5	Terminal Sangatta	Kutai Timur	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
6	Terminal Timbau	Kutai Kartanegara	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
7	Terminal Tepian Batang	Paser	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
8	Terminal Bontang	Bontang	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
9	Terminal Lempake	Samarinda	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.3 Jumlah Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2023

Jenis Kendaraan	Jumlah
(1)	(2)
Angkutan Antar Jemput	64
Angkutan Kota Dalam Provinsi	248
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Karyawan	11
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Keperintisan	2
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Patas	8
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Taksi	87
Angkutan Sewa Khusus	310
Jumlah Kendaraan	730

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.4 Jumlah Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)
6401	Kab. Paser	28
6402	Kab. Kutai Kartanegara	96
6403	Kab. Berau	39
6407	Kab. Kutai Barat	33
6408	Kab. Kutai Timur	43
6409	Kab. Penajam Paser Utara	23
6411	Kab. Mahakam Ulu	3
6471	Kota Balikpapan	43
6472	Kota Samarinda	43
6474	Kota Bontang	10
	Total	361

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.5 Daftar Bandara di Provinsi Kalimantan Timur dengan Status Sudah Beroperasi, 2023

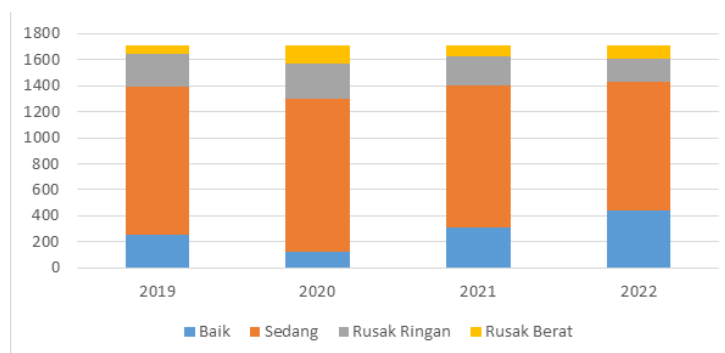
No	Nama Bandara	IATA / ICAO	Kelas	Pengelola	Panjang Landasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Balikpapan	BPN / WALL	Kelas IA	PT. Angkasa Pura I	2.500 x 45 m
2	Kalimarau - Berau	BEJ / WALK	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Udara Berau	2.250 x 45 m
3	Apt. Pranoto Samarinda	SRI / WRLS	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Udara Samarinda	2.250 x 45 m
4	Maratua - Berau	RTU / WAQC	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	1.600 x 30 m
5	Melalan Melak - Kutai Barat	MLK / WALE	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melalan Melak	1.350 x 30 m
6	Datah Dawai - Mahakam Ulu	DTD / WALJ	Kelas IV	Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	1.600 x 30 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

4.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

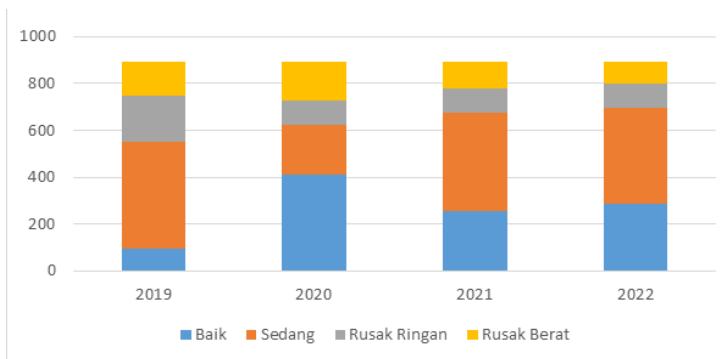
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran yang jelas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016. Tupoksi dinas ini melibatkan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengembangan teknis di berbagai aspek seperti sumber daya air, cipta karya, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan perumahan. Setiap bidang dalam dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Kepala Bidang memimpin beberapa seksi yang memiliki tugas khusus dalam mengumpulkan bahan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, dinas ini memainkan peran sentral dalam mengelola sumber daya alam, infrastruktur, serta pengembangan wilayah dan pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik. 4.2.1 Panjang Jalan Nasional menurut Kondisinya (km), 2019-2023

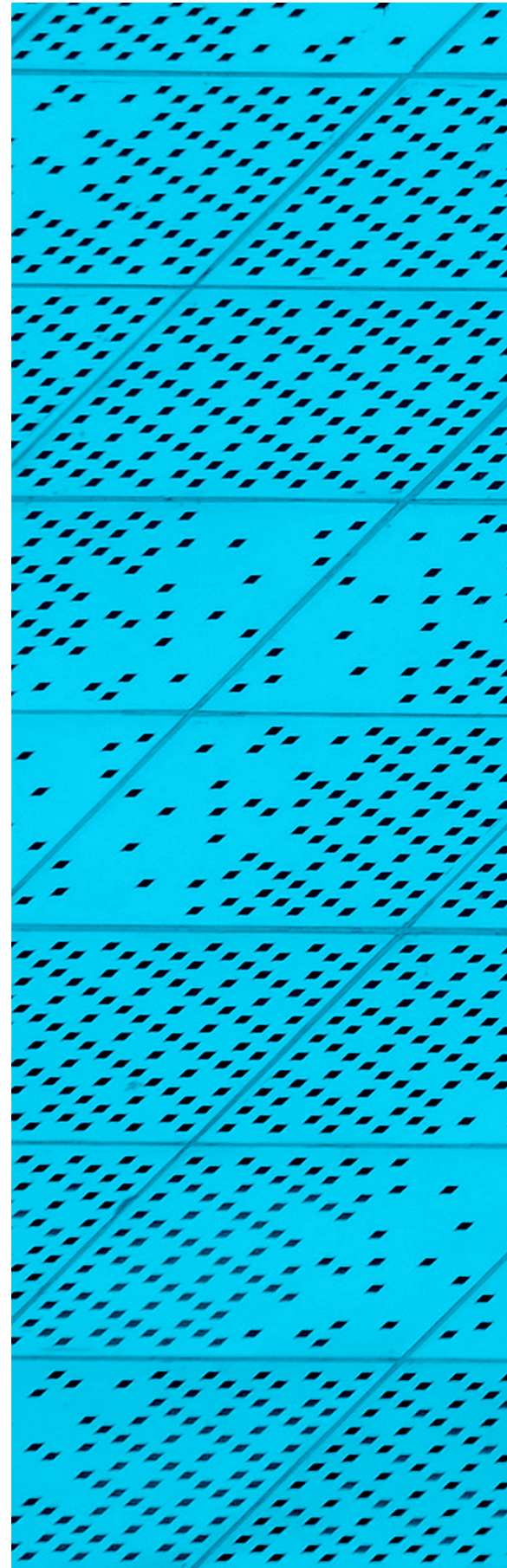


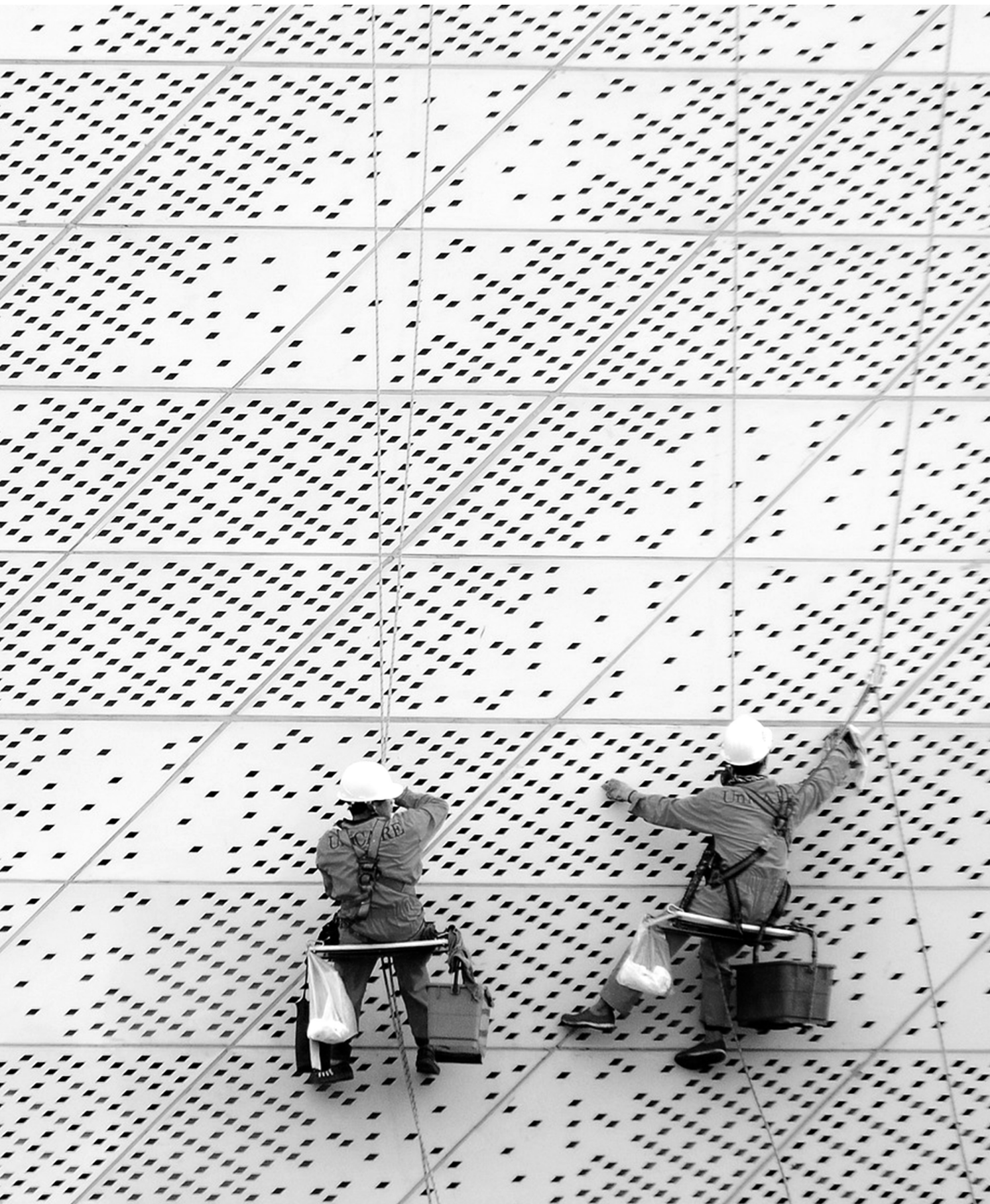
Grafik tersebut menunjukkan perubahan kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur pada 2019 hingga 2022. Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan signifikan dari 251,16 km pada 2019 menjadi 442,5 km pada 2022. Jalan dalam kondisi sedang cenderung fluktuatif, tertinggi adalah 1175,04 km pada 2020, dan mengalami penurunan menjadi hanya 988,11 km pada 2022. Jalan rusak ringan dan rusak berat juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan panjang jalan rusak ringan dari 268,76 km pada 2020 menjadi 179,11 km pada 2022. Sementara panjang jalan rusak berat mencapai angka tertinggi yakni 139,71 km pada 2020 dan kemudian menurun menjadi 98,14 km pada 2022.

Grafik. 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi menurut Kondisinya (km), 2019-2022



Grafik tersebut menunjukkan perubahan kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur pada 2019 hingga 2022. Jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi, mencapai puncak 408,38 km pada tahun 2020, kemudian berkurang kembali menjadi hanya 284,86 km pada 2022. Jalan dengan kondisi sedang sedang menurun dari 456,27 km pada 2019 menjadi 216,1 km pada 2020, namun kembali naik menjadi 409 km pada 2022. Jalan dengan kondisi rusak ringan cenderung turun, dengan 195,12 km pada 2019 menjadi 104,81 km pada 2022. Jalan rusak berat cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren penurunan, dari 149,96 km pada 2019 menjadi 96,42 km pada 2022.





Tabel 4.2.1 Data Sumber Air Potensial, 2022

No	Potensi Sumber Air Permukaan selain Sungai	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1	Waduk dan Bendungan Bengalon	Kec. Bengalon
2	Waduk dan Bendungan Kaliorang	Kec. Kaliorang
3	Waduk dan Bendungan Karang	Kec. Karang
4	Waduk dan Bendungan Pulai	Kec. Sandaran
5	Waduk dan Bendungan Sangatta	Kec. Sangatta
6	Bendungan Sukarahmat	Kec. Teluk Pandan
7	Embung Muara Wahau	Kec. Muara Wahau
8	Embung Dumaring	Kec. Dumaring
9	Kolam Retensi Kanaan	Kec. Bontang Barat
10	Bendungan Nyerekat	Kec. Bontang Selatan
11	Sumur dalam Maloy	Kec. Sangkulirang
12	Void bekas tambang PT. Indominco Mandiri sebanyak 6 titik dengan kapasitas tampung 20,7 Jt m ³	Kab. Kutai Timur
13	Void bekas tambang PT. KPC tersebar di beberapa titik	Kab. Kutai Timur

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.2 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

No.	Daerah Irigasi (DI)	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Total Daerah Irigasi	22	22
A	Daerah Irigasi Permukaan	8	8
1	Kab. Berau		
	D.I. Biatau	1	1
	D.I. Labanan	1	1
	D.I. Merancang	1	1
	D.I. Semurut	1	1
2	Kab. Kutai Kartanegara		
	D.I. Marangkayu	1	1
	D.I. Sungai Buluh	1	1
3	Kab. Kutai Timur		
	D.I. Kali Orang	1	1
	D.I. Selangkau	1	1
B	Daerah Irigasi Rawa	14	14
1	Kab. Berau		
	D.I.R. Rantau Pangan	1	1
	D.I.R. Sei Kuran	1	1
	D.I.R. Sukan Tengah	1	1
	D.I.R. Tanjung Perengat	1	1
	D.I.R. Urutang	1	1
2	Kab. Kutai Barat		
	D.I.R. Resak	1	1
3	Kab. Kutai Kartanegara		
	D.I.R. Sebulu	1	1
4	Kab. Kutai Timur		
	D.I.R. Bengalon	1	1
5	Kab. Paser		
	D.I.R. Laburan Lama	1	1
	D.I.R. Padang Pangrapat	1	1
	D.I.R. Riwang	1	1
	D.I.R. Suliliran	1	1
	D.I.R. Tanjung Aru	1	1
	D.I.R. Tanjung Harapan	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2019-2022

Jenis Jalan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1 710,90	1 710,90	1 710,95	1 806,76
1. Kondisi Baik	251,16	127,39	305,83	442,50
2. Kondisi Sedang	1 144,83	1 175,04	1 097,78	988,11
3. Kondisi Rusak Ringan	249,72	268,76	224,43	179,11
4. Kondisi Rusak Berat	65,19	139,71	78,19	98,14
Jalan Provinsi	895,09	895,09	895,09	895,09
1. Kondisi Baik	93,74	408,38	257,03	284,86
2. Kondisi Sedang	456,27	216,10	416,10	409,00
3. Kondisi Rusak Ringan	195,12	101,48	104,30	104,81
4. Kondisi Rusak Berat	149,96	169,13	117,67	96,42

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2019-2022

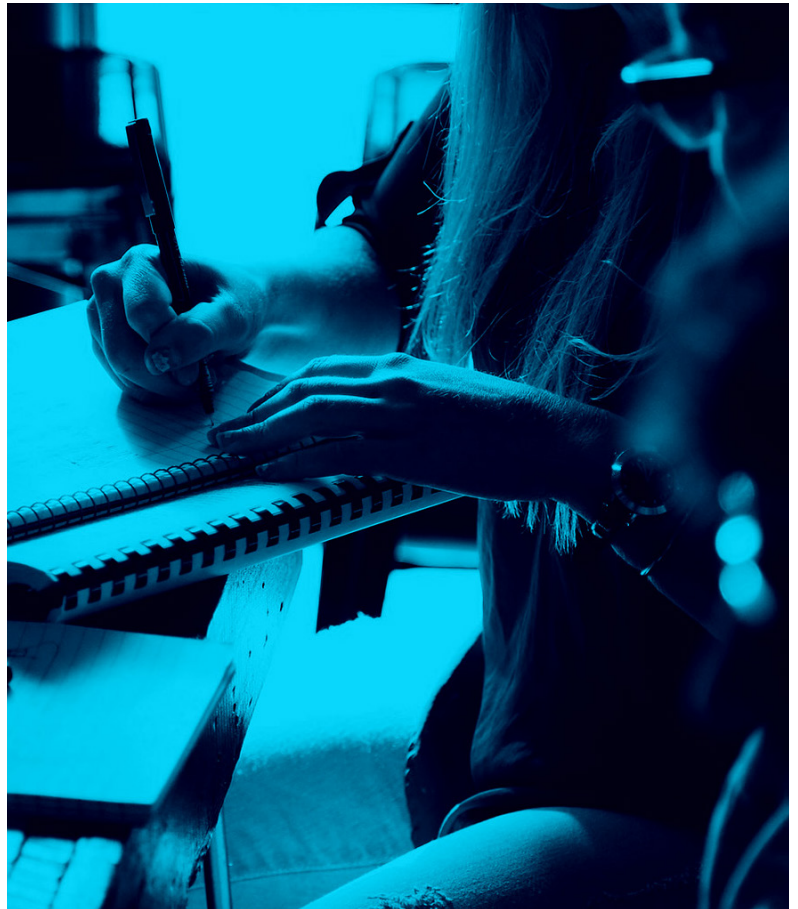
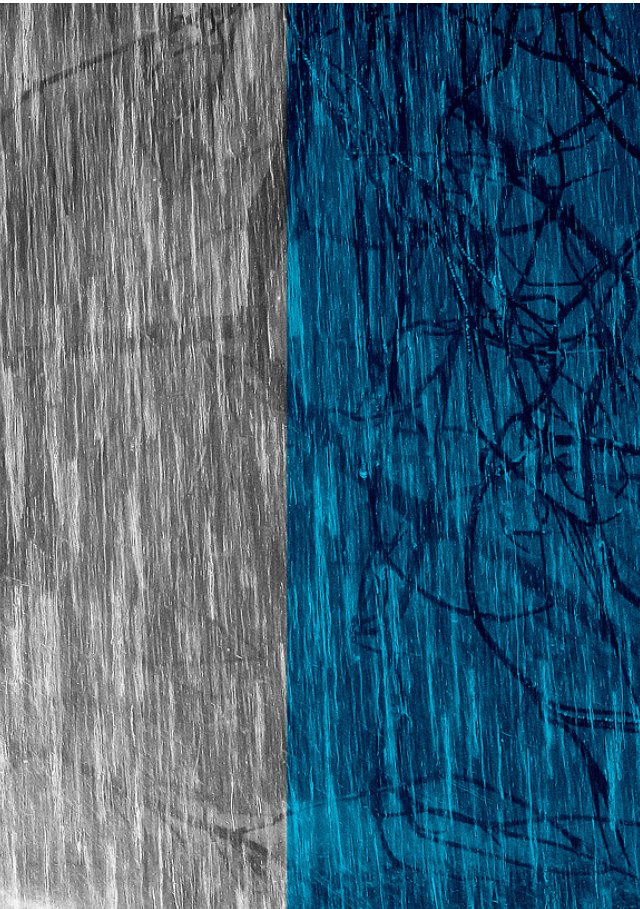
Jenis Jalan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1 710,91	1 710,90	1 710,96	1 806,76
1. Aspal	1 490,50	1 407,26	1 421,14	1 423,49
2. Kerikil	37,80	37,80	0,00	0,00
3. Tanah	4,31	0,00	0,00	0,00
4. Cor Beton	216,10	265,84	287,40	287,40
Jalan Provinsi	895,09	895,09	895,09	895,09
1. Aspal	581,02	529,65	475,11	465,29
2. Kerikil	8,41	132,49	141,65	127,59
3. Tanah	125,32	28,42	29,19	27,17
4. Cor Beton	180,34	204,53	249,14	275,04

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

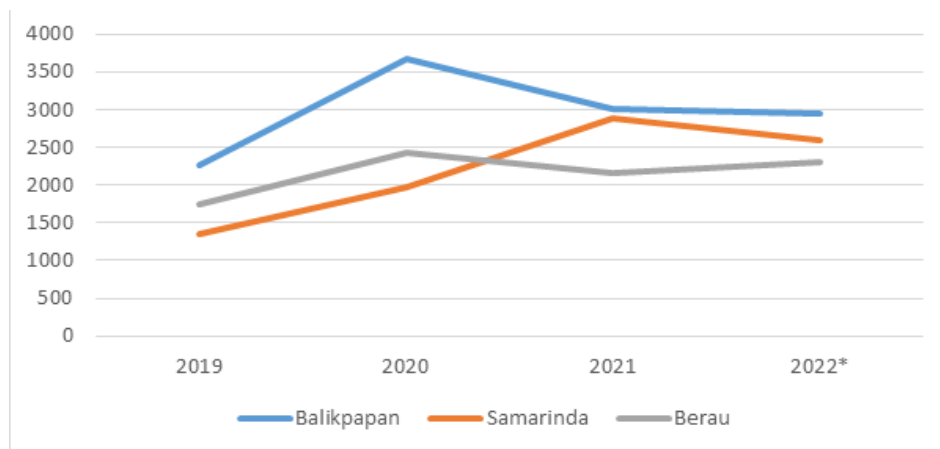


4.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki status sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. BMKG memiliki tugas pokok melaksanakan berbagai aspek di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BMKG juga melaksanakan sejumlah fungsi, termasuk perumusan kebijakan nasional dan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta penyediaan informasi dan peringatan dini terkait perubahan iklim dan bencana yang berkaitan dengan faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG juga aktif dalam kerja sama internasional, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan instrumentasi. Koordinasi dan pengawasan BMKG berada di bawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.



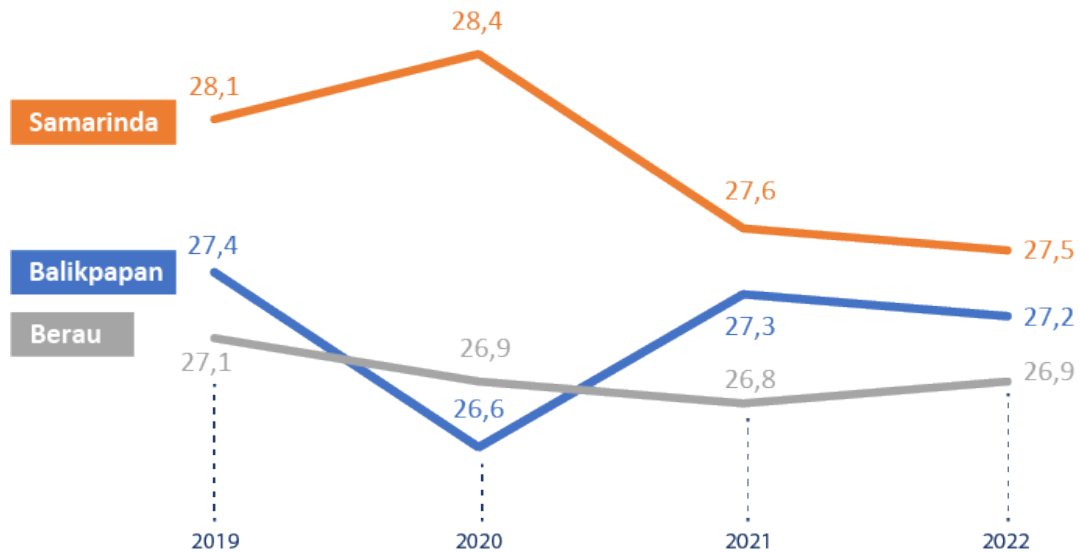
Grafik. 4.3.1 Curah Hujan dalam Satu tahun di Tiga Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (mm), 2019-2022



Grafik tersebut menunjukkan pola curah hujan dalam satu tahun di tiga wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Ketiganya memiliki pola yang berbeda, namun sama-sama mencatatkan curah hujan satu tahun terendah pada tahun 2019. Balikpapan dan Berau mencatatkan curah hujan tertinggi pada 2020 dengan masing-masing 3674,2 mm dan 2437,9 mm. Sementara curah hujan tertinggi di Samarinda terjadi pada 2021 dengan 2889 mm. Sementara itu, dalam rentang waktu 2021-2022, terjadi penurunan curah hujan satu tahun di Balikpapan dan Samarinda, sementara di Berau justru terjadi peningkatan curah hujan satu tahun.



Grafik 4.3.2 Suhu Rata-rata dalam Satu Tahun di Tiga Wilayah di provinsi Kalimantan Timur (derajat selsius), 2019-2022*



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan suhu rata-rata dalam satu tahun di tiga wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Sama seperti data tentang curah hujan, ketiganya memiliki pola yang berbeda. Pada periode 2019-2022, Balikpapan dan Berau mencatatkan suhu rata-rata tertinggi pada 2019 dengan masing-masing 27,4 derajat celsius dan 27,1 derajat celsius. Sementara suhu rata-rata tertinggi di Samarinda terjadi pada 2020 dengan 28,4 derajat celsius. Sementara itu, suhu rata-rata terendah di Balikpapan terjadi pada 2020 dengan 26,6 derajat celsius, di Samarinda pada 2022 dengan 27,5 derajat celsius, dan di Berau pada 2021 dengan 26,8 derajat celsius.

Tabel 4.3.1 Suhu Terendah, Suhu Tertinggi, dan Suhu Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (derajat celsius), 2019-2022*

Wilayah		2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Balikpapan					
1.	Suhu Terendah	24,1	25,2	24,5	24,2
2.	Suhu Tertinggi	31,9	32	31,7	31,1
3.	Suhu Rata-Rata	27,4	26,6	27,3	27,2
B. Samarinda					
1.	Suhu Terendah	23,7	22,8	24,3	24,5
2.	Suhu Tertinggi	34,3	35	32,2	32,3
3.	Suhu Rata-Rata	28,1	28,4	27,6	27,5
C. Berau					
1.	Suhu Terendah	22,7	21,6	23,5	23,5
2.	Suhu Tertinggi	35	36,4	32,7	32,7
3.	Suhu Rata-Rata	27,1	26,9	26,8	26,9

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.2 Kelembaban Udara Terendah, Kelembaban Udara Tertinggi, dan Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*

Wilayah		2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Balikpapan					
1.	Kelembaban Udara Terendah	43	54	77	66,5
2.	Kelembaban Udara Tertinggi	95	100	94	99,4
3.	Kelembaban Udara Rata-Rata	81	88	86	83,5
B. Samarinda					
1.	Kelembaban Udara Terendah	48	47	74	62
2.	Kelembaban Udara Tertinggi	93	98	91	98
3.	Kelembaban Udara Rata-Rata	72	80	81	82
C. Berau					
1.	Kelembaban Udara Terendah	38	43	57	67,3
2.	Kelembaban Udara Tertinggi	100	100	100	97,1
3.	Kelembaban Udara Rata-Rata	87	80	89	86,9

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.3 Curah Hujan Terendah, Curah Hujan Tertinggi, dan Curah Hujan Total dalam Satu Tahun di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mm), 2019-2022*

Wilayah	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Balikpapan					
1. Suhu Terendah	62,5	158,1	134	119	
2. Suhu Tertinggi	599,4	545,6	449	478	
3. Suhu Rata-Rata	2 270,6	3 674,2	3 017,8	2 947	
B. Samarinda					
1. Suhu Terendah	49,2	56,1	141	110	
2. Suhu Tertinggi	253,3	269,1	369	469	
3. Suhu Rata-Rata	1 358,1	1 970	2 889	2 599	
C. Berau					
1. Suhu Terendah	49,5	87,5	86	82	
2. Suhu Tertinggi	217,7	416,7	263	343,1	
3. Suhu Rata-Rata	1 742,2	2 437,9	2 160,9	2 312	

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.4 Kecepatan Angin Terendah, Kecepatan Angin Tertinggi, dan Kecepatan Angin Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (m/detik), 2019-2022*

Wilayah	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Balikpapan					
1. Kecepatan Angin Terendah	0	3	0	0	
2. Kecepatan Angin Tertinggi	25	30	35	43	
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	3	5	4	3	
B. Samarinda					
1. Kecepatan Angin Terendah	0	9	0	0	
2. Kecepatan Angin Tertinggi	25	25	30	36	
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	4	4	3	4	
C. Berau					
1. Kecepatan Angin Terendah	0	3	0	0	
2. Kecepatan Angin Tertinggi	25	25	21	19	
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	4	7	4	3,5	

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.5 Penyinaran Matahari Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*

Wilayah	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan	56	51	50	46
B. Samarinda	52	50	42	41
C. Berau	25	54	42	50

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.6 Tekanan Udara Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mb), 2019-2022*

Wilayah	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan	1 011,6	1 01,8	1 010,8	1 010,1
B. Samarinda	1 012,9	1 012	1 011,8	1 011,6
C. Berau	1 012,9	1 012,4	1 011,8	1 011,5

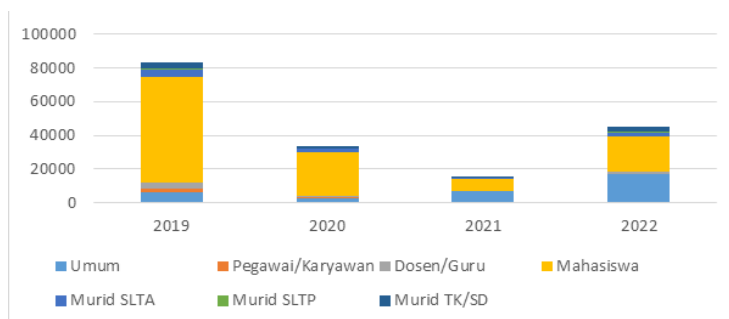
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur



4.4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur memiliki peran dalam membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam upaya ini, dinas tersebut menawarkan berbagai produk layanan yang beragam. Beberapa layanan yang diberikan mencakup pemantauan eksternal kearsipan, audit eksternal kearsipan, penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis, kunjungan wisata arsip, akuisisi arsip, layanan baca di tempat untuk berbagai koleksi, penggunaan layanan GOBOOK, koleksi audio visual, surat keterangan bebas pustaka, layanan perpustakaan digital iKaltim, pojok buku elektronik (PaDi), layanan perpustakaan setiap saat, perpustakaan keliling, layanan mendongeng (story telling), layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku), layanan penitipan barang (locker), layanan keanggotaan perpustakaan, layanan kunjungan perpustakaan/wisata perpustakaan, dan layanan informasi dan aduan masyarakat. Melalui berbagai layanan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur berperan dalam mendukung akses terhadap informasi dan pengelolaan dokumen yang efektif di daerah tersebut.

Grafik 4.4.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi Pengunjung, 2019-2022



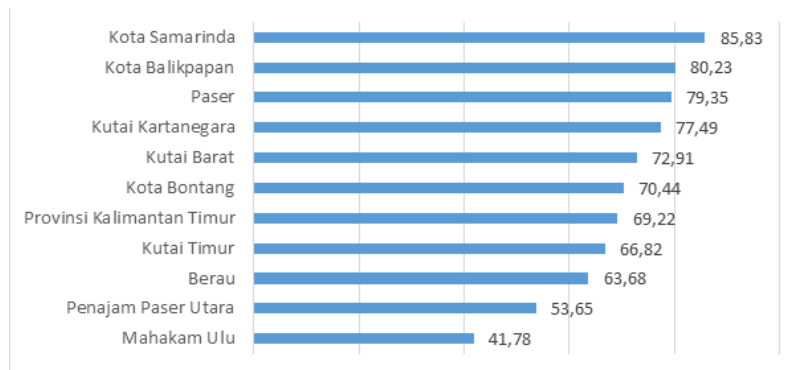
Grafik tersebut menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan segmentasi tahun 2019 hingga 2022. Tampak bahwa jumlah pengunjung tertinggi pada periode tersebut terjadi pada 2019, yang kemudian turun pada 2020 dan 2021. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi yang membuat masyarakat mengurangi mobilitas, termasuk untuk pergi ke perpustakaan. Jumlah pengunjung kembali meningkat pada tahun 2022, ketika pandemi mulai surut namun





belum sepenuhnya kembali seperti angka sebelum pandemi. Tampak juga dari grafik bahwa segmentasi pengunjung perpustakaan terbesar adalah mahasiswa. Sementara segmentasi pengunjung terbesar kedua adalah pengunjung yang berasal dari umum.

Grafik 4.4.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim , 2022



Grafik diatas menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Hasil tahun 2022 menunjukkan bahwa IPLM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur ada di Kota Samarinda dengan 85,83 yang masuk dalam kategori Tinggi. Sementara IPLM terendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu dengan 41,78 yang masuk dalam kategori Rendah . Dari jumlah tersebut, IPLM Provinsi Kalimantan Timur berada pada angka 69,22; yang masuk dalam kategori Sedang.

Tabel 4.4.1 Data Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2022

No.	Variabel	2016	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	71 304	72 579	89 863	91 885	91 885	97 601	100 748
2	Jumlah Buku Yang Tersedia di perpustakaan daerah	198 616	183 224	200 273	202 458	202 458	211 268	216 218
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	0,36	0,4	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	15 624	16 076	16 076	46 331	16 331	16 604	17 116
5	Jumlah Buku Elektronik Yang Tersedia	131 896	135 101	135 101	101 990	101 99	103 330	104 530

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2016-2022

Segmentasi Pengunjung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	8 631	6 938	6 286	6 103	2 706	6 914	16 644
Pegawai/Karyawan	7 210	4 853	4 348	2 474	496	109	606
Dosen/Guru	3 302	2 880	2 622	3 440	687	100	1 128
Mahasiswa	113 841	84 321	84 900	62 895	26 311	7 227	20 664
Murid SLTA	5 111	2 912	3 373	3 952	1 579	212	2 405
Murid SLTP	2 323	1 346	1 232	1 164	211	60	932
Murid TK/SD	7 018	6 689	9 679	3 302	1 552	194	2 703
Total	147 436	109 939	112 440	83 330	33 542	14 816	45 082

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2016-2022

Segmentasi Pengunjung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Peminjam Buku	124 374	67 477	68 666	52 819	15 437	2 130	12 383
Jumlah Buku yang Dipinjam	119 280	95 599	88 992	48 329	19 173	8 119	16 099

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2016-2022

Segmentasi Pengunjung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perpustakaan Umum							
1. Provinsi	1	1	1	1	1	1	1
2. Kab/Kota	10	9	9	9	9	9	9
3. Kecamatan	34	56	60	90	90	90	90
4. Desa/Kelurahan	393	523	523	648	648	648	648
Perpustakaan Sekolah							
1. SD/Sederajat	915	670	670	670	670	670	670
2. SMP/Sederajat	291	214	214	214	214	214	214
3. SMA/Sederajat	139	446	446	446	446	446	502
Perpustakaan Perguruan Tinggi							
1. PT Negeri	5	5	5	5	5	5	6
2. PT Swasta	3	45	45	45	45	45	73

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/ Kota	IPLM
(1)	(2)
Paser	79,35
Kutai Kartanegara	77,49
Berau	63,68
Kutai Barat	72,91
Kutai Timur	66,82
Penajam Paser Utara	53,65
Mahakam Ulu	41,78
Kota Balikpapan	80,23
Kota Samarinda	85,83
Kota Bontang	70,44
Provinsi Kalimantan Timur	69,22

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/ Kota, 2022

Kabupaten/ Kota	TGM
(1)	(2)
Penajam Paser Utara	63,65
Kota Balikpapan	67,41
Kota Samarinda	69,49
Provinsi Kalimantan Timur	66,84

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

4.5 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Organisasi bertanggung jawab membantu Asisten Administrasi Umum dalam berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan kebijakan daerah. Tugas ini meliputi persiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di sektor kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana.

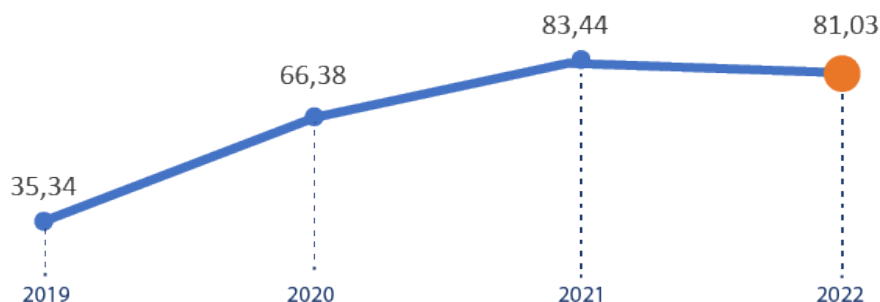
Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, melakukan persiapan dalam merumuskan kebijakan daerah terkait kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Kedua, mengkoordinasikan proses perumusan kebijakan daerah di bidang tersebut. Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam ranah kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Keempat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam aspek kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Kelima, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang relevan dengan tugasnya.





Dengan mengemban berbagai tugas dan fungsi ini, Biro Organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan daerah di berbagai aspek yang terkait dengan struktur organisasi, analisis jabatan, peningkatan birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola.

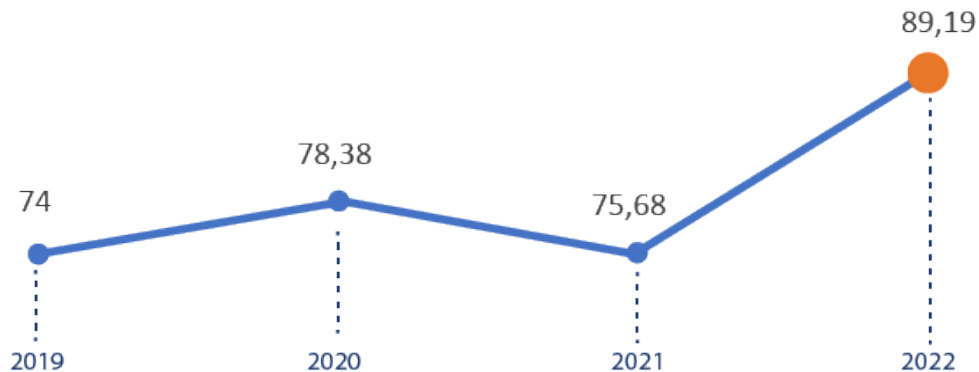
Grafik 4.5.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2019-2022



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan persentase perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar. Pada tahun 2019, hanya 35,34% perangkat daerah yang melakukan SKM sesuai standar, namun angka tersebut meningkat signifikan menjadi 66,38% pada tahun 2020, dan terus melonjak menjadi 83,44% pada tahun 2021. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 81,03%, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam pelaksanaan SKM yang sesuai standar oleh perangkat daerah.

Grafik 4.5.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2019-2022



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan persentase perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh predikat minimal B (Baik) pada evaluasi nilai akuntabilitas kinerjanya. Tampak bahwa angkanya menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2019, sebanyak 74% perangkat daerah mencapai predikat B, dan angka tersebut sedikit meningkat menjadi 78,38% pada tahun 2020. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 75,68%, namun angka ini kembali naik signifikan menjadi 89,19% pada tahun 2022.

Tabel 4.5.1 Indikator sdgs Biro Organisasi, 2019-2022

Indikator SDGs (1)	Tahun			
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	2,20	1,12	0,12	0,28

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.5.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2019-2022

Indikator (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	76,55	77,67	77,82	78,1
2. Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK) (%)	74	78,38	75,68	89,19
3. Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	-	-	-	-
4. Nilai Reformasi Birokrasi	69,5	68,1	68,47	67,7
5. Presentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK (%)	87	90	92	91,89
6. Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan (%)	60,53	63,04	63,04	82,22
7. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	35,34	66,38	83,44	81,03

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.5.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2019-2022

Organisasi Daerah	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekretariat Daerah	1	1	1	1
Jumlah Biro	9	9	9	9
Sekretariat DPRD	1	1	1	1
Dinas Daerah	22	22	22	22
Jumlah Dinas	21	21	21	21
Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1
Badan Daerah	10	10	10	10
Jumlah Badan	9	9	9	9
Inspektorat	1	1	1	1
Sekretariat KORPRI	1	0	0	0
Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	61	72	72	73
Jumlah Perangkat Daerah	38	38	38	37

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

4.6 Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah bertugas untuk memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam beberapa aspek penting. Tugas ini meliputi persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah memiliki sejumlah fungsi yang esensial. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan daerah terkait dengan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam aspek pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berhubungan dengan tugasnya.

Dengan peran dan fungsi yang dimiliki, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah berkontribusi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan, otonomi daerah, serta kerja sama antar daerah. Dalam hal ini, biro ini memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang dapat mempengaruhi pemerintahan dan otonomi daerah, serta kerja sama di tingkat daerah.

Grafik 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku, 2019-2022



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah perjanjian kerjasama yang masih berlaku antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan daerah lain dari tahun 2019 hingga 2022. Tampak pada tahun 2019, terdapat 29 kesepakatan bersama dalam kerjasama dalam negeri, yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 10 pada tahun 2020 dan terus menurun menjadi 8 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang tajam menjadi 31 kesepakatan. Di sisi perjanjian kerjasama dalam negeri, data mulai tercatat pada tahun 2020 dengan jumlah 13 perjanjian kerjasama, lalu turun menjadi 2 perjanjian kerjasama pada 2021, dan melonjak menjadi 29 pada tahun 2022. Dalam kerjasama luar negeri, belum ada data kesepakatan bersama pada periode 2019 hingga 2021, dan baru terdapat 13 kesepakatan bersama luar negeri pada tahun 2022. Sementara itu, perjanjian kerjasama luar negeri tercatat dengan hanya 1 perjanjian kerjasama pada tahun 2019, dan tidak ada perjanjian kerjasama luar negeri pada tahun-tahun berikutnya.



Tabel 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain Yang Masih Berlaku, 2016-2022

No	Nama Variabel	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesepakatan Bersama (Kerjasama Dalam Negeri)	39	65	33	29	10	8	31
2	Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Dalam Negeri)	9	5	1	0	13	2	29
3	Kesepakatan Bersama (Kerjasama Luar Negeri)	3	2	1	0	0	0	13
4	Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Luar Negeri)	1	1	1	1	0	0	0

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.6.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Unsur Nama Rupabumi yang dibakukan (Gazertir Nasional)		485	485
2. Pembentukan Daerah otonomi baru - Pemekaran Kab/Kota	-	-	-
3. Pembentukan Daerah otonomi baru - Pemekaran Kecamatan	2	-	-
4. Persentase Batas Administrasi Wilayah yang diselesaikan (%)	69,91	76,74	76,74
5. Jumlah Penetapan Lokasi dan Pendelegasian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	10	8	13

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

4.7 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Hukum bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas ini mencakup persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum memiliki fungsi yang penting. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan daerah terkait dengan peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam ranah peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi

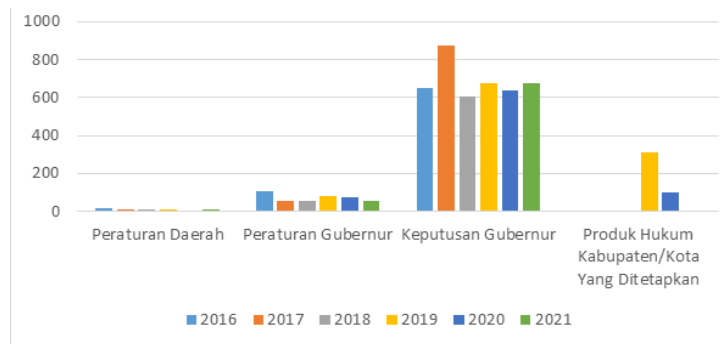


pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Melalui peran dan fungsi ini, Biro Hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan bantuan hukum yang

diperlukan. Biro ini berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mengikuti landasan hukum yang berlaku, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor hukum.

Grafik 4.7.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah produk hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 hingga 2021. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun, Keputusan Gubernur selalu mendominasi. Secara konsisten, jumlah Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari tahun ke tahun selalu diatas 600 keputusan gubernur. Peraturan Daerah selalu menjadi yang paling sedikit, dengan yang terbanyak terjadi pada tahun 2016 dengan 17 peraturan daerah. Sementara itu, jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan menunjukkan tren yang berbeda, dengan lonjakan drastis dari tidak ada data pada tahun 2018 menjadi 311 produk pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 99 produk pada tahun 2020, dan kembali ke nol pada tahun 2021.

Tabel 4.7.1 Daftar Data Prioritas Tahun 2022

No	Prioritas	2022
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Permohonan Perlindungan (Pengaduan)	7
2	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual	0
3	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Korupsi	0
4	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Lainnya	0
5	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	0
6	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	0
7	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penganiayaan Berat	0
8	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penyiksaan	0
9	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Perdagangan Orang	0
10	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Terorisme	0
11	Proposi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	0
12	Jumlah paten granted (Domestik)	0
13	Jumlah Permohonan Paten memenuhi syarat administrasi formalin KI Domes	0
14	Data Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	0
15	Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi	27

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.7.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2021

Klasifikasi Produk Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peraturan Daerah	17	8	11	10	4	8
Peraturan Gubernur	109	56	58	78	76	56
Keputusan Gubernur	652	875	604	676	637	676
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	0	0	0	311	99	-

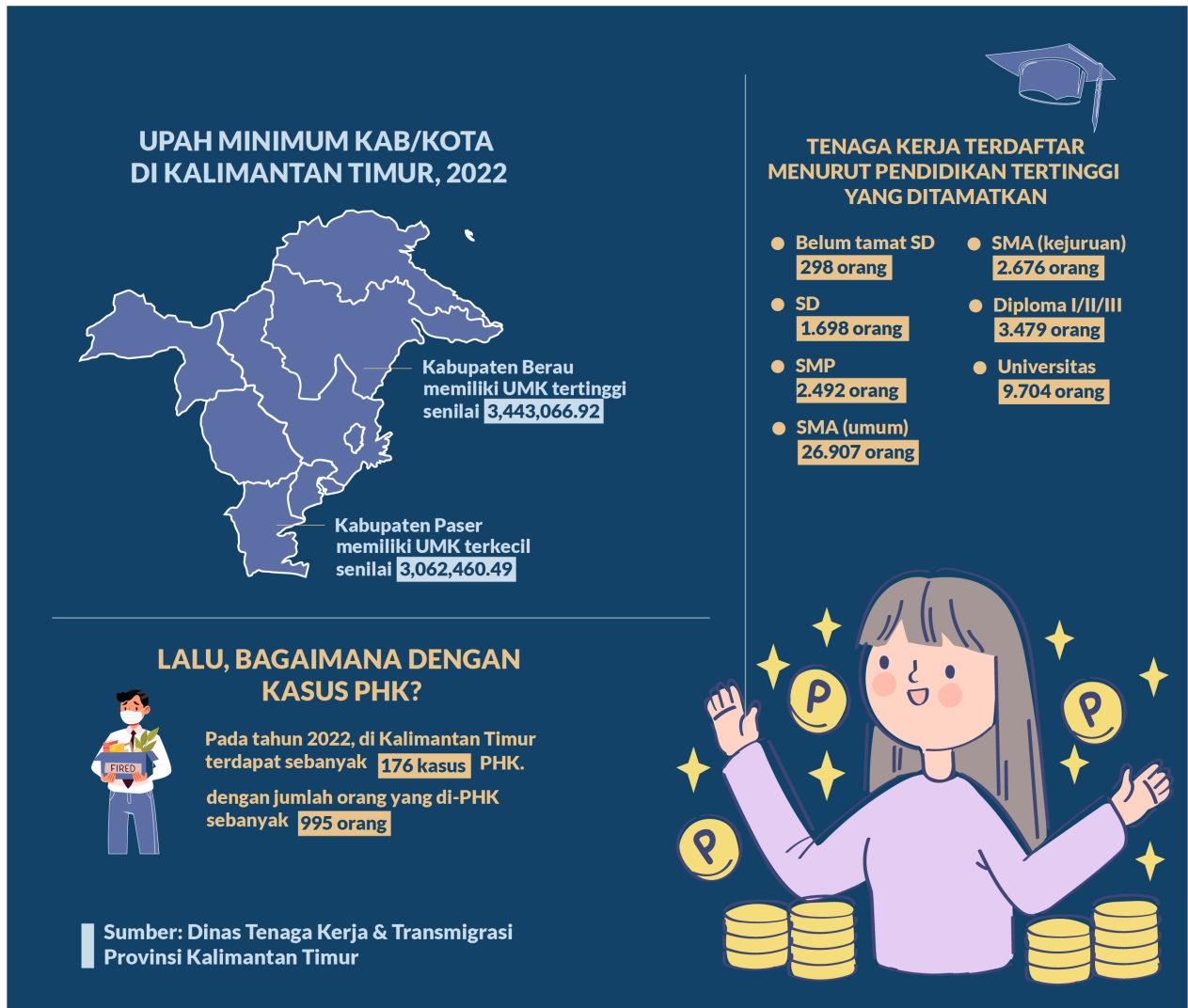
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



× × × × × ×
× × × × × ×

× × × × × × × × × ×



BAB V

PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPÉRASÍ DAN MODAL

5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki tanggung jawab dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi melaksanakan berbagai fungsi penting.

Fungsi-fungsi yang diemban oleh dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Pelayanan umum di sektor tenaga kerja dan transmigrasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas ini.

Dalam upaya mengembangkan tenaga kerja, dinas ini memiliki peran dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja. Pada sisi lain, dinas ini juga turut bertanggung jawab untuk kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja. Terakhir, dinas ini berperan dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi.

Dengan melaksanakan berbagai fungsi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki peran penting dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat provinsi. Dinas ini turut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan daerah, serta memberikan pelayanan yang efektif dalam sektor ini.



Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja dan Jumlah Tenaga kerja, 2016-2022



Grafik data Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga 2022 menggambarkan tren fluktuatif dalam jumlah tenaga kerja. Terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2016 hingga 2018, dengan jumlah mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan 478,172 tenaga kerja. Namun, pada tahun 2019, terjadi stagnasi dengan angka yang sama, dan tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam, mungkin akibat dampak pandemi COVID-19. Tren kembali positif pada tahun 2021 dan 2022. Di sisi lain, data Pencari Kerja yang Mendaftar menunjukkan fluktuasi yang serupa dengan peningkatan pada beberapa tahun dan penurunan pada tahun lainnya, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur, yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Tabel 5.1.1 Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2016-2022

No	Nama Variabel	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Ketenagakerjaan	4	4	4	4	4	4	6
2	Balai Pelatihan Kerja (BLK)	2	2	2	2	2	2	2
3	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	297	297	297	297	297	139	148
4	Perizinan Ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha	586	497	602	281	35	230	285
6	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	247	180	271	281	7	94	269
7	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	42,15	36,22	45,02	100	57,14	40,87	94,39
8	Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	7	6	13	15	5	10	-
9	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan	5 625	6 144	6 292	6 292	8 074	10	17 822
10	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Pada Tahun Berjalan	5 625	6 144	6 292	6 292	8 074	10 489	17 822
11	Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.2 Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2022

Variabel	2016
(1)	(2)
Data Lembaga K3	71
Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online	17 822
Data lembaga pengawasan di Pusat (Direktorat Teknis) dan Daerah (Korwil, Satwasker, UPTD)	7
Data Perusahaan yang Disidik	15
Jumlah perusahaan yang berperan memperkerjakan penyandang disabilitas	56
Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	52
Data Peserta BPJS ketenagakerjaan	15 026
Jumlah perusahaan yang mendapatkan uji K3	712 176
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	233
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	233
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	233
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	233
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan	233
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	115
Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	17 822

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2022

No	TAHUN	2022
(1)	(2)	(3)
1	Data Lowongan pekerjaan terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	16 433
2	Data Pencari kerja terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	47 254
3	Data Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	12 334
4	Data Informasi Jabatan	-
5	Data Tenaga Kerja Tersertifikasi	973 700
6	Data Lembaga Pelatihan Kerja	148
7	Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	90
8	Data Peserta Pemagangan Luar Negeri	0
9	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	400
10	Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	75
11	Jumlah Calon Wirausaha hasil binaan TKM yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis/pendampingan	0
12	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha	0
13	Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan	0
14	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1
15	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	1
16	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0
17	Persentase penganggur yang dilatih	0
18	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	0
19	Persentase penyerapan lulusan	0
20	Persentase LPK yang terakreditasi	0
21	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
22	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0
23	Data tingkat produktivitas total.	
24	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	0
25	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	22
26	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	3
27	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	0
28	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	16 433
29	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	21
30	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi	14
31	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	12 334

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar			Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Paser	2 003	589	2 592	411	51	462	613	44	657
2. Kutai Barat	2 306	810	3 116	340	48	388	340	48	388
3. Kutai Kartanegara	10	3 622	13 622	1 17	176	1 343	323	12	335
4. Kutai Timur	3 209	606	3 815	481	766	5 58	2 193	292	2 485
5. Berau	5 095	1 12	6 215	2 25	30	2 282	2 252	30	2 282
6. Penajam Paser Utara	921	228	1 149	39	5	44	364	83	447
7. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Balikpapan	2 493	1 584	4 077	763	60	823	1 182	448	1 63
9. Samarinda	2 141	2 12	4 261	1 29	1 302	2 59	961	917	1 878
10. Bontang	6 013	2 394	8 407	2 59	335	2 921	1 963	269	2 232
Kalimantan Timur	34 181	13 073	47 254	13 7	2 773	16 433	10 191	2 143	12 334

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	-	-	-
Tidak/belum tamat SD	238	60	298
Sekolah Dasar	1 57	128	1 698
Sekolah Menengah Pertama	2 132	360	2 492
Sekolah Menengah Atas (Umum	20 947	5 96	26 907
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan	2 247	429	2 676
Diploma I/II/III/Akademi	1 728	1 751	3 479
Universitas	5 319	4 385	9 704
Jumlah/Total	34 181	13 073	47 254

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	UMK/UMP	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	
		Rupiah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Paser	3 062 460,49	12 460,49	0,41
2. Kutai Barat	3 320 596,99	10 596,99	0,32
3. Kutai Kartanegara	3 199 654,80	19 981,80	0,63
4. Kutai Timur	3 175 427,45	35 329,45	1,13
5. Berau	3 443 066,92	30 735,92	0,9
6. Penajam Paser Utara	3 369 306,64	5 496,85	0,16
7. Mahakam Ulu
Kota/Municipality			
1. Balikpapan	3 118 397,22	49 081,56	1,6
2. Samarinda	3 137 675,60	25 519,20	0,82
3. Bontang	3 226 486,78	43 781,00	1,38
Kalimantan Timur	3 014 497,22	33 118,50	1,11

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.7 data realisasi pelaksanaan pelatihan pada uptd blki balikpapan provinsi kaltim tahun 2018-2020

No	Realisasi Pelatihan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Pendaftar	1 449	1 885	1 855
2	Jumlah Peserta Pelatihan	720	704	368
3	Kelulusan Kompeten	659	683	354
4	Kelulusan Belum Kompeten	45	21	14
5	Realisasi Penempatan Instansi Pemerintah / Swasta	245	305	76
6	Realisasi Wirausaha	174	288	112

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2016-2022

No	Nama Variabel	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pencari Kerja yang Mendaftar	29 863	45 834	49 552	26 148	30 719	22 358	47 254
2	Pencari Kerja yang Ditempatkan	5 982	10 365	11 266	7 690	5 538	3 531	12 334
3	Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03	15,79	26,10
4	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Laki-Laki	13 396	22 133	19 022	26 258	15 658	13 120	23 990
5	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Perempuan	6 119	10 746	7 947	9 900	7 161	5 707	10 930
6	Jumlah Perusahaan Terdaftar	6 485	6 144	6 292	6 292	8 074	10 489	17 822
7	Kasus PHK	510	525	520	173	28	170	176
8	Orang Terkena PHK	3 605	2 264	2 269	1 702	181	2 298	995
9	Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	2 161 253	2 339 556	2 543 331	2 747 561	-	-	-
10	Upah Minimum Provinsi	2 161 253	2 339 556	2 543 331	2 747 561	2 981 378	2 981 378	3 014 497
11	Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	2 161 253	2 339 556	2 543 331	2 747 561	2 981 378	2 981 378	3 249 613
12	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	6 485	6 144	6 292	13 445	13 337	16 713	15 026
13	Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	100	100	100	213,68	165,18	159,34	84,31
14	Jumlah Tenaga Kerja	438 621	465 895	478 172	478 172	130 462	232 129	343 471
15	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	358 826	449 465	478 172	830 065	819 665	681 594	686 897
16	Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	81,81	96,47	100	173,59	628,28	293,63	-
17	Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	20	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah Perusahaan	5 625	6 144	6 292	6 292	8 074	10 489	17 822
19	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	5 625	6 144	6 292	6 292	8 074	10 489	17 822
20	Produktivitas Tenaga Kerja	277,63	293,86	287,23	274 478 122	287 676,24	281 509 140	289 743 610
21	Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	318	270	16	340	-	80	-
22	Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kontruksi yang terserap oleh pasar kerja	80	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah Peserta Pelatihan BLK	-	240	896	896	672	816	896
24	Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	-	152	594	896	403	450	429
25	Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	-	63,33	66,29	100	59,97	55,15	47,88

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2016-2022

No	Nama Variabel	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Transmigrasi	81 295	81 295	40	-	-	15	5
2	Transmigrasi Umum (TU)	71 145	71 145	40	-	-	15	5
3	Transmigrasi Swakarsa	10 150	10 150	-	-	-	-	-
4	Jumlah Kawasan Transmigrasi	6	6	8	-	-	-	3
5	Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	203 393	330 369	330 369	-	-	-	-
6	Persentase Transmigrasi Swakarsa	12	12	-	-	-	-	-

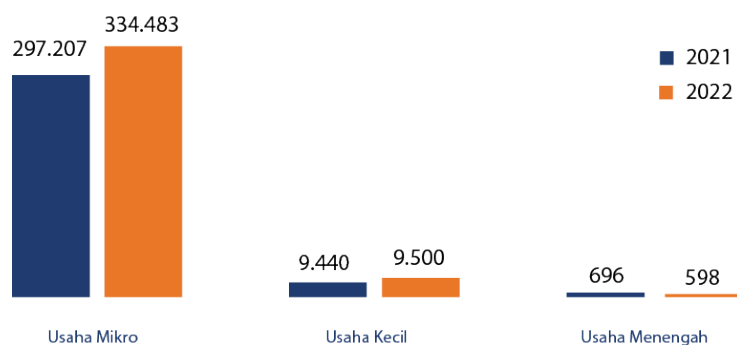
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

5.2 Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas ini, dinas ini memegang fungsi penting yang mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, dinas ini memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi perkembangan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM di provinsi tersebut, dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi penting.



Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022



Sumber: Dinas Perindagkop UKM

Grafik batang yang disajikan memperlihatkan jumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, terdapat 297,207 Usaha Mikro, 9,440 Usaha Kecil, dan 696 Usaha Menengah. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan di berbagai sektor usaha.



Jumlah Usaha Mikro naik menjadi 334,483, menunjukkan pertumbuhan yang substansial. Usaha Kecil juga mengalami peningkatan menjadi 9,500, meskipun kenaikan ini tidak sebesar Usaha Mikro. Namun, Usaha Menengah mengalami penurunan menjadi 598 pada tahun 2022, mengindikasikan perubahan dinamika di sektor ini.



Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2021-2022

No	UMKM	Tahun	
		2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Usaha Mikro	297 207	334 483
2	Usaha Kecil	9 440	9 500
3	Usaha Menengah	696	598
4	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Aneka Usaha	1 489 515	1 675 405
5	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Perdagangan	47 200	47 500
6	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Pertanian	-	-
7	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Non Pertanian	-	-

Sumber: Dinas Perindagkop UKM

Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Realisasi Pelatihan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Paser	193	322	59.94
2. Kutai Barat	259	768	33.72
3. Kutai Kartanegara	489	704	69.46
4. Kutai Timur	687	1 154	59.53
5. Berau	282	440	64.09
6. Penajam Paser Utara	76	270	28.15
7. Mahakam Ulu	27	125	21.60
Kota/Municipality			
1. Balikpapan	429	576	74.48
2. Samarinda	288	1 270	22.68
3. Bontang	70	82	85.37
Provinsi/Province			
Binaan Kalimantan Timur	85	98	86.73

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Keegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah KUD	205	205	205	206	206	206
2. Anggota Koperasi Unit Desa	7 085	4 788	5 648	5 854	6 220	3 837
3. Volume Usaha	4 228	7 765	15 070	65 653	13 249	12 155
4. Modal	12 859	17 143	29 929	21 890	61 681	52 714
5. Sisa Hasil Usaha	683	776	1 319	2 298	1 602	3 632

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, 2016-2020

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapatkan binaan Pemda	76	0	0	0	0
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	76	30	0	0	0
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.5 Cakupan bina kelompok pengrajin, 2016-2020

Cakupan bina kelompok pengrajin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	0	0	0	50	160
Jumlah Kelompok Pengrajin	0	0	0	452	813
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.6 Data IKM Berorientasi Ekspor, 2016-2021

IKM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah IKM Yang Berorientasi Ekspor	1	15	13	15	0	34

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.7 data indikator rpjmd, 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi	0	0	0	13,33	11,76	21,05
Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0	0	0	1,83	2,17	2,19
Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	4	4	4	4	3	3
Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0	0	0	27	29	27
Presentase peningkatan jumlah customer yang dilayani	0	0	0	19	16	17,8
Persentase Sumbangan Koperasi terhadap PDRB	0	0	0	4,5	4,5	1,7

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.8 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2016-2022

Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koperasi Primer	4 971	5 169	5 394	5 493	5 598	5 724	5 790
Koperasi Sekunder	15	15	12	21	21	21	21

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2016-2022

Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koperasi Produsen	891	1 021	1 231	1 268	1 286	1 322	1 374
Koperasi Konsumen	3 800	3 741	3 662	3 702	3 753	3 780	3 815
Koperasi Jasa	109	206	263	317	345	393	433
Koperasi Simpan Pinjam	135	168	180	147	149	151	155

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.10 Data Koperasi, 2016-2022

Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Koperasi Aktif	3 473	3 683	3 428	2 832	2 751	2 844	2 885
Jumlah Koperasi Pasif	1 693	1 501	1 978	2 832	2 868	2 832	2 924
Jumlah anggota koperasi Laki-laki	307 360	92 890	86 297	82 054	57 381	68 580	72 858
Jumlah anggota koperasi Perempuan	145 382	28 565	26 842	27 978	17 984	20 885	22 024
Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	499	665	657	583	351	457	446
Volume Usaha Koperasi	1 977	1 042 484	1 309 258	751 576	816 914	1 123 689	1 297 515
Jumlah KUD	214	209	212	205	204	205	206
Jumlah non KUD	4 799	4 975	5 194	5 320	5 415	5 540	5 686
Jumlah Koperasi Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Koperasi Aktif	62,62	71,05	63,41	51,26	48,96	50,11	49,66
Jumlah Koperasi Sehat	-	-	-	583	344	457	446

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.11 Data Potensi Industri, 2016-2021

Potensi Industri	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Industri Besar	297	259	154	247	208	274
Jumlah Industri Kecil Menengah	9 267	10 677	10 397	13 194	17 128	16 148
Penyerapan Tenaga Kerja	23 333	26 495	50 144	70 636	89 759	33 289
Nilai Investasi	15 079 602	15 244 122	853 460	1 104 663	1 366 449	1 316 248
Jumlah Industri Inti Pengolahan Khas Daerah	2	2	-	-	-	-
Volume Usaha Kawasan Industri	93	93	-	-	-	-
Kontribusi Olahan Non Migas Terhadap PDRB	20,63	19,08	18,27	17,00	18,90	7,79
Jumlah Koperasi Sehat	0	0	0	583	344	457

Tabel 5.2.12 Data UMKM, 2021-2022

UMKM	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Usaha Mikro	297 207	334 483
Usaha Kecil	9 440	9 500
Usaha Menengah	696	598
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Aneka Usaha	1 489 515	1 675 405
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Perdagangan	47 200	47 500
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Pertanian	0	0
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Non Pertanian	0	0

Tabel 5.2.13 Jumlah koperasi menurut prinsip keuangan, 2016-2022

Jenis Prinsip Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koperasi Konvensional	4 997	5 178	5 396	5 504	5 610	5 734	5 799
Koperasi Syariah	7	6	10	10	9	12	12

Tabel 5.2.14 Data Jumlah Pasar, 2018-2022

Jenis Pasar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pasar Tradisional	264	307	346	403	404	5.734	5.799
Pasar Modern	362	184	214	456	456	12	12

Tabel 5.2.15 Data Jumlah UMKM Potensi Ekspor, 2021-2022

Jenis Pasar	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Jumlah UKM Potensial Ekspor	34	50

5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam menjalankan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas ini, dinas ini memiliki beberapa fungsi penting.

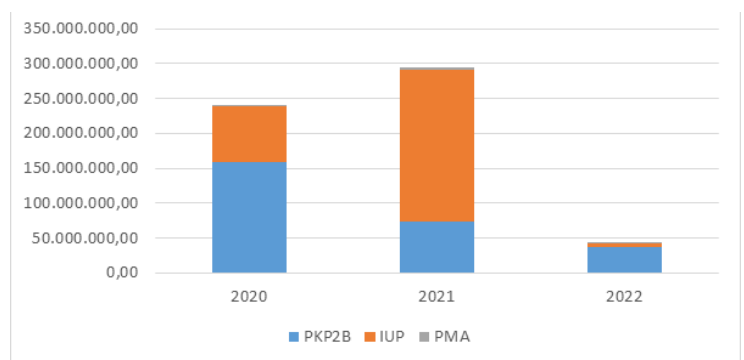
Fungsi-fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dinas ini memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Fokusnya mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi.



Selain tugas-tugas utama tersebut, dinas juga melaksanakan urusan kesekretariatan, membina kelompok jabatan fungsional, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran krusial dalam mengelola sumber daya energi dan mineral, serta mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Grafik 5.3.1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2022



Grafik batang tersebut menggambarkan data Produksi Batubara Menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur dalam ton untuk tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut dibagi menjadi tiga jenis perusahaan: PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan PMA (Penanaman Modal Asing).

Pada tahun 2020, produksi batubara oleh perusahaan PKP2B mencapai 157.938.770,85 ton, menjadi kontributor terbesar dalam produksi batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, produksi batubara oleh perusahaan IUP sebesar 81.253.379,20 ton, menunjukkan kontribusi yang signifikan. Namun, produksi oleh perusahaan PMA pada tahun yang sama relatif kecil, hanya mencapai 1.168.505,79 ton. Kemudian, terjadi perubahan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Produksi batubara oleh perusahaan PKP2B menurun tajam menjadi 73.959.294,46 ton pada tahun 2021 dan kemudian turun lebih jauh menjadi 36.199.791,52 ton pada tahun 2022. Sementara itu, perusahaan IUP mengalami lonjakan produksi yang dramatis, meningkat dari 81.253.379,20 ton pada tahun 2020 menjadi 217.603.472,56 ton pada tahun 2021, tetapi mengalami penurunan tajam menjadi 5.219.906,04 ton pada tahun 2022. Perusahaan PMA juga mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan selama periode yang sama, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Dari data ini, terlihat bahwa dinamika industri batubara di Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam jenis perusahaan yang terlibat dalam produksi. Perusahaan IUP, pada khususnya, mengalami fluktuasi yang kuat dalam produksi batubara mereka, sementara perusahaan PKP2B mengalami penurunan yang signifikan selama dua tahun terakhir. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan peraturan, investasi, dan pasar global batubara. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendasari perubahan dalam produksi batubara di Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022

No	DATA PERTAMBANGAN	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Produksi Minyak Bumi (Barel)	21 038 829,00	19 926 846,23	17 742 360,00	8 139 880,60
2	Produksi Gas Alam (MMBTU)	231 067 411,00	203 955 179,70	172 829 530,00	82 885 772,80
3	Produksi Batubara PKP2B (Ton)	147 345 965,00	121 447 164,00	73 959 294,46	n/a
4	Produksi Batubara KP/IUP (Ton)	95 807 903,93	84 583 158,65	220 293 507,20	n/a
5	Total Produksi Batubara (PKP2B+KP/IUP) (Ton)	243 203 868,90	206 030 322,70	294 252 801,70	n/a
6	Jumlah Perusahaan Batubara (Izin)	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00
7	Persentase Area Yang Direhabilitasi Dari Lahan Terganggu (Persen)	57,12	47,65	47,65	39,00
8	Reklamasi Batubara (Ha)	98,18	3 543,57	3 543,57	10 869,50
9	Luas Penambangan Liar Yang Diterbitkan (Ha)	2,00	1,02	2,00	75,50
10	Luas Area Penambangan Yang Liar (Ha)	8,00	2,25	10,00	75,50

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.2 Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2021

Tahun	Minyak Bumi (ribu barrel)	Gas Bumi (ribu MMBTU)
(1)	(2)	(3)
2017	29 755	449 579
2018	23 718	296 83
2019	21 039	231 069
2020	19 297	203 955
2021	17 742	172 83

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.3 Produksi Minyak Bumi (MBBL) dan Gas Bumi (MMBTU) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten /Kota	Minyak Bumi (ribu barrel)	Gas Bumi (ribu MMBTU)
(1)	(2)	(3)
1. Paser		
2. Kutai Barat		
3. Kutai Kartanegara	11 131	89 927
4. Kutai Timur	475	
5. Berau		
6. Penajam Paser Utara	552	4 643
7. Mahakam Ulu		
1. Balikpapan		
2. Samarinda	195	282
3. Bontang	595	186
Kalimantan Timur	4 794	77 792
Jumlah/Total	17 742	172 83

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.4 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2022

Kabupaten /Kota	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
(1)	(2)	(3)
1. Paser	100	90,11
2. Kutai Barat	100	93,00
3. Kutai Kartanegara	100	86,82
4. Kutai Timur	100	85,14
5. Berau	100	92,37
6. Penajam Paser Utara	100	83,14
7. Mahakam Ulu	100	89,16
1. Balikpapan	100	95,75
2. Samarinda	100	100,00
3. Bontang	100	92,27
Kalimantan Timur	100	93,09

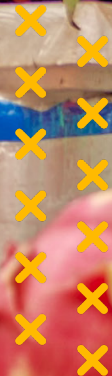
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2016-2022

Tahun	Pertambangan dan Penggalian	Batubara	Minyak dan Gas	Batuan Mineral Bukan Logam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	4 163 690 372,00	4 153 297 886,00	9 571 843,00	820 643,21
2017	4 163 689 872,00	4 153 297 886,00	9 571 843,00	820 143,35
2018	4 163 689 872,00	4 153 297 886,00	9 571 843,00	820 143,35
2019	4 163 689 872,00	4 153 297 886,00	9 571 843,00	820 143,35
2020	4 161 728 667,00	4 153 297 886,00	7 610 638,00	820 143,35
2021	4 160 249 203,00	4 153 297 886,00	613 117 381,00	4 160 249 203,00
2022	4 160 249 203,00	4 153 297 886,00	613 117 381,00	4 160 249 203,00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan



Kota Samarinda
 Kab/kota dengan objek pajak kendaraan bermotor **paling banyak**

813228

Kabupaten Penajam Paser Utara
 Kab/kota dengan objek pajak kendaraan bermotor **paling sedikit**

94654



OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEDAN
13198

MINIBUS
246378

PICKUP
127436

TRUCK
54253

SEPEDA MOTOR
2397362

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI

EKONOMI DAN KEUANGAN

6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Bappeda bertugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

Tabel 6. 1. 1 Data Topografi Provinsi Kalimantan Timur , 2016-2020

Topografi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Datar (0-2 Derajat)	1 341 015	1 341 015	1 341 015	1 341 015	1 341 015	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Bergelombang (2-15 Derajat)	2 025 952	2 025 952	2 025 952	2 025 952	2 025 952	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Curam (15-40 Derajat)	3 733 152	3 733 152	3 733 152	3 733 152	3 733 152	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Sangat Curam (>40 Derajat)	5 433 568	5 433 568	5 433 568	5 433 568	5 433 568	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (0 - 7 M)	515 655	515 655	515 655	515 655	515 655	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (7 - 25 M)	2 224 402	2 224 402	2 224 402	2 224 402	2 224 402	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (25 - 100 M)	2 974 648	2 974 648	2 974 648	2 974 648	2 974 648	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (100 - 500 M)	2 988 550	2 988 550	2 988 550	2 988 550	2 988 550	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (500 - 1000 M)	1 806 001	1 806 001	1 806 001	1 806 001	1 806 001	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (> 1000 M)	585 251	585 251	585 251	585 251	585 251	Ha

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Topografi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Wilayah Daratan	12 638 893	12 638 893	12 638 893	12 638 893	12 638 893	Ha
Luas Wilayah Perairan Darat	95 799	95 799	95 799	95 799	95 799	Ha
Luas Pengelolaan Laut (0-12 Mil)	3 997 374	3 997 374	3 997 374	3 997 374	3 997 374	Ha
Jarak	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.1.3 Luas Pengelolaan Laut dan jarak Provinsi Kalimantan Timur 2017-2022

Topografi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Pengelolaan Laut (Ha)	3 997 373,71	3 997 373,71	3 997 373,71	3 997 373,71	3 997 373,71	3 997 373,72
Jarak (km)	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meliputi perumusan kebijakan teknis dalam bidang keuangan dan aset sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah, perencanaan, pengendalian, dan pembinaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pengelolaan barang milik daerah. BPKAD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini, termasuk evaluasi, pelaporan, dan administrasi sesuai dengan tugasnya. Selain itu, BPKAD juga menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berhubungan dengan tugasnya.



Tabel 6.2.1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)
BELANJA	10 254 745 123 477,00	7 988 479 154 623,68
BELANJA OPERASI	7 046 915 098 849,00	6 001 780 302 943,06
Belanja Pegawai	3 061 713 870 381,00	2 334 585 774 590,65
Belanja Barang dan Jasa	3 519 334 778 738,00	3 184 224 252 607,41
Belanja Bunga	-	-
Belanja Hibah	413 141 769 730,00	432 031 575 745,00
Belanja Bantuan Sosial	52 724 680 000,00	50 938 700 000,00
BELANJA MODAL	2 648 734 000 439,00	1 980 010 052 267,62
Belanja Modal Tanah	118 295 395 894,00	85 070 184 052,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 002 333 447 141,00	755 306 193 523,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	673 862 728 329,00	421 588 596 942,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	835 584 996 128,00	702 083 801 381,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18 657 432 947,00	15 961 276 368,00
BELANJA TAK TERDUGA	559 096 024 189,00	6 688 799 413,00
Belanja Tak Terduga	559 096 024 189,00	6 688 799 413,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.2 Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan TA 2021 – 2022

Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Setda	1	1	1	1
Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	3
Kantor Inspektorat	1	1	1	1
Kantor Bappeda	2	2	2	2
Kantor Dinas Daerah	259	259	259	259
Kantor Lembaga Teknis Daerah	59	59	59	59

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.3 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)
Transfer	4 425 132 930 123,00	4 405 266 678 744,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3 562 287 930 123,00	3 542 721 678 744,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3 562 287 930 123,00	3 542 721 678 744,00
Transfer Bantuan Keuangan	862 845 000 000,00	862 545 000 000,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	862 845 000 000,00	862 545 000 000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	5 000 000 000,00
Surplus / (Defisit)	-2 210 336 579 974,00	4 410 947 942 645,05

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.4 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)
Pendapatan	12 469 541 473 626,00	16 804 693 776 012,70
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	7 073 973 609 315,00	8 997 262 537 257,73
Pendapatan Pajak Daerah	5 844 145 000 000,00	7 623 597 479 495,64
Pendapatan Retribusi Daerah	15 858 203 500,00	19 980 889 916,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	334 220 317 815,00	310 262 666 521,63
Lain-Lain Pad Yang Sah	879 750 088 000,00	1 043 421 501 324,15
Pendapatan Transfer	5 382 823 864 311,00	7 790 284 158 755,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5 345 654 403 311,00	7 753 114 697 755,00
Bagi Hasil Pajak	753 793 832 107,00	723 737 021 877,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 024 383 398 204,00	5 605 709 091 626,00
Dana Alokasi Umum (Dau)	828 907 266 000,00	824 108 986 889,00
Dana Alokasi Khusus (Dak)	738 569 907 000,00	599 559 597 363,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	37 169 461 000,00	37 169 461 000,00
Dana Penyesuaian (Did)	37 169 461 000,00	37 169 461 000,00
Bantuan Keuangan	-	-
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kota	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12 744 000 000,00	17 147 080 000,00
Pendapatan Hibah	12 744 000 000,00	17 147 080 000,00
Pendapatan Lainnya		-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.5 Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan Milik Sendiri Sewa Pinjam Gabung Tahun 2019-2022

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Setda	1	1	1	1
Milik Sendiri	1	1	1	1
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	0	0	0	0
Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	3
Milik Sendiri	3	3	3	3
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	0	0	0	0
Kantor Inspektorat	1	1	1	1
Milik Sendiri	0	0	0	0
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	1	1	1	1
Kantor Bappeda	2	2	2	2
Milik Sendiri	2	2	2	2
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	0	0	0	0
Kantor Dinas	259	259	259	259
Milik Sendiri	259	259	259	259
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	0	0	0	0
Kantor Lembaga Teknis Daerah	57	57	57	57
Milik Sendiri	57	57	57	57
Sewa	0	0	0	0
Pinjam	0	0	0	0
Gabung	0	0	0	0

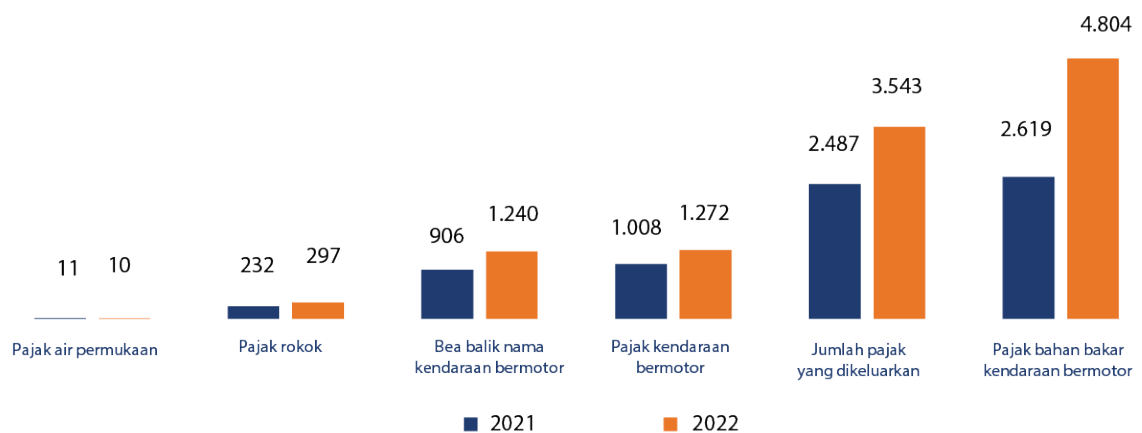
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.3 Badan Pendapatan Daerah

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) merupakan badan yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, Bapenda memiliki 5 fungsi yaitu: (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, (2) Pelaksanaan Pelayanan umum lintas kabupaten/kota, (3) Pembinaan Teknis di bidang Pendapatan, (4) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan (5) Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 kecuali untuk kategori pajak air permukaan. Realisasi pajak air permukaan menurun dari tahun 2021 ke 2022 dari sebesar Rp 10.897.465.989,00 menjadi Rp 9.543.685.938,00.

Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022



Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2022

URAIAN	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pajak kendaraan bermotor	1 007 720 000 000,00	1 271 895 140 197,00
Bea balik nama kendaraan bermotor	905 585 000 000,00	1 240 322 341 882,00
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	2 618 620 000 000,00	4 804 399 816 223,00
Pajak air permukaan	10 897 465 989,00	9 543 685 938,00
Pajak rokok	232 066 000 000,00	297 436 495 255,00
Jumlah pajak yang dikeluarkan	2 487 210 000 000,00	3 542 721 678 744,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

No	Wilayah	Sedan	Jeep	Minibus	Mikrobus	Bus	Pickup	Truck	Sepeda Motor	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Paser	195	1 011	9 980	224	58	7 600	3 190	163 997	186 255
4	Kutai Barat	48	645	6 966	95	40	4 806	1 705	102 442	116 747
7	Kutai Kartanegara	631	2 324	28 570	450	90	17 997	6 805	432 647	489 514
8	Kutai Timur	271	1 743	18 302	340	164	10 760	5 601	183 510	220 691
10	Berau	140	856	10 106	199	268	7 010	2 698	138 415	159 816
11	Penajam Paser Utara	70	412	4 956	138	11	3 746	2 317	82 998	94 654
18	Balikpapan	6 555	9 400	77 708	1 411	519	36 573	13 332	497 731	643 235
19	Samarinda	3 771	10 023	72 487	1 217	341	33 860	16 565	674 960	813 228
20	Bontang	1 517	2 068	17 303	383	174	5 084	2 040	120 662	149 365
	Jumlah Kendaraan Se Kaltim	13 198	28 482	246 378	4 457	1 665	127 436	54 253	2 397 362	2 873 505

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

INDIKATOR	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Rasio dana alokasi umum terhadap dana perimbangan	20,22%	10,58%
Rasio dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah	8,10%	4,90%
Rasio dana alokasi umum terhadap total belanja apbd	12,32%	6,66%
Persentase pertumbuhan dana alokasi umum	-0,40%	-0,48%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

INDIKATOR	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Rasio dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan	15,55%	7,70%
Rasio dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah	6,23%	3,57%
Rasio dana alokasi khusus terhadap total belanja apbd	9,48%	4,85%
Persentase pertumbuhan dana alokasi khusus	66,07%	-5,85%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Table 6.3.4 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021-2022

JENIS	2021	2022
(1)	(2)	(3)
retribusi jasa umum	2.480.300.000	5.718.620.000
retribusi jasa usaha	10.486.260.861	13.814.974.916
retribusi perizinan tertentu	624.158.200	447.295.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.5 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

Jenis Pendapatan Transfer	PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dana Alokasi Khusus	693 000 000 000	637 000 000 000
Jumlah Dana Alokasi Umum	829 000 000 000	828 000 000 000
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	844 000 000 000	889 000 000 000
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1 780 000 000 000	1 700 000 000 000
Jumlah Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4 140 000 000 000	4 060 000 000 000
Jumlah Dana Bagi Hasil		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 6.3.5

Jenis Pendapatan Transfer	PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dana Alokasi Khusus	738 569 907 000	599 563 058 143
Jumlah Dana Alokasi Umum	828 907 266 000	824 108 986 889
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam		
Jumlah Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5 382 823 864 311	7 790 287 619 535
Jumlah Dana Bagi Hasil	3 778 177 230 311	6 329 446 113 503

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.6 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021-2022

VARIABEL	2021	2022
(1)	(2)	(3)
dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	2.487.211.898.441	3.542.721.678.744
rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain lain pendapatan daerah yang sah	178,87	206,61
rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah	24,34%	21,08%
rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja apbd	37,02%	28,64%
persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	23,85%	42,44%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.4 Biro Perekonomian Setda

Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Biro Perekonomian merupakan unsur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kepala Biro, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tabel 6. 4. 1 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022

Elemen Data	Tahun				Satuan
	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BUMD					
1. Jumlah BUMD	8	8	8	8	unit
2. Jumlah Aset dan Modal BUMD	31,801	36,607	41,039	41,924	Triliun Rp
1. Asset	30,242	30,733	36,114	39,014	Triliun Rp
1). BPD Kaltim	28,929	28,69	30,23	33,13	Triliun Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	0	0,16	0,19	0,19	Triliun Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	0	1,22	1,21	1,22	Triliun Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0	0	0	0	Triliun Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	0,003	0,003	0,004	0,004	Triliun Rp
6). Perusda Ketenagalistrikan	0,14	0,14	0,15	0,15	Triliun Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	1,12	0,51	4,27	4,27	Triliun Rp
8). PT. Jamkrida	0,05	0,01	0,06	0,05	Triliun Rp
2. Modal	1,559	5,874	4,925	2,91	
1). BPD Kaltim	1,21	3,84	3,35	1,31	Triliun Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	0,022	0,157	0,005	0,005	Triliun Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	0	1,22	1,23	1,23	Triliun Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0	0	0	0,027	Triliun Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	0,005	0,003	0,005	0,005	Triliun Rp
6). Perusda Ketenagalistrikan	0,126	0,132	0,126	0,126	Triliun Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	0,146	0,47	0,16	0,16	Triliun Rp
8). PT. Jamkrida	0,05	0,051	0,05	0,051	Triliun Rp

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4.2 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019-2021 Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	9 945	9 962	9 962
Kutai Barat	32 810	31 122	31 122
Kutai Kartanegara	84 587	81 557	81 557
Kutai Timur	37 231	39 518	39 518
Berau	31 425	31 563	31 563
Penajam Paser Utara	10 357	9 993	9 993
Mahakam Ulu	9 309	8 859	8 859
Balikpapan	41 345	37 756	37 756
Samarinda	58 110	57 425	57 425
Bontang	15 029	14 491	14 491
Kalimantan Timur	330 148	322 246	322 246

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

6.5 Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Variabel	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	3	3	1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	WTP	WTP	WTP	WTP
Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	80	80	90	80
Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	44	46	68	35
Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	98	100	92	86,9
Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	66,32	66,67	68,31	52,86
Skor Rata-rata hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota	62,99	63	65	70
Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi	35	100	65	70
Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	100	100	100	98
Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	100	100	100	98
Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	50,34	67,11	67,55	3,23
Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu	97,88	97,88	100	95
Indeks Persepsi Korupsi	65	66,76	67,55	73,04
Kasus KKN	-	2	1	3

Sumber: Bappeda Kaltim

Tabel 6.5.2 Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	28	29	29
Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	13	16	23
Hasil Penilaian Integritas	65	66,76	67,55
Jumlah profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	44	46	68
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	3	3	5
Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	3	3	3
Level Kapasitas APiP	3	3	3

Sumber: Bappeda Kaltim

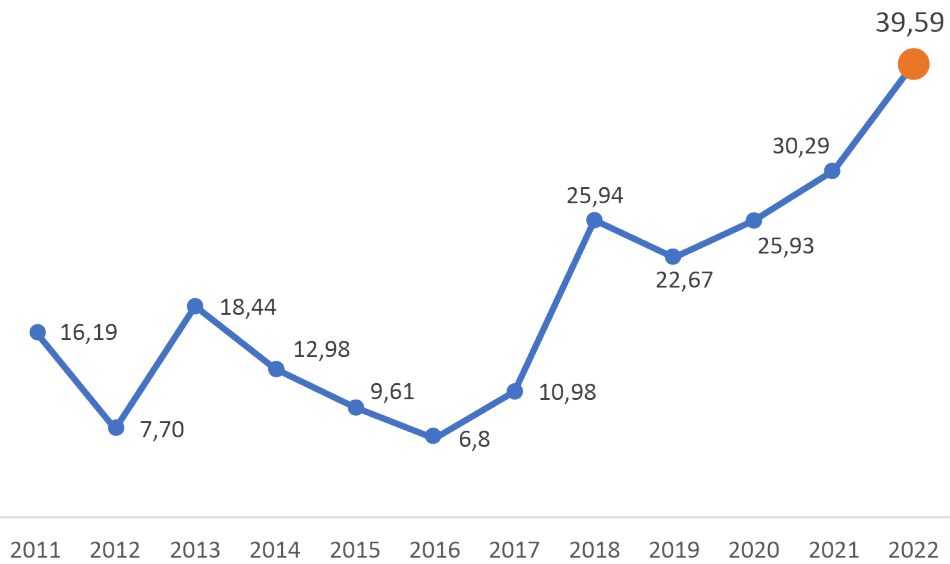
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu yang meliputi perizinan dan non perizinan. Sebagai lembaga penyelenggara PTSP, DPMPTSP berperan dalam memfasilitasi proses investasi dan usaha dengan mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi terkait, mematuhi peraturan terkait pelayanan terpadu, serta berkoordinasi dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi dari tahun 2011-2019, namun jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Visualisasi realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2022 dapat dilihat pada diagram garis berikut:



Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PDMN Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022



Tabel 6.6.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Tahun	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	56	16 196 330,39	12 227	14
2012	44	7 709 270,00	50 240	114
2013	103	18 441 377,30	36 552	6
2014	60	12 983 049,70	9 505	41
2015	143	9 611 313,10	24 825	25
2016	92	6 885 124,60	29 023	30
2017	357	10 980 216,40	9 236	58
2018	520	25 941 962,10	12 935	298
2019	2 227	22 674 053,10	20 837	141
2020	3 924	25 934 008,80	19 952	78
2021	9 291	30 297 382,20	21 596	19
2022	6 706	39 595 633,00	39 753	39

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER				
1. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	403	3 650 818	11 491	2
2. Kehutanan	119	346 854	669	
3. Perikanan	8	2		
4. Pertambangan	563	15 012 379	1 631	17
II. SEKTOR SEKUNDER				
1. Industri Makanan	226	2 390 782	3 427	2
2. Industri Tekstil	2	431	4	
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki				
4. Industri Kayu	49	24 002	20	
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan	5	500	8	
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	95	14 914 625	252	11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 6.6.2

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5	7 209		
8. Industri Mineral Non Logam	25	18 185	69	
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	20	521 797	24	1
10. Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	28	4 382	30	1
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	51	21 487	103	
12. Industri Lainny	46	48 889	250	
III. SEKTOR TERSIER				
1. Listrik, Gas dan Air	57	165 781	20	
2. Konstruksi	818	55 395	539	
3. Perdagangan & Reparasi	2 361	687 631	1 914	4
4. Hotel dan Restoran	379	199 550	719	
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi	453	573 564	950	
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	133	286 655	19	
7. Jasa Lainnya	860	664 718	2 935	1
Jumlah	6 706	39 595 633	39 753	39

Sumber: Bappeda Kaltim

Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KABUPATEN				
1. Paser	281,00	1 616 947,70	2 184,00	5,00
2. Kutai Barat	158,00	2 631 773,80	19,00	
3. Kutai Kartanegara	729,00	10 564 907,70	7 725,00	7,00
4. Kutai Timur	665,00	3 428 929,90	13 379,00	7,00
5. Berau	408,00	2 619 004,00	4 653,00	4,00
6. Penajam Paser Utara	221,00	1 253 095,90	846,00	11,00
7. Mahakam Ulu	18,00	284 958,90	329,00	
KOTA				
1. Balikpapan	185,00	14 681 981,50	3 073,00	3,00
2. Samarinda	1 845,00	1 270 879,50	4 946,00	2,00
3. Bontang	531,00	1 243 154,10	718,00	
Kalimantan Timur	6 706,00	39 595 633,00	39 753,00	39,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2022

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	172	1 348 061	9 001	24
2012	167	2 529 900	35 579	398
2013	351	1 385 409	70 446	561
2014	297	2 145 665	27 055	110
2015	420	2 381 442	6 623	442
2016	471	1 181 859	22 204	350
2017	566	1 285 215	15 508	153
2018	513	587 502	125	68
2019	903	863 099	15 166	100
2020	778	378 027	5 868	92
2021	1 034	745 190	565	140
2022	1 005	1 266 222	16 247	384

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER				
1. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	173	190 013,89	8 379	34
2. Kehutanan	23	37 276,49	88	
3. Perikanan				
4. Pertambangan	151	515 919,94	43	45
II. SEKTOR SEKUNDER				
1. Industri Makanan	133	96 106,59	1 054	6
2. Industri Tekstil				
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki				
4. Industri Kayu	9	1 811,90	115	3
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan				
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	29	60 176,59	29	
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8	136,4	4	
8. Industri Mineral Non Logam	6	216 016,28	739	255
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	30	93 934,69	416	30
10. Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	14	1 967,50	353	2
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	10	10 091,60	24	
12. Industri Lainnya	3			
III. SEKTOR TERSIER				
1. Listrik, Gas dan Air	6			
2. Konstruksi	4			
3. Perdagangan & Reparasi	201	9 497,50	119	
4. Hotel dan Restoran	56	3 682,30	63	
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi	57	16 726,70	205	9
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	22	6 288,90	40	
7. Jasa Lainnya	70	6 574,50	319	
Jumlah/ Total	1 005	1 266 221,77	16 247	384

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Table 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Proyek	realisasi Investasi	TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	43	109 068,58	50	
2. Kutai Barat	58	198 435,49	2 029	22
3. Kutai Kartanegara	138	180 418,48	6 11	48
4. Kutai Timur	143	630 925,93	3 032	290
5. Berau	79	49 370,49	2 941	3
6. Penajam Paser Utara	24	9 866,00	131	
7. Mahakam Ulu	16	3 808,00	238	
Kota				
1. Balikpapan	332	51 882,79	1 296	10
2. Samarinda	150	32 438,00	419	11
3. Bontang	22	8	1	
Kalimantan Timur	1 005	1 266 221,77	16 247	384

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Tahun	Jumlah Proyek	realisasi Investasi
(1)	(2)	(3)
2011	228	28 328 877 631 462
2012	211	30 478 370 000 000
2013	454	14 685 375 400 000
2014	357	37 872 764 871 600
2015	563	39 379 341 850 000
2016	714	23 312 967 480 000
2017	923	28 202 106 080 000
2018	1 033	33 814 483 540 000
2019	3 13	35 620 544 100 000
2020	4 702	80 377 920 480 000
2021	1 035	41 177 159 120 000
2022	7 711	57 765 915 399 500

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.8 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA dan PMDN	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	21 266	228	93,27
2012	86 331	211	409,15
2013	107 565	454	236,93
2014	36 711	357	102,83
2015	91 522	563	162,56
2016	51 607	714	72,28
2017	24 355	923	26,39
2018	25 801	1 033	24,98
2019	36 244	4 702	7,71
2020	2 599	4 702	5,53
2021	27 405	1 035	26,48
2022	56 423	7 711	7,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.9 Jumlah Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2022

Sektor Usaha	Total
(1)	(2)
Pertanian	13
Lingkungan Hidup	34
Kehutanan	75
Energi dan Sumber Daya Mineral	113
Ketenaganukliran	0
Perindustrian	0
Perdagangan	0
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0
Transportasi (Perhubungan)	178
Kesehatan	3
Pendidikan dan Kebudayaan	4
Pariwisata	0
Keagamaan	0
Ketenagakerjaan	0
Pertahanan dan Keamanan	0
Komunikasi dan Informatika	0
Sosial	9
Total	823

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023

JUMLAH KEJADIAN BENCANA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur
Source: National Unity and Politics Agency
for East Kalimantan Province

BAB VII

PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas yakni dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

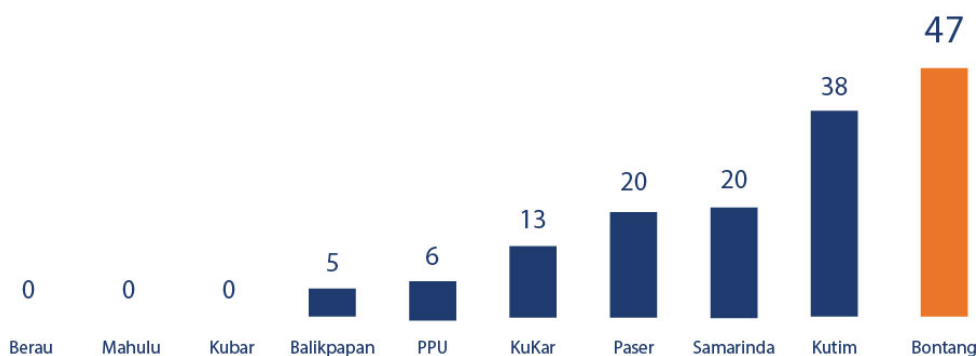
1. Penyusunan program badan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
5. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.





Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Grafik batang di bawah menunjukkan jumlah anggota FKDM di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 7.1.1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2022

Indikator RPJMD	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur	48	70	12	102
2. Persentase Penggunaan Hak-Hak Politik Masyarakat	66,27	66,27	67,5	67,5
3. Jumlah Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200	178	179	147

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.2 Jumlah LSM Tahun 2019-2022

Kategori	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah LSM Lokal	5	4	3	1
Jumlah LSM Lokal Baru	0	0	3	0
Jumlah LSM Nasional	0	0	0	0
Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah	0	0	0	0
Jumlah LSM Aktif	5	4	27	0
Jumlah LSM Tidak Aktif	0	0	179	1
Jumlah LSM Terdaftar	5	4	206	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.3 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Kategori	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Anggota DPRD	385	385	385	385
Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin				
- Laki-Laki	317	332	332	332
- Perempuan	68	68	68	68
Jumlah Fraksi DPRD	8	8	8	8
Partai Politik				
- Jumlah Parpol Peserta Pemilu	16	16	16	16

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.4 Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosialisasi Inpres No. 2 Tahun 2020 ke Toga, Tomas, Toda dan Tokoh Pemuda	Kegiatan	1	-
Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Kegiatan	4	-
Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kab. Kutim	Kegiatan	-	1
Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Kegiatan	-	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.5 Jumlah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Paser	Orang	20	134.3/KEP-67/2022	24 Januari 2022	2020-2024
Kab. Kutai Barat	Orang				
Kab. Kutai Kartanegara	Orang	13	135/SK-BUP/HK/2022	24 Maret 2022	2019-2023
Kab. Kutai Timur	Orang	38	223/K.707/2019	20 Desember 2019	2019-2022
Kab. Berau	Orang		134 Tahun 2021		
Kab. Penajam Paser Utara	Orang	6	220/237/2019	30 Desember 2019	2019-2023
Kab. Mahakam Ulu	Orang		800.05.300/K.152/2021		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 7.1.5

Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Balikpapan	Orang	5	188.45-206/2018	7 Juni 2018	2018-2022
Kota Samarinda	Orang	20	489/208/HK-KS/V/2020	20 Mei 2020	2020-2025
Kota Bontang	Orang	47	188.45/362/BAKES-BANGPOL/2021	29 Juli 2021	2021-2026
Provinsi Kalimantan Timur	Orang		220/K.248/2015		
Kab. Berau	Orang		134 Tahun 2021		
Kab. Penajam Paser Utara	Orang	6	220/237/2019	30 Desember 2019	2019-2023
Kab. Mahakam Ulu	Orang		800.05.300/K.152/2021		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.6 Data Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Kab/Kota	Satuan	No SK	TGL SK	Masa Berlaku	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Paser	SK	134.3/KEP-282/2022	18/04/2022	2019 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Barat	SK	800.05.450/K.752/2021	04/08/21	2021 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Kartanegara	SK	102/SK-BUP/HK/2021	17/03/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Timur	SK	223/K.537/2022	16/06/2022	2019 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Berau	SK	353 TAHUN 2021	09/03/21	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Penajam Paser Utara	SK	223.05/227/2018	19/07/2018	2018 - 2023	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Mahakam Ulu	SK	800.300/K.141/2022	09/06/22	2022 - 2027	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Sudah Terbentuk
Kota Balikpapan	SK	118.45-107/2020	03/05/20	2020 - 2025	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Samarinda	SK	220/226/HK- KS/IV/2022	04/05/22	2022 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Bontang	SK	199/2017	04/12/17	2017 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Provinsi Kalimantan Timur	SK	450/K.349/2022	31/05/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.7 Data Pembentukan Forum pembauran kebangsaan (FKP) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Kab/Kota	Satuan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Paser	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Barat	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Kartanegara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Berau	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Penajam Paser Utara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Mahakam Ulu	SK	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses
Kota Balikpapan	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Samarinda	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Bontang	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Provinsi Kalimantan Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

7.2 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan



Masyarakat. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai Tugas untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ;
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah ;
4. Pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Masyarakat ;
5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Aparatur lainnya ;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada ;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

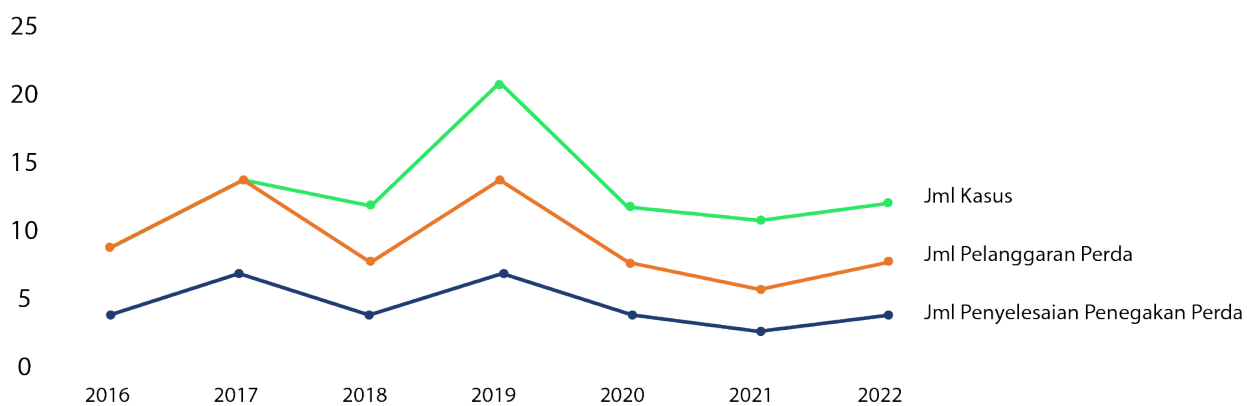




Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasil dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sasaran yaitu suatu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa Hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Jadi Sasaran yang diinginkan selama 5 tahun atau jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Penegakan Produk Hukum Daerah ;
2. Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat ;
4. Penanganan Kebakaran.

Grafik 7.2.1 Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Tabel 7.2.1 Data Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022

Kategori	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Jumlah penyelesaian penegakkan perda	4	7	4	7	4	3	4
Jumlah Pelanggaran Perda	5	7	4	7	4	3	4
Jumlah Kasus	0	0	4	7	4	5	4
Rasio Penegakan Perda	80	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.2 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2016-2022

Kategori	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pelanggaran Perda	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	0	0	0	0	0	0	0
Rasio Penegakan Perda (%)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Provinsi)	147	143	145	172	173	0	0
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Kabupaten/Kota)	1 502	1 502	1 502	1 052	1 052	0	0
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Provinsi)	30	30	30	30	30	33	0
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Kabupaten/Kota)	6 427	22 557	22 557	22 557	22 557	0	0
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	211	2 793	2 793	2 793	2 793	0	0
Jumlah Pos Siskamling	3 111	1 927	1 927	1 927	12 293	0	0
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa (%)	3,00	1,86	1,86	1,86	-	0	0,00
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5 672	138	138	138	-	0	0
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5 958	365	365	365	-	0	0
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	105,04	264,49	264,49	264,49	-	0	0,00
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (%)	4,20	4,12	4,04	2,79	-	0,00	0,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022

INDIKATOR	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Angka Pelayanan Publik	84,9	81,42
Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	4
Jumlah pencegahan gangguan trantibum (%)	81,59	100
Jumlah penindakan atas gangguan trantibum (%)	52,29	100
Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah terlatih	10 686	2 492
Jumlah daerah rawan kebakaran (%)	-	100
Peta rawan kebakaran	1	1

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.4 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	99,86	100	87	80	100
Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (%)	100	56,17	83	70	100
Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat (%)	100	100	86	100	100
Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran (%)	60	90	78	50	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.5 Jumlah Aparat Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

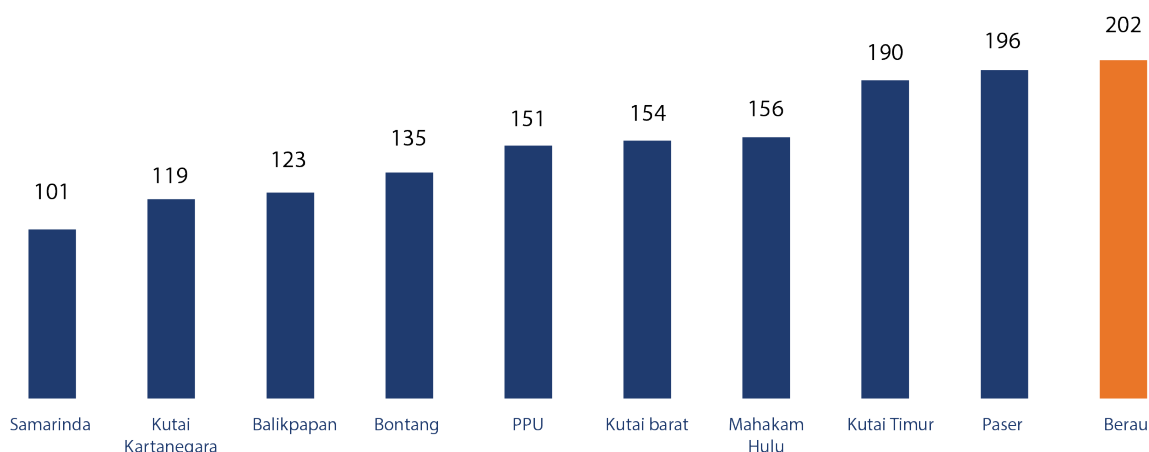
Kabupaten/kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	193	0	1665	0	0
Kutai Barat	0	0	2623	0	0
Kutai Kartanegara	0	0	422	0	0
Kutai Timur	138	151	131	0	0
Berau	148	169	316	0	0
Penajam Paser Utara	197	0	231	255	0
Mahakam Ulu	0	0	75	0	0
Balikpapan	229	228	352	0	0
Bontang	101	100	850	0	0
Samarinda	0	0	631	0	0
Kalimantan Timur	145	172	173	176	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas utama yang mencakup pemberian pedoman dan arahan terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. BPBD juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta berperan dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selain itu, BPBD memiliki tanggung jawab melaporkan secara berkala kepada Presiden, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan baik dari dalam maupun luar negeri, serta memastikan penggunaan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijalankan sesuai peraturan. BPBD juga memiliki fungsi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, serta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

Grafik 7.3.1 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Januari-Oktober 2022

Elemen Data	2022	
	satuan	data
(1)	(2)	(3)
Jumlah pengungsi akibat bencana		
(1) Banjir	orang	608
(2) Longsor	orang	-
(3) Gempa	orang	-
(4) Tsunami	orang	-
(5) Konflik	orang	-
Jumlah Kabupaten lokasi	lokasi	7
Jumlah Kota Lokasi	lokasi	3
Jumlah pengungsi yang telah kembali	orang	608
Jumlah korban bencana alam		
Meninggal	orang	-
Hilang	orang	-
Luka-luka	orang	-
Jumlah lokasi bencana	lokasi	441
Jumlah Kabupaten lokasi bencana	Kabupaten	7
Jumlah Kota lokasi bencana	Kota	3
Jumlah Kecamatan lokasi bencana	Kecamatan	99
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	%	85
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	Desa/ Kelurahan	12
Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	80

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten/kota	Jenis Bencana			
	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan lahan	Tanah Longsor	Banjir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Kaltim	200	30	105	300
Kota Samarinda	60	2	67	32
Kota Balikpapan	54	13	28	31
Kota Bontang	4	1	-	64
Kab. Kutai Kartanegara	22	-	-	47
Kab. Kutai Timur	15	3	1	50
Kab. Penajam Paser Utara	6	4	3	30
Kab. Paser	13	-	1	27
Kab. Berau	18	5	1	7
Kab. Kutai Barat	5	2	3	11
Kab. Mahakam Hulu	3	-	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 7.3.2

Kabupaten/kota	Jenis Bencana				
	Puting Beliung	Konflik	Kecelakaan Transportasi Udara	Kecelakaan Transportasi Sungai Laut	Wabah Penyakit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi Kaltim	10	-	-	24	1
Kota Samarinda	1	-	-	4	-
Kota Balikpapan	2	-	-	1	-
Kota Bontang	-	-	-	1	-
Kab. Kutai Kartanegara	1	-	-	7	-
Kab. Kutai Timur	-	-	-	2	-
Kab. Penajam Paser Utara	3	-	-	1	-
Kab. Paser	2	-	-	1	1
Kab. Berau	1	-	-	2	-
Kab. Kutai Barat	-	-	-	2	-
Kab. Mahakam Hulu	-	-	-	3	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 7.3.2

Kabupaten/kota	Jenis Bencana			Total Kejadian Bencana
	Gempa Bumi dan Tsunami	Orang Tenggelam	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Kaltim	2	28	49	749
Kota Samarinda	-	5	26	197
Kota Balikpapan	-	2	16	147
Kota Bontang	-	-	-	70
Kab. Kutai Kartanegara	-	6	-	83
Kab. Kutai Timur	-	1	1	73
Kab. Penajam Paser Utara	-	2	5	54
Kab. Paser	1	2	1	49
Kab. Berau	1	6	-	41
Kab. Kutai Barat	-	3	-	26
Kab. Mahakam Hulu	-	1	-	9

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Elemen Data	Satuan	Data 2022 (s.d Oktober 2022)
(1)	(2)	(3)
Jumlah Kawasan Rawan Longsor	Kabupaten/Kota	8
Jumlah Kawasan Rawan Banjir	Kabupaten/Kota	10
Jumlah Kawasan Rawan Angin topan	Kabupaten/Kota	6
Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran	Kabupaten/Kota	10
Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kabupaten/Kota	2
Jumlah Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kabupaten/Kota	-
Jumlah Kawasan Rawan Gagal Teknologi	Kabupaten/Kota	-
Jumlah Kawasan Rawan Konflik	Kabupaten/Kota	-
Jumlah Kawasan Rawan Tenggelam	Kabupaten/Kota	9
Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	Kabupaten/Kota	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.4 Kerusakan Kasawan Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Elemen Data	Satuan	Data 2022 (s.d Oktober 2022)
(1)	(2)	(3)
Longsor	Unit	98
banjir	Unit	25 508
Angin Topan / Puting Beliung	Unit	43
Kebakaran hutan dan lahan	Ha	52
Pemukiman	Unit	654
Gempa bumi	Unit	-
Gelombang Pasang	Unit	-
Gagal Teknologi	Unit	-
Konflik	Unit	-
Tenggelam	Jiwa	28

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021

Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	Tinggi
Kutai Barat	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	Tinggi
Kutai Kartanegara	160.40	135.52	129.84	124.79	124.79	119.16	119.16	Sedang
Kutai Timur	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	Tinggi
Berau	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	Tinggi
Penajam Paser Utara	160.40	160.40	160.40	160.40	160.40	158.32	151.70	Tinggi
Mahakam Ulu	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	Tinggi
Balikpapan	159.20	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	123.46	Sedang
Bontang	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.89	Sedang
Samarinda	134.80	111.30	110.35	109.95	102.94	102.94	101.05	Sedang

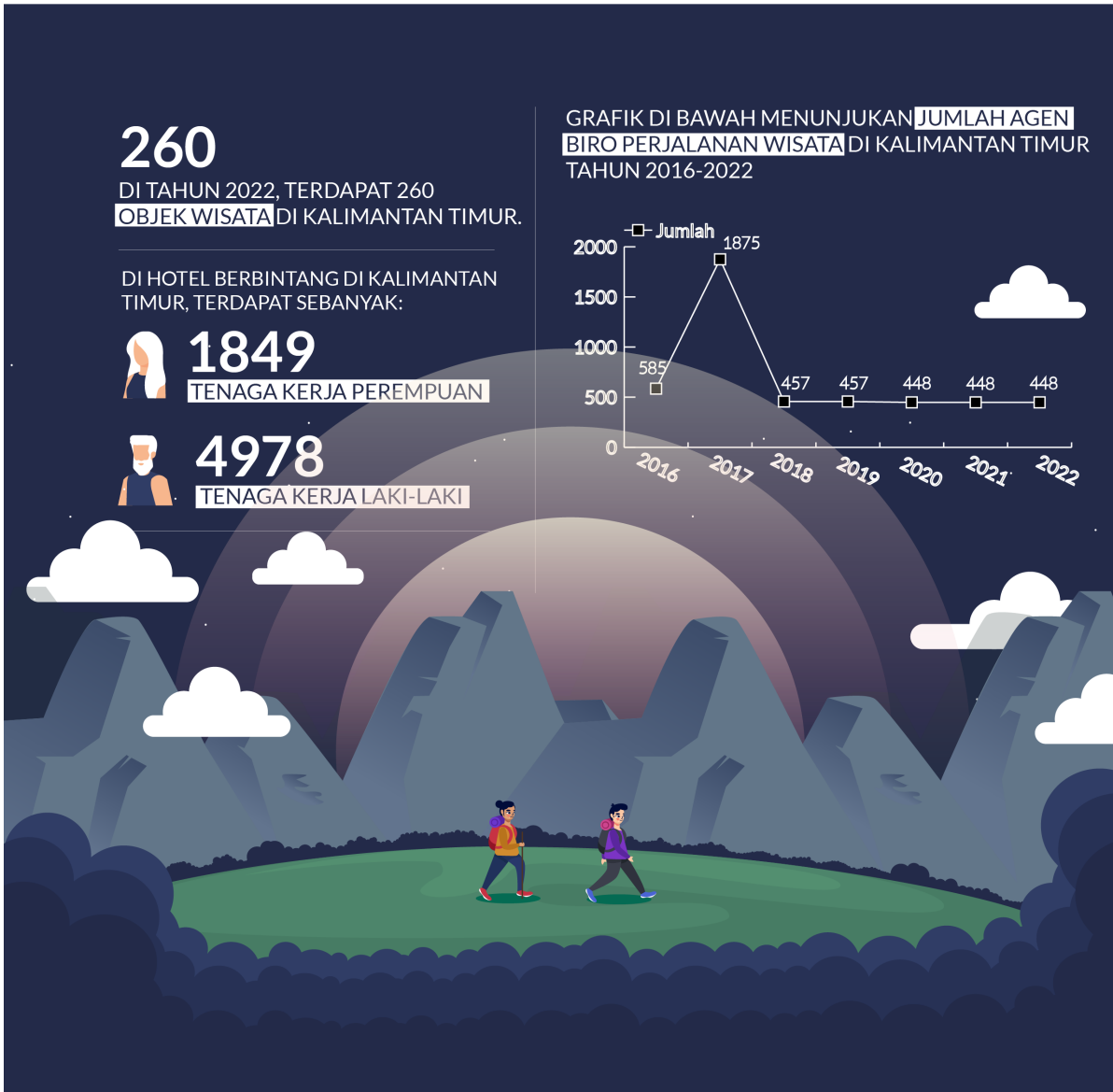
* Catatan : nilai indeks risiko bencana yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Sumber Data : IRBI BNPB 2021

PROFIL
STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



x x x x x x
x x x x x x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x



BAB VIII

TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA

8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

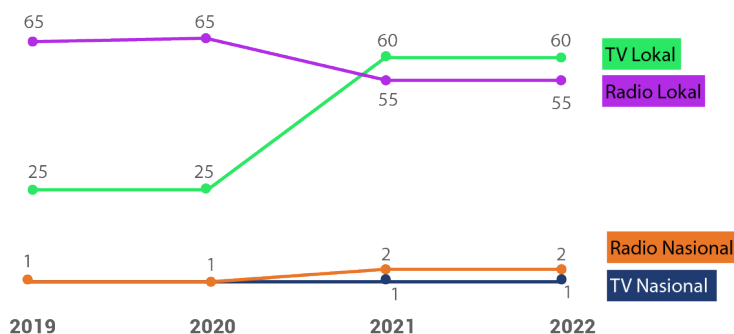
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo memiliki sejumlah fungsi yang sangat relevan.

Fungsi-fungsi Diskominfo termasuk perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Diskominfo bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor komunikasi dan informatika.

Dinas ini juga memiliki peran dalam merumuskan, merencanakan, membina, dan mengendalikan kebijakan teknis terkait teknologi informasi, aplikasi telematika, dokumentasi, informasi, serta pos dan telekomunikasi. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan juga menjadi bagian dari tanggung jawab Diskominfo, bersama dengan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

Selain tugas-tugas utama tersebut, Diskominfo juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian, Diskominfo memiliki peran penting dalam mengelola dan memajukan bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut, serta mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

Grafik 8.1.1 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022





Grafik garis ini menggambarkan jumlah Penyiaran Media Elektronik yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019 hingga 2022. Data tersebut terbagi menjadi empat kategori, yaitu TV Lokal, TV Nasional, Radio Lokal, dan Radio Nasional.

Pertama, untuk kategori TV Lokal, jumlahnya tetap konstan pada 25 pada tahun 2019 dan 2020, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 60. Sementara itu, TV Nasional dan Radio Nasional menunjukkan stabilitas, dengan masing-masing hanya memiliki satu penyiaran selama seluruh periode yang diamati. Di sisi lain, Radio Lokal mengalami penurunan dari 65 pada tahun 2019 menjadi 55 pada tahun 2020, dan jumlahnya tetap stabil selama tahun 2021 dan 2022 pada angka 55.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah TV Lokal yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022, yang dapat mencerminkan perkembangan industri penyiaran lokal di wilayah tersebut. Sementara itu, penyiaran TV Nasional dan Radio Nasional tetap dalam skala yang relatif kecil dan stabil selama periode yang diamati, sedangkan Radio Lokal mengalami penurunan kecil di awal tetapi kemudian stabil. Informasi ini dapat berguna untuk memahami dinamika media elektronik di Kalimantan Timur dan potensi pengaruhnya terhadap perkembangan informasi dan hiburan di provinsi tersebut.

Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Samarinda	4,00	4,00	-	-
2	Balikpapan	-	-	-	-
3	Bontang	13,00	13,00	-	-
4	Kutai Kartanegara	24,00	24,00	15,03	15,03
5	Kutai Timur	25,00	25,00	21,01	21,01
6	Kutai Barat	46,00	46,00	39,47	39,47
7	Paser	29,00	29,00	23,19	23,19
8	Penajam Paser Utara	17,00	17,00	-	-
9	Berau	38,00	38,00	17,17	17,17
10	Mahakam Ulu	6,00	6,00	6,12	6,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2019-2022

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Provider	5	5	5	5
2	Jumlah Pameran/EXPO	67	-	2	2
3	Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	726	997	997	841
4	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	8	10	11	12
5	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	-	5	5	5
6	Jaringan Telepon (operator telp kabel)	-	1	1	1
7	Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi	11	11	11	11
8	Stasiun Radio	178	178	57	57
9	Website Daerah	30	30	36	36

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.3 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk	92	92	118	118
2	TV Lokal	25	25	60	60
3	TV Nasional	1	1	1	1
4	Radio Lokal	65	65	55	55
5	Radio Nasional	1	1	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.4 RPJM Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	25,00	-	25,00	25,00
2	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2	2	2	2
3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	80,00	80,00	80,00	85,00
4	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	3,14	2,22	3,44
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	70,00	70,00	70,00	71,50
7	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

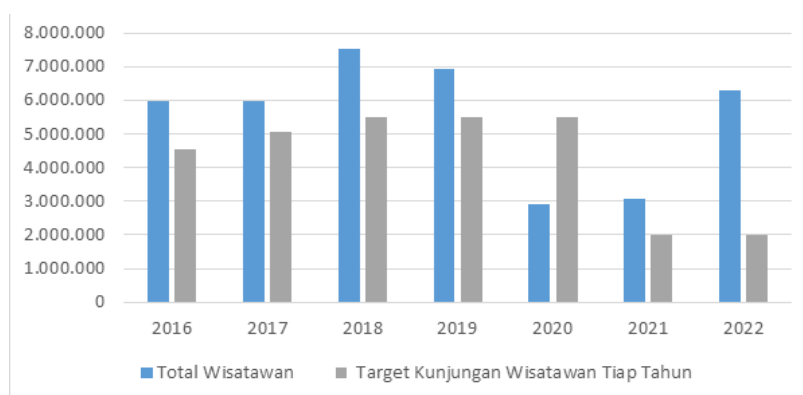
8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pariwisata memiliki tugas mencakup perumusan dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, seperti pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengendalian usaha jasa pariwisata, dan pengembangan karya seni budaya. Koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan juga menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata untuk mencapai pertumbuhan destinasi pariwisata Kalimantan Timur serta pengembangan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan supervisi atas urusan pemerintahan di berbagai aspek pariwisata. Pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian tugas di lingkungan Dinas Pariwisata juga termasuk dalam fungsi-fungsi yang diemban oleh instansi ini.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan rencana strategis, serta mengawasi pelaksanaan program-program di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, Dinas Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik instansi pemerintahan maupun pihak ketiga, untuk memastikan sinkronisasi dan optimalisasi program pariwisata. Melalui berbagai fungsi ini, Dinas Pariwisata berperan dalam memajukan sektor pariwisata Kalimantan Timur dan meningkatkan kualitas serta daya saing pariwisata daerah.

Grafik 8.2.1 Total Wisatawan dan Target Kunjungan Wisatawan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Pertama, dari tahun 2016 hingga 2018, Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Total Wisatawan, naik dari 5.958.866 menjadi 7.542.294. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 6.948.118, tetapi jumlah wisatawan masih di atas Target Kunjungan Wisatawan pada tahun yang sama sebesar 5.500.000. Namun, terjadi perubahan yang dramatis pada tahun 2020, di mana Total Wisatawan turun tajam menjadi hanya 2.904.115, yang mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang membatasi perjalanan internasional. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan lagi menjadi 3.072.928, meskipun masih di bawah Target Kunjungan Wisatawan. Pada tahun 2022, Total Wisatawan mencapai 6.312.215, kembali mendekati atau bahkan melebihi Target

Kunjungan Wisatawan. Data ini mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap industri pariwisata di provinsi ini dan upaya pemulihan yang diikuti oleh pertumbuhan.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan fluktuasi dalam kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Timur selama periode yang diamati, dengan peningkatan yang signifikan sebelum pandemi, penurunan tajam pada tahun 2020, dan upaya pemulihan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Data ini memberikan informasi penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan mencapai target kunjungan wisatawan yang ditetapkan.



Tabel 8.2.1 Daftar Data Prioritas Tahun 2022

No	Jumlah hotel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hotel bintang lima	5	5	5	5	5	5	5
2	Kamar hotel bintang lima	104	989	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038
3	Tempat Tidur Hotel Bintang Lima	1 563	1 676	461	461	784	784	784
4	Hotel Bintang Empat	11	13	16	16	14	14	14
5	Kamar Hotel Bintang Empat	1 628	5 803	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
6	Tempat Tidur Hotel Bintang Empat	194	5 258	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764
7	Hotel Bintang Tiga	20	25	26	26	26	26	26
8	Kamar Hotel Bintang Tiga	2 214	2 522	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712
9	Tempat Tidur Hotel Bintang Tiga	1 445	2 696	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577
10	Hotel Bintang Dua	12	12	16	16	16	16	16
11	Kamar Hotel Bintang Dua	698	844	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
12	Tempat Tidur Hotel Bintang Dua	970	1 372	613	613	613	613	613
13	Hotel Bintang Satu	7	14	9	9	9	9	9
14	Kamar Hotel Bintang Satu	373	1 866	627	627	627	627	627
15	Tempat Tidur Hotel Bintang Satu	539	535	461	461	461	461	461
16	Hotel Non Bintang	640	873	413	420	685	685	685
17	Kamar Hotel Non Bintang	1 245	9 918	505	505	5 903	5 903	5 903
18	Tempat Tidur Hotel Non Bintang	1 425	1 154	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.2 Data Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022

No	Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Objek Wisata Alam	261	274	260	260	260	260	260
2	Objek Wisata Sejarah dan Budaya	113	177	177	177	177	177	177
3	Objek Wisata Buatan	152	135	150	150	150	150	150
4	Objek Wisata Kehidupan Masyarakat	50	54	54	54	54	54	54
5	Objek Wisata Bahari	53	48	48	48	48	48	48
6	Objek Wisata Taman Hutan Raya	5	9	5	7	7	7	7
7	Objek Wisata Nasional	4	5	4	4	4	4	4
8	Objek Wisata Taman Wisata Laut	64	64	64	64	64	64	64
9	Objek Wisata Hutan Mangrove	12	12	12	19	19	19	19
10	Objek Wisata Religi	50	26	26	26	26	26	26
11	Total Jenis Objek Wisata	764	804	800	809	809	809	809

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.3 Data jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2022

No	Tahun	Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata
(1)	(2)	(3)
1	2016	585
2	2017	1875
3	2018	457
4	2019	457
5	2020	448
6	2021	448
7	2022	448

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.4 Data jumlah tenaga kerja di hotel berbintang di kaltim 2022

No	Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Tenaga Kerja Laki Laki	1 560	4 762	4 637	4 559	4 978	4 978	4 978
2	Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	1 192	1 1112	1 613	1 576	1 849	1 849	1 849

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.5 Data pramuwisata dan toko cinderamata provinsi kaltim 2016-2022

No	Pramuwisata & Toko Cinderamata	Jumlah Pramuwisata	Toko Cinderamata
(1)	(1)	(2)	(3)
1	2016	105	85
2	2017	87	81
3	2018	94	81
4	2019	94	81
5	2020	94	81
6	2021	69	75
7	2022	69	75

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.6 Data jumlah usaha restoran dan rumah makan di kaltim 2022

No	Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	1 620	2 088	2 085	2 098	2 098	2 177	2 177

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur



No. Akta MORA of
07/102/2011



Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai Pinang Luar,
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75121

